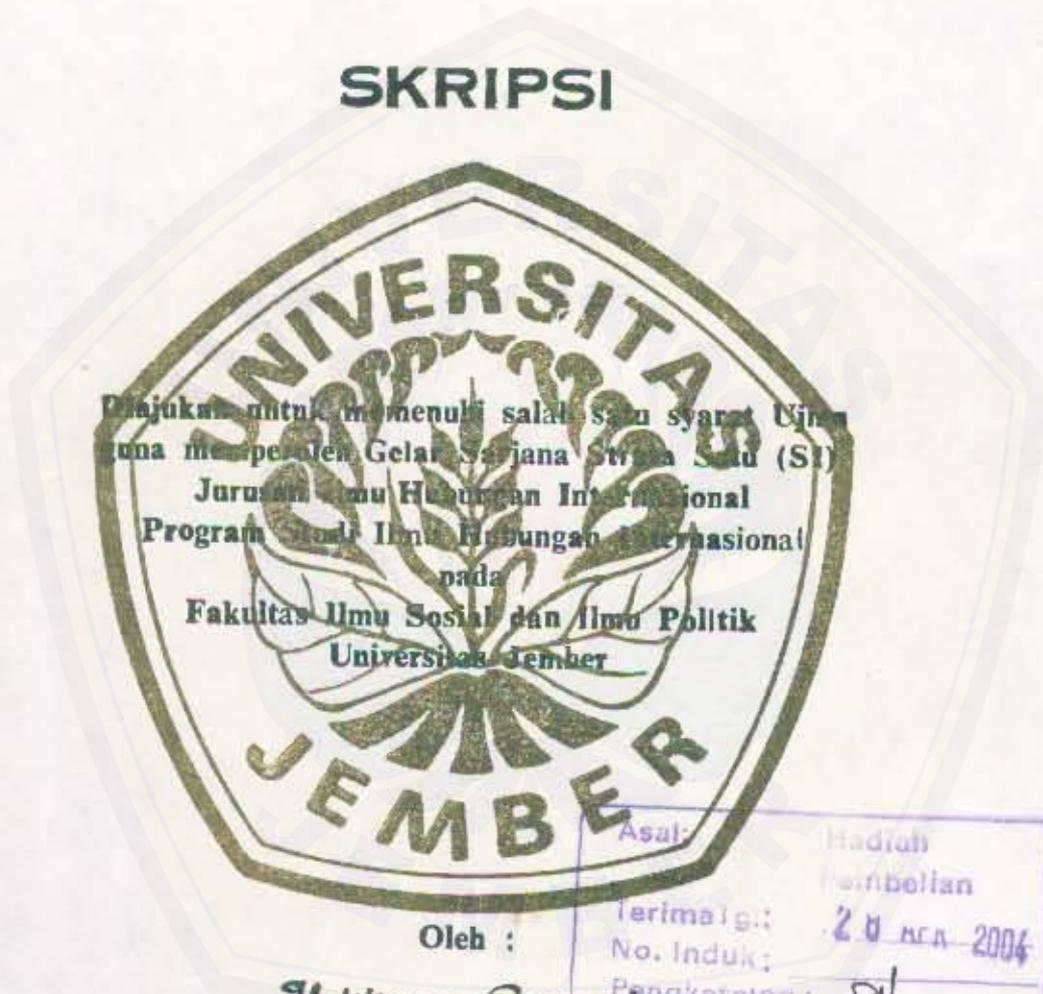




**KEPUTUSAN ISRAEL MEMBANGUN PAGAR KEAMANAN
DI DAERAH TEPI BARAT PADA TAHUN 2002**

SKRIPSI



Dijadikan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian
guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

Helilintar Guyandi

NIM. 98-1199

Pembimbing :

Drs. M. Nur Hasan, MHum

ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2003

Asal:

Hadiah
Pembelian

Klass

Terima lg.:

No. Induk:

Pengkatalog:

20 Mei 2004

327769407690

604

k e,

ISRAEL - HUBUNGAN WAR NEGERI
- PALESTINA

PERNYATAAN

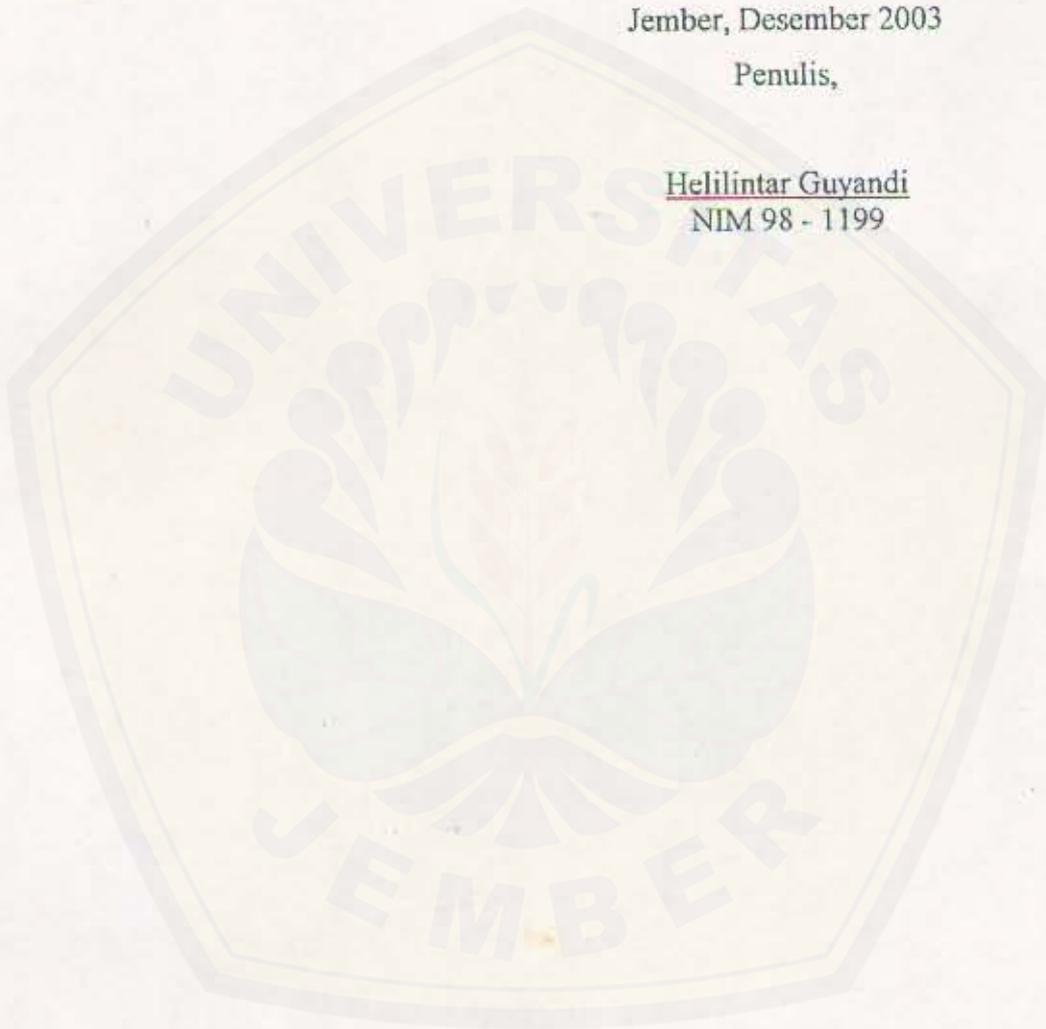
a menyatakan bahwa skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan menggunakan sumber-sumber yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jember, Desember 2003

Penulis,

Helilintar Guyandi

NIM 98 - 1199



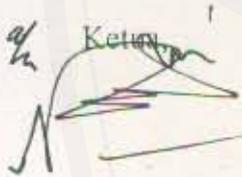
PENGESAHAN

Diterima Dan Dipertahankan Di Depan Panitia Penguji Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Hari : Selasa
Tanggal : 16 Desember 2003
Jam : 09.00 – Selesai

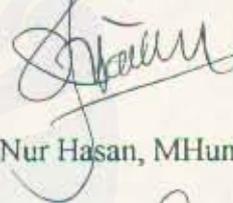
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Panitia Penguji

 Ketum

Drs. Asrial Aziz

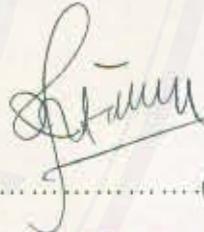
Sekretaris,



Drs. M. Nur Hasan, MHum

Anggota,


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

Drs. Asrial Aziz

Drs. M. Nur Hasan, MHum

Drs. A. Habibullah, MSi

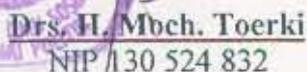
Drs. Agung Purwanto, MSi

Mengetahui,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan,




Drs. H. Mbch. Toerki
NIP 130 524 832

MOTTO

Kemenangan hari ini bukanlah berarti kemenangan esok hari,
Kegagalan hari ini bukanlah berarti kegagalan esok hari....
Hidup adalah Perjuangan tanpa henti-henti,
Usah kau menangisi hari kemarin.*

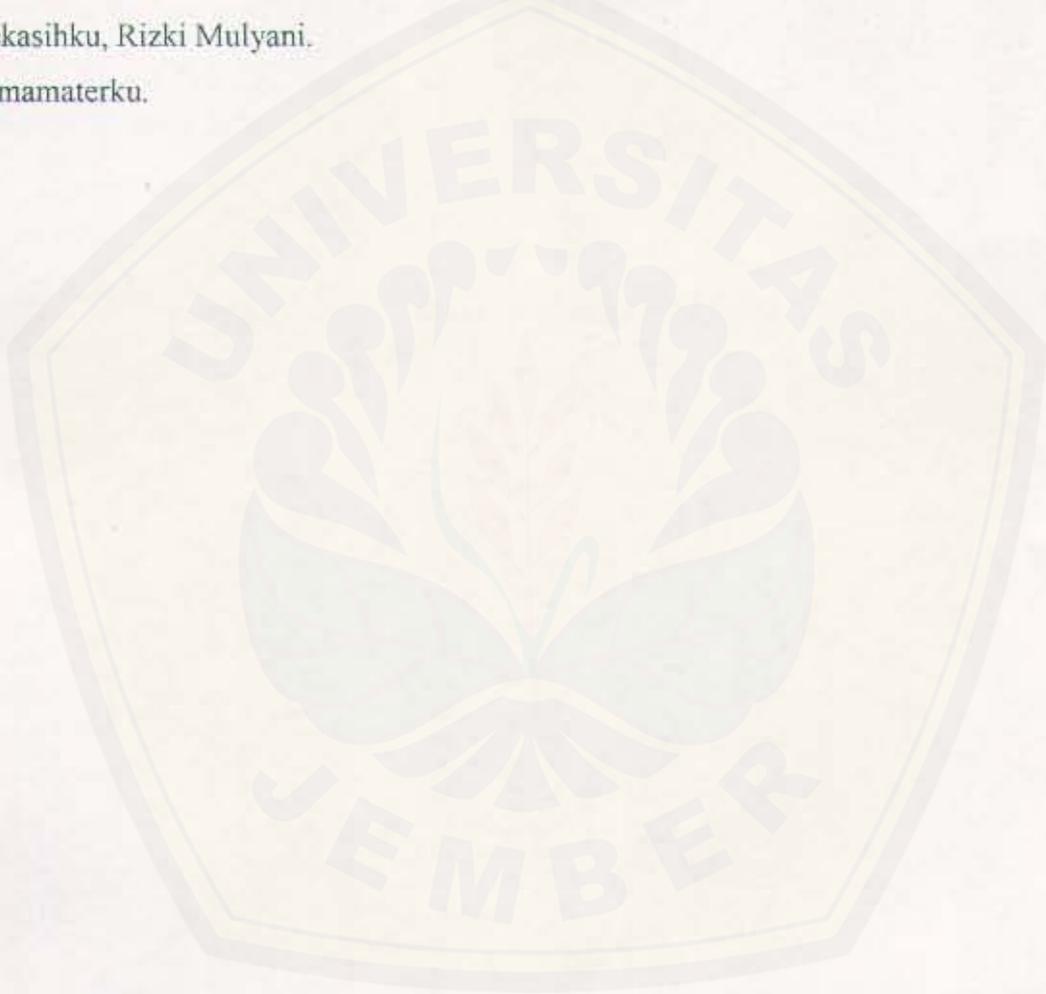


* Dewa, Hidup Adalah Perjuangan, Bintang Lima, PT. Aquarius Musikindo, 2000

LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tulisanku ini untuk:

- ✿ Mama yang penuh pengorbanan dan kasih sayang, dan Papa yang belum banyak kukenal.
- ✿ Adikku, Mahariyani Guyandi, semoga bertambah dewasa.
- ✿ Kekasihku, Rizki Mulyani.
- ✿ Almamaterku.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan berkah dan anugerah-Nya. Hanya dengan izin-Nya, penulis dengan segala upaya dan kerja keras dapat menyelesaikan tugas akhir proses akademik yaitu skripsi yang berjudul:

“Keputusan Israel Membangun Pagar Keamanan di Tepi Barat pada tahun 2002”

Penulis sangat menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai macam pihak, tidak mungkin penulisan skripsi ini akan selesai. Arahan dari dosen pembimbing dan dukungan moral dari berbagai pihak telah sangat membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

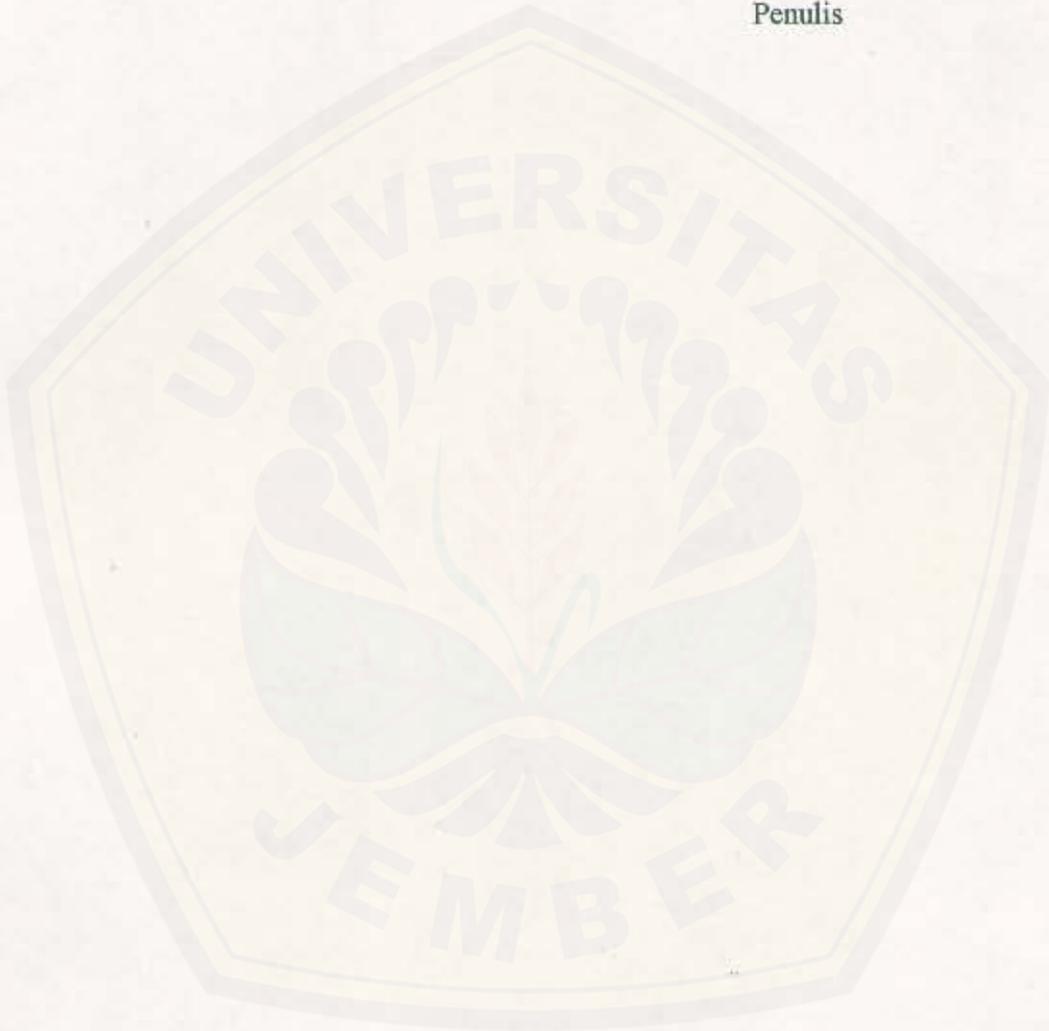
Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. M. Nur Hasan, MHum selaku dosen pembimbing yang penuh perhatian dan kesabaran membimbing penulis menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA selaku dosen wali yang telah banyak memberikan nasehat selama penulis menjalani masa kuliah.
3. Drs. Nuruddin M. Yasin selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Drs. H. Moch. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Rekan-rekan jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 1998 yang memberi inspirasi.
6. Keluarga besar UKM Olah Raga Bola Basket Universitas Jember sebagai wadah berkarya.
7. Segenap warga Bangka V/12. Rudi, terima kasih atas bantuan komputernya yang sangat berarti. Eka, Nickmoon, Heru, One dan Budi yang menggairahkan suasana kos. Mas Iqbal selamat berjuang. Juga para sahabat mantan Bangka V/12 yaitu Agus Cubitus, Yoni, A'an, Irvan, Ali, Tri, Umam, Fajar, Adi, Wachid, Wachid jempol, Kodar, Rizal, Mas Udin, Bang Lian, dan Lek Dar.
8. Warung Jawa 21 yang memenuhi kebutuhan pangan penulis selama hampir lima tahun terakhir ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari pembaca dan pihak-pihak yang lain guna menambah kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua pihak yang membutuhkan.

Jember, Desember 2003

Penulis



DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta Israel-Palestina	xiii
2. Gambar Pagar Keamanan Israel.....	xiv



HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR ISI	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Batasan Materi dan Waktu	7
1.2.1 Batasan Waktu	7
1.2.2 Batasan Materi	8
1.3 Permasalahan.....	8
1.4 Kerangka Teori.....	8
1.5 Hipotesis.....	17
1.6 Metode Penelitian.....	19
1.6.1 Tahap Pengumpulan Data	19
1.6.2. Metode Analisa	19
1.7 Metode Pendekatan	20
II. GAMBARAN UMUM ISRAEL DAN SEJARAH PERLAWANAN	
PALESTINA	22
2.1 Gambaran Umum Israel	22
2.1.1 Latar Belakang Sejarah	22
2.1.2 Politik Dalam Negeri.....	29
2.1.3 Politik Luar Negeri.....	36
2.2 Sejarah Perlawanan Palestina.....	37
2.2.1 Latar Belakang.....	37
2.2.2 Pembentukan Kelompok Perjuangan	39
2.2.3 Arti Kelompok Perjuangan Palestina bagi Israel	44
III. KEBIJAKAN ISRAEL DALAM MENGHADAPI PERLAWANAN	
PALESTINA	49
3.1 Periode setelah Proklamasi Kemerdekaan Israel tahun 1948.....	50

3.2 Periode Perang Arab-Israel tahun 1967	62
3.3 Periode Intifadah tahun 1988	73
3.4 Periode Intifadah II tahun 2000.....	88
IV. KEPUTUSAN ISRAEL TENTANG PAGAR KEAMANAN.....	93
4.1 Faktor-faktor yang Melatarbelakangi.....	94
4.1.1 Faktor-faktor Dalam Negeri	95
4.1.1.a Keamanan dan Integritas Israel.....	95
4.1.1.b Politisasi Masalah Keamanan.....	98
4.1.1.c Perbedaan situasi Tepi Barat dan Jalur Gaza.....	99
4.1.1.d Pemikiran Ariel Sharon	101
4.1.2 Faktor Luar Negeri	105
4.1.2.a Sikap bangsa Palestina.....	106
4.1.2.b Sikap Negara-negara Arab.....	106
4.1.2.c Sikap Amerika Serikat	107
4.2 Tujuan dari Pagar Keamanan.....	109
4.2.1 Alternatif Kebijakan	109
4.2.2 Tujuan Pagar Keamanan.....	111
4.3 Reaksi atas Kebijakan.....	113
4.3.1 Reaksi dari Dalam Negeri.....	117
4.3.2 Reaksi dari Luar Negeri	118
4.4 Pembangunan Pagar Keamanan.....	124
4.4.1 Pelaksanaan Pembangunan Pagar Keamanan.....	124
4.4.2 Kendala selama Pembangunan.....	125
4.5 Hasil yang Dicapai	127
4.5.1 Situasi Keamanan pasca Pembangunan Pagar Keamanan.....	128
4.5.2 Kesesuaian Tujuan dengan Hasil yang dicapai.....	128
V. PENUTUP	132
5.1 Kesimpulan	132
5.2 Saran-saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA	x
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xiii
1. Peta Israel	xiii
2. Gambar Pagar Keamanan.....	xiv



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rabu, 5 Juni 2002, seorang warga Palestina pembawa bom bunuh diri dari kelompok Islamic Jihad berhasil meledakkan sebuah mobil di dekat sebuah bus umum milik Israel di Meggido. Dalam peristiwa ini, 14 orang tentara Israel (*IDF=Israel Defense Force*) dan 3 warga sipil Israel tewas, dan 38 lainnya terluka parah.¹ Dua pekan kemudian, pada 18 Juni 2002, sebuah bus kota Israel berpenumpang penuh meledak saat melintasi sebuah ruas jalan di kota Yerusalem. Menewaskan 20 orang penumpang termasuk seorang pria Palestina sebagai pelaku pemboman tersebut.²

Pihak militer Israel menyatakan telah menembak dua orang Palestina di dekat Netzarim, Zaara, pada Selasa malam tanggal 18 Juni 2002 karena kedua orang tersebut mencoba mendekati lokasi pembangunan pagar keamanan.³ Sementara itu di hari yang sama, sejumlah aktivis Palestina menyerang polisi Israel yang menjaga pembangunan pagar tersebut dengan granat tangan dan senapan otomatis.⁴ Para penyerang berhasil melarikan diri, dan proses pembangunan pagar tersebut dihentikan untuk sementara.

Keadaan seperti diatas bukan merupakan hal asing bagi warga Palestina maupun Israel yang sedang berkonflik. Warga Palestina di daerah pendudukan (Israel) mengalami tekanan dan perlakuan yang deskriminatif baik secara politik, ekonomi maupun kemanusiaan. Karena ketiga tekanan tersebut dan ditambah dengan semangat keagamaan telah melahirkan suatu gerakan perlawanan bangsa Palestina yang disebut dengan Intifadah. Intifadah pada dasarnya merupakan suatu gerakan perlawanan warga sipil Palestina terhadap Israel, dan merupakan gerakan perlawanan tanpa kekerasan.⁵

Pemicu terjadinya intifadah adalah suatu peristiwa tanggal 8 Desember 1987 di Jalur Gaza. Sebuah truk yang dikendarai oleh seorang Israel dari pemukiman Iriz meluncur ke jalan Mawazi dan menabrak 2 buah mobil yang dikendarai oleh oleh warga Palestina dan

¹ Jurnal of Palestine Studies XXXII, no. 1 (Autumn 2002) University of California Press, California, 2002, hal. 123.

² Kompas, Kamis, 20 Juni 2002, Israel kembali duduki Jenin dan Kalkilya.

³ Sijori Pos, Kamis, 20 Juni 2002, Militer Israel duduki Tepi Barat.

⁴ Kompas, Kamis, 20 Juni 2002, Israel kembali duduki Jenin dan Kalkilya.

⁵ M. Hamdan Basyar, Dilema Palestina dalam Perang Teluk, dalam Jurnal Ilmu Politik 9, Gramedia, Jakarta, 1991, hal 69.

menyebabkan 4 orang Palestina meninggal dan 9 orang lainnya terluka.⁶ Setelah proses pemakaman selesai, terjadi penyerangan terhadap serdadu Israel dengan menggunakan batu dan apa saja yang dapat digunakan untuk menyerang oleh pemuda-pemuda, orang-orang tua, dan wanita-wanita Palestina. Intifadah merupakan suatu gerakan yang memiliki kisaran antara demonstrasi dengan pertempuran militer. Gerakan ini terlalu keras bila dikatakan sebagai demonstrasi, namun belum mencapai tahap pertempuran secara militer.

Intifadah kembali mengemuka setelah kejadian di masjid Al Aqsa pada 28 September 2000. Ariel Sharon dengan membawa 3000 pasukan masuk dan mengepung masjid dengan alasan untuk mencari teroris Palestina yang diduga bersembunyi di sana. Kedatangan Ariel Sharon bersama pasukannya tersebut merupakan penghinaan bagi Palestina karena masjid tersebut merupakan “tempat terlarang” bagi Yahudi. Semenjak peristiwa tersebut perjuangan rakyat Palestina memasuki tahap baru yang sering disebut dengan Intifadah II atau juga disebut Intifadah Al Aqsa. Penulis menganggap bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu tonggak baru, dimana perjuangan Palestina mengarah pada semakin maraknya aksi bom bunuh diri yang telah dimulai sejak sembilan tahun sebelumnya.

Warga Palestina kini seakan berlomba untuk mengorbankan dirinya untuk menjadi sukarelawan operator bom bunuh diri. Tidak hanya pria, kaum wanita pun tidak ketinggalan untuk mendaftarkan diri. Pada 29 Maret 2002, suatu aksi bom bunuh diri dilakukan seorang gadis Palestina bernama Ayat Akhras berusia 16 tahun. Dan pada 27 Januari 2002, Idris Wafa, seorang wanita Palestina berusia 28 tahun menjadi operator bom bunuh diri wanita pertama.⁷

Sepuluh tahun yang lalu, tepatnya pada 16 September 1993, Sahar Taman Nabulis, seorang warga Palestina berusia 22 tahun bersama seorang rekannya melakukan aksi bom bunuh diri pertama kali. Sebuah mobil van merek *Mitsubishi* dipenuhi dengan kaleng-kaleng gas dan sebuah Al Quran diletakkan di kursi penumpang. Nabulis yang merupakan seorang pejuang kelompok Hamas kemudian menabrakkan mobil tersebut pada dua buah bus umum Israel. Delapan warga Israel terluka sedangkan Nabulis dan rekannya meninggal.⁸ Sangat mungkin, aksi Nabulis tersebut menjadi sumber inspirasi bagi serangkaian bom bunuh diri selanjutnya.

⁶ M. Hamdan Basyar, *Dilema Palestina dalam Perang Teluk*, dalam *Jurnal Ilmu Politik* 9, Gramedia, Jakarta, 1991, hal 70

⁷ Kompas, Minggu, 23 Juni 2002, *Intifada dan Aksi bunuh diri Palestina*.

⁸ Tempo, 15 Desember 2002, “Jalur cepat” menuju Surga, hal 84.

Semenjak bom bunuh diri pertama tahun 1993, telah terjadi lebih dari 105 kali aksi bom bunuh diri yang berhasil. Operator-operator bom tersebut disponsori oleh kelompok-kelompok perjuangan seperti Hamas, Al Fatah, Islamic Jihad, dan lain-lain.⁹ Sedangkan yang berhasil digagalkan oleh pihak militer Israel juga cukup banyak.

Bulan Juni 2002 merupakan bulan yang paling mencemaskan dan menakutkan bagi warga Israel sepanjang sejarah bom bunuh diri Palestina. Hal tersebut dikarenakan tingginya intensitas aksi bom bunuh diri yang terjadi. Sampai dengan pekan ketiga bulan tersebut tidak kurang 50 orang warga Israel baik sipil maupun militer yang meninggal dan 100 orang lainnya terluka akibat aksi bom bunuh diri tersebut.¹⁰ Bahkan kalangan pers Israel menyebut bulan Juni tersebut sebagai "Bulan Juni Hitam".¹¹

Lebih luas, tahun 2002 ini terjadi eskalasi aksi bom bunuh diri. Menurut Departemen Luar Negeri Israel, jumlah aksi bom bunuh diri sampai bulan April 2002 sebanyak 28 kali atau lebih dari dua pertiga dari peristiwa serupa selama tahun 2001 yang sebanyak 36 peristiwa.¹² Sedangkan korban meninggal akibat aksi tersebut meningkat dari 82 orang sepanjang tahun 2001 menjadi 233 jiwa pada 2002 sampai dengan bulan November.¹³ Sedangkan tempat peledakan berkisar pada tempat-tempat umum yang efektif dalam menimbulkan korban dalam jumlah yang besar. Sedangkan menurut Badan Sensus Kependudukan Israel, dalam dua tahun terakhir (2001-2002) sekitar satu juta warga Israel yang memiliki paspor telah meninggalkan negara Israel dan tidak kembali. Persebaran mereka adalah di seluruh dunia terutama Amerika Serikat dan Kanada.

Sumber lain menyebutkan data yang berbeda. Menurut IDF, mulai tahun 1993 sampai sebelum intifadah II tahun 2000 terjadi 61 aksi bom bunuh diri. Sedangkan semenjak intifadah II sampai Juni 2002 terjadi 116 kali aksi serupa. Periode Januari sampai Maret 2002 terjadi 38 kali bom bunuh diri yang membawa korban 127 orang meninggal. Pada April sampai Juni 2002, terjadi aksi sebanyak 27 kali dengan korban meninggal sebanyak 86 orang.

Hampir semua serangan bom bunuh diri semenjak kembali bergejolaknya intifadah II pada September 2000 berasal dari kawasan Tepi Barat. Sedikit sekali yang berasal dari

⁹ Tempo, 15 Desember 2002, "Jalur cepat" menuju Surga

¹⁰ Kompas, Minggu, 23 Juni 2002

¹¹ Kompas, Minggu, 23 Juni 2002

¹² Tempo, 15 Desember 2002

¹³ Tempo, 15 Desember 2002

Jalur Gaza karena kondisi Jalur Gaza yang tertutup dan dijaga ketat oleh tentara dan pemasangan alat-alat elektronik berupa detektor dan sensor.¹⁴ Kenyataan ini menimbulkan pemikiran di kalangan Israel bahwa Tepi Barat harus diperlakukan sama dengan Jalur Gaza yang terbukti efektif dalam meredam aksi-aksi semacam bom bunuh diri tersebut. Namun demikian, realisasi penutupan daerah Tepi Barat tidaklah semudah seperti di Jalur Gaza. Karena secara geografis, ekonomis, dan politis daerah Tepi Barat lebih menyatu dengan wilayah yang telah dikuasai Israel semenjak perang Arab-Israel pada 1967.

Dalam menghadapi serangan bom bunuh diri Palestina tersebut, Israel secara garis besar selama ini menetapkan empat pola reaksi. Pertama, menangkap dan atau membunuh para pejuang Palestina. Kedua, menyerang dan menduduki daerah Tepi Barat dalam jangka waktu yang panjang. Ketiga, membangun zona penyangga termasuk di dalamnya pagar keamanan yang berupa pagar pemisah antara wilayah Israel dengan daerah Tepi Barat.¹⁵ Keempat, tetap meneruskan pemukiman Yahudi yang disertai penjagaan militer yang ketat.¹⁶

Operasi Perisai Dinding yang dilakukan oleh Israel pada bulan April sampai Mei 2002 merupakan salah satu bentuk kebijakan Israel dalam menghadapi bom bunuh diri Israel. Operasi tersebut merupakan suatu invasi militer besar-besaran. Didukung oleh tank-tank dan pasukan dalam jumlah besar yang memasuki wilayah Palestina sampai dengan mengepung markas besar pemimpin Otoritas Palestina di Ramallah. Operasi ini bertujuan untuk menghancurkan infrastruktur para teroris Palestina. Pada awalnya operasi ini berhasil meredam aksi teroris Palestina. Namun hanya beberapa hari kemudian aksi-aksi bom bunuh diri kembali terjadi.

Di tengah semakin memburuknya keadaan dikarenakan meningkatnya kekerasan antara Israel dengan Palestina pada semester pertama 2002, Perdana Menteri (PM) Israel Ariel Sharon berencana untuk membuat suatu zona penyangga yang akan membagi wilayah-wilayah Palestina di tepi Barat menjadi kantong-kantong pemukiman Palestina yang saling terpisah dan meliputi pembuatan pagar pemisah yang disebut pagar keamanan dan penempatan militer dan paramiliter di daerah perbatasan tersebut. Pagar Keamanan (*Security Fences*) yang dibangun Israel adalah suatu pagar pembatas antara wilayah-wilayah di Tepi

¹⁴ Bertus Hendriks, *Pagar: Pertahanan atau Pemisahan Israel-Palestina ?*, dalam Kompas, Senin, 17 Juni 2002.

¹⁵ Kompas, Minggu, 23 Juni 2002

¹⁶ Kompas, Kamis, 20 Juni 2002

Barat yang telah dikuasainya dan memisahkannya dengan wilayah-wilayah Tepi Barat yang masih ditempati oleh orang-orang Palestina.¹⁷

Pagar tersebut akan berbeda-beda bentuknya disesuaikan dengan keadaan geografis. Di satu tempat akan berupa tembok dinding yang tinggi, sedangkan ditempat lain hanya akan berupa pagar kawat saja. Pembangunan pagar disekitar *Green Line*¹⁸ tersebut akan dilengkapi dengan sensor elektrik, parit, perintang, dan pos-pos penjagaan. Bertujuan untuk mencegah masuknya pejuang Palestina ke dalam kawasan Israel untuk melakukan aksi-aksi teror. Dan tentara-tentara Israel akan diletakkan di pos-pos penjagaan di perbatasan tersebut.¹⁹ Pada pertengahan bulan Juni 2002, parlemen Israel menyetujui rencana kabinet Ariel Sharon untuk membangun pagar pemisah di Tepi Barat yang disebut sebagai Pagar Keamanan.

Ariel Sharon setuju untuk membangun pagar diluar batas *Green Line* untuk memudahkan pengawasan terhadap pejuang Palestina dan melindungi warga Israel yang bermukim di kawasan Tepi Barat. Sedangkan para petinggi militer meyakini bahwa pembangunan pagar tersebut haruslah berada tepat diatas *Green Line*. Mereka khawatir terulangnya kasus pembuatan sabuk keamanan di Lebanon bagian selatan yang pada saat pembuatannya (1982), setelah serangan pada markas PLO di Lebanon, sesuai dengan kebutuhan akan keamanan pada saat tersebut dibangun jauh di luar garis perbatasan internasional. Namun ketika terjadi penarikan mundur pasukan Israel dari kawasan Lebanon bagian selatan, pagar kawat listrik tersebut harus dihancurkan dan dibangun kembali pagar serupa diatas garis perbatasan. Dan ini memerlukan biaya yang cukup tinggi.

Semenjak mengumandangkan kemerdekaannya pada 1948, Negara Israel selalu menghadapi masalah keamanan yang didapat dari negara-negara Arab sekelilingnya terutama dari masyarakat Palestina. Tekanan dari negara-negara Arab disekelilingnya merupakan suatu bentuk penolakan mereka terhadap lahirnya negara bagi Yahudi di kawasan Timur Tengah. Selain itu juga merupakan bentuk solidaritas mereka pada bangsa Palestina dan penderitaan yang mereka alami.

¹⁷ *Jurnal of Palestine Studies* XXXII, no. 1 (Autumn 2002) University of California Press, California, 2002, hal. 132

¹⁸ Perbatasan antara wilayah yang dikuasai Israel dengan daerah Tepi Barat yang ditempati oleh bangsa Palestina setelah perang Arab-Israel pada 1967

¹⁹ *Jurnal of Palestine Studies* XXXII, no. 1 (Autumn 2002) University of California Press, California, 2002, hal. 123

Masalah keamanan begitu pentingnya seperti terlihat pada setiap kebijakan Israel yang selalu responsif dan sensitif pada masalah keamanan. Terutama setelah semakin gencarnya serangan bom bunuh diri yang terjadi di wilayahnya oleh warga Palestina dari kawasan Tepi Barat. Pengalaman akan pengusiran dan pembantaian yang dialami oleh Yahudi pada masa lalu seperti kebijakan Anti-Semit oleh NAZI Jerman pada era Adolf Hittler merupakan pengalaman pahit bagi mereka yang tidak ingin terulang kembali. Akan tetapi ancaman kekerasan dan keamanan yang mereka alami seringkali merupakan eksekusi dari kebijakan mereka sendiri. Seperti kebijakan tentang perluasan wilayah untuk menciptakan Israel Raya²⁰ dan pembangunan pemukiman Yahudi yang semakin meluas dan memojokkan warga Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Pada kenyataannya akan semakin memicu rasa ketidakpuasan dan kebencian rakyat Palestina pada Israel yang mereka anggap sebagai penjajah.

Partai Likud yang dipimpin oleh Ariel Sharon yang menjadi Perdana Menteri saat itu (2002) memiliki landasan ideologi konservatif yang lebih keras dibanding dengan partai Buruh yang lebih moderat dalam menghadapi masalah keamanan. Likud merupakan suatu partai besar dengan dua pilar utama yang mendasari setiap kebijakannya yaitu penciptaan keamanan yang kokoh dan penguasaan pada seluruh tanah atas dasar biblikal. Tepi Barat yang mereka sebut Yudea dan Samaria merupakan tanah pemberian Tuhan pada bangsa Israel. Sedangkan secara geografis, daerah tersebut merupakan daerah berbukit yang merupakan daerah strategis bagi militer sehingga tidak mungkin dilepaskan oleh Israel. Likud juga tidak mengakui adanya bangsa Palestina dan menganggap bangsa Palestina tersebut sebagai bangsa Arab sehingga tidak mungkin ada yang disebut sebagai Negara Palestina Merdeka.

Konflik Israel Palestina ini sebenarnya adalah suatu permasalahan yang umum yaitu upaya memerdekakan diri suatu kelompok masyarakat. Ini merupakan gejala umum setelah gencarnya pemahaman akan anti-kolonialisme pasca Perang Dunia II. Namun yang menarik adalah bahwa ada dua kelompok (bangsa) yaitu Yahudi dan Palestina yang merasa berhak atas sebidang tanah yang sama. Dengan alasan historis masing-masing, keduanya merasa paling berhak atas tanah tersebut dan saling bersifat eliminasi terhadap yang lain. Selain permasalahan konflik yang telah berumur puluhan tahun tersebut, yang menarik bagi

²⁰ Suatu tanah air bagi bangsa Yahudi di seluruh dunia yang berbentuk negara Israel yang meliputi seluruh wilayah yang telah dikuasai Israel termasuk Tepi Barat dan Jalur Gaza.

penulis adalah pembangunan pagar itu sendiri, karena kebijakan ini banyak mendapat tentangan dari dalam negeri. Bukan saja ditentang oleh partai Buruh, namun juga dikalangan kaum konservatif sendiri termasuk juga kalangan militer.

Masalah pembangunan pagar keamanan merupakan salah satu bagian kecil dari kebijakan Israel dalam usahanya menciptakan rasa aman bagi warganya. Namun perlu dicermati karena bisa jadi pembangunan pagar ini akan membuka suatu babak baru dalam konflik tersebut. Permasalahan baru akan muncul karena salah satu akibat dari pembangunan tersebut adalah terpisahnya (secara geografis) wilayah yang diduduki Israel dengan yang didiami Palestina. Penulis berusaha mendeskripsikan dan menganalisa alasan-alasan dari Ariel Sharon untuk membuat pagar pemisah yang disebut dengan pagar keamanan tersebut melalui suatu tulisan ilmiah yang berjudul:

Keputusan Israel membangun Pagar Keamanan di daerah Tepi Barat pada tahun 2002.

1.2 Batasan Waktu dan Materi

Ruang lingkup pembahasan yang meluas dapat mengaburkan topik utama kajian. Sehingga diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup pembahasan dalam suatu karya ilmiah, baik batasan waktu maupun materi. Batasan-batasan tersebut akan membantu penulis dalam mempertahankan koridor karya ilmiah sehingga tetap pada fokus yang dikaji.

1.2.1 Batasan Materi

Tulisan ini akan menunjukkan situasi keamanan di Israel terutama semenjak pecahnya intifadah II sampai pertengahan tahun 2002 dan faktor-faktor yang menjadi alasan keputusan untuk membangun pagar keamanan pada tahun 2002 beserta tujuan-tujuan dan hasil yang didapatkan. Penulis juga akan memperhatikan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang memiliki kaitan dengan materi tersebut. selain itu, juga tentang peranan-peranan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok kepentingan seperti PLO dan Hamas, Partai Politik seperti Likud dan Buruh termasuk aktor-aktor seperti Ariel Sharon. Kesemuanya itu dalam rangka memberikan gambaran tentang permasalahan yang terdapat dalam tulisan ilmiah ini.

1.2.2 Batasan Waktu

Seperti batasan materi, batasan waktu akan berkisar pada suatu sekuen antara September 2000 sampai tahun 2002 dengan menitikberatkan pada rentang waktu semester pertama tahun 2002. Dengan tetap memperhatikan masa-masa sebelumnya sebagai suatu sekuen lain yang saling berkaitan. Dan memperlihatkan semester kedua tahun 2002 yang merupakan waktu pelaksanaan pembangunan pagar sehingga akan dapat dilihat perbandingan antara tujuan yang diharapkan (*das sein*) dengan hasil yang diperoleh (*das sollen*) setelah dilaksanakannya keputusan tersebut. Terlepas dari berhasil atau tidaknya pagar tersebut meraih tujuannya, akan ditunjukkan situasi di kawasan tersebut pasca dikeluarkannya keputusan tersebut.

1.3 Permasalahan

Memburuknya situasi keamanan di daerah-daerah yang dikuasai Israel karena adanya sederetan aksi-aksi serangan bom bunuh diri. Baik yang berhasil memakan korban maupun yang berhasil digagalkan, menunjukkan betapa pentingnya permasalahan keamanan yang dihadapi oleh Israel.

Tidak juga membaiknya situasi keamanan Israel dari ancaman serangan warga Palestina, menunjukkan masih jauhnya harapan akan terjadinya perdamaian di kawasan tersebut. Bahkan kerasnya reaksi Israel terhadap Palestina seperti yang ditunjukkan oleh PM Ariel Sharon tidak juga mampu menjamin keamanan dan keselamatan warganya.

Hingga munculnya suatu pemikiran untuk memisahkan wilayah diantara Israel dengan Palestina di Tepi Barat untuk mencegah terjadinya serangan dari Palestina terhadap Israel. Langkah pragmatis ini tentunya memiliki alasan-alasan yang mendasari. Dan tulisan ini berusaha untuk menjelaskan dan menganalisa alasan-alasan tersebut. Karenanya, penulis mengajukan suatu permasalahan dalam tulisan ini, yaitu:

Mengapa Israel mengeluarkan keputusan untuk membangun pagar pemisah antara wilayah yang dikuasai Israel dengan yang didiami oleh bangsa Palestina di Tepi Barat sungai Yordan pada tahun 2002 yang disebut dengan Pagar Keamanan?

1.4 Kerangka Teori

Yang disebut teori adalah suatu bentuk pernyataan yang menjawab dengan pertanyaan "mengapa", artinya berteori berarti upaya untuk memberi makna pada suatu

fenomena yang terjadi. Teori merupakan sekumpulan generalisasi dan karena di dalam generalisasi terdapat konsep-konsep, maka dapat pula diartikan bahwa teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis. Sebagai sarana eksplanasi, teori adalah yang paling efektif.

Secara lebih spesifik, *McCain dan Segal* mendefinisikan teori sebagai berikut:

serangkaian sistem yang saling berkaitan... (yang terdiri dari) : 1. kalimat-kalimat yang memperkenalkan istilah-istilah yang merujuk pada konsep-konsep dasar teori itu; 2. kalimat-kalimat yang menghubungkan konsep-konsep dasar itu satu sama lain; 3. kalimat-kalimat yang menghubungkan beberapa statemen teoritis itu dengan sekumpulan kemungkinan obyek pengamatan empiris (yaitu hipotesa).²¹

Dalam memahami suatu fenomena diperlukan konseptualisasi dan teorisasi sebagai kerangka analisis, maka disamping teorisasi yang tepat, juga diperlukan konseptualisasi tentang suatu fenomena. Dalam rangka memahami suatu fenomena tersebut, perumusan konsep yang digunakan dapat menuntun penulis dalam melakukan generalisasi. Sebagaimana dikatakan oleh *Moktar Mas'ood* bahwa suatu konsep merupakan abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek atau suatu fenomena tertentu... jadi konsep sebenarnya adalah sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan.²²

Berangkat dari pentingnya kerangka teori dan konsep, maka dalam penulisan ini, untuk meneliti dan menganalisa kebijakan yang ditempuh Israel dibawah pimpinan Ariel Sharon dalam menghadapi ancaman keamanan dari serangan bom bunuh diri Palestina, penulis menggunakan teori *decision making* dan konsep keamanan nasional (*national security*) yang inheren dalam konsep kepentingan nasional (*national interest*). Konsep kepentingan nasional ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan, maupun menganjurkan perilaku internasional. Dan apakah keputusan tersebut merupakan suatu keputusan yang memiliki efek negatif yang lebih kecil dibandingkan dengan alternatif-alternatif keputusan yang lain.

Menurut *Theodore A. Columbus* dan *James H. Wolfe*, kepentingan nasional yang merupakan tujuan utama negara, merupakan kelangsungan hidup. Untuk itu, suatu negara

²¹ Garvin McCain dan Erwin Segal, *The Game of Science* (Brooks/Cole, 1973) hal 99, dalam Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal 219

²² *Ibid.*, hal 109.

harus menciptakan suatu kondisi yang dapat menjamin integritas teritorial, identitas politik, dan budayanya.²³

Sedangkan konsep keamanan nasional suatu negara menurut *John E. Mroz* adalah suatu kebebasan yang relatif (*relative freedom*) dari ancaman.²⁴ Disamping faktor-faktor domestik, keamanan nasional suatu negara juga penilaian negara yang bersangkutan terhadap ancaman dari luar (*external threats*) terhadap stabilitas politik, integral teritorial, dan nilai-nilai tertentu yang dimiliki oleh suatu negara.

Negara adalah sebuah entitas politik terorganisasi yang mampu mengambil keputusan untuk melakukan suatu tindakan. Tindakan-tindakan tersebut seperti, mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan lingkungan internasional maupun domestik, memobilisasi sumber-sumber daya untuk menjalankan keputusan yang telah diambil, dan aplikasi instrumen dan teknik untuk mendukung keputusan.

Menurut *Hans Joachim Morgenthau*, syarat minimum suatu negara adalah kemampuan melindungi identitas fisik, politik, dan kulturalnya dari gangguan negara lain.²⁵ Jika definisi tersebut diterjemahkan dalam suatu tujuan yang lebih spesifik, maka membela atau melindungi identitas fisik sama dengan memelihara integritas wilayah suatu negara dan menjamin keamanan penduduk yang ada di dalamnya. Melindungi identitas politik sama dengan melindungi eksistensi rezim politik, dan melindungi identitas kultural sama dengan melindungi etnis, agama, bangsa, dan sejarah.

Morgenthau juga menyebutkan bahwa kepentingan nasional adalah hasil kompromi dari kepentingan-kepentingan politik yang saling bertentangan, bukan merupakan suatu ideal yang abstrak dan saintifik.²⁶ Namun merupakan hasil dari persaingan politik internal yang berlangsung terus-menerus. Dan pada akhirnya, adalah pemerintahlah yang paling bertanggung jawab dalam mendefinisikan dan menerapkan kebijakan-kebijakan untuk mencapai kepentingan nasional.

²³ Theodore A. Columbus dan James H. Wolfe, *Introduction to International Relations: Power and Justice*, Englewood Cliffs, New Jersey, hal 74-75.

²⁴ John E. Mroz, *Beyond Security: Private Perception Among Arab and Israel*, Pergamon Press, New York, 1980, hal 53.

²⁵ Mas'ood, *Op. Cit.*, hal 163.

²⁶ *Ibid.*, hal 164.

Makna yang inheren dalam konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Morgenthau adalah menjaga kelangsungan hidup. Dengan demikian konsep kepentingan nasional sebagai alat tindakan politik dapat menjadi dasar pembenaran suatu tindakan, memperjelas atau mengajukan alternatif kebijakan yang ditempuh. Konsep kepentingan nasional juga dapat digunakan untuk menguraikan, memperjelas atau menentukan yang diperlukan dalam pelaksanaan politik luar negeri suatu negara.

Sedangkan menurut *Joseph Frankel* konsep kepentingan nasional diklasifikasi tiga bagian, yaitu aspirasional, operasional, dan eksplanatori.²⁷ Pada tingkat aspirasional, kepentingan nasional memiliki tujuh sifat. Yaitu; kepentingan nasional itu berjangka panjang; berakar dalam sejarah dan ideologi; merupakan sumber kritik oleh oposisi; memberi *sense of purpose* (kesadaran akan tujuan); tidak perlu diartikulasikan dan dikoordinasi secara penuh dan bisa saling bertentangan; tidak perlu studi kelayakan; lebih ditentukan kehendak politik dibanding oleh kemampuan nyata.

Pada tingkat operasional, menunjukkan pada keseluruhan kebijakan-kebijakan yang yang betul-betul dilaksanakan. Hubungan tingkat aspirasional dengan operasional dipengaruhi oleh sifat *net-achievement capability*, yaitu hubungan antara tujuan yang hendak dicapai, kemampuan pencapaian tujuan, dan kendala yang dihadapi. Yang dapat menentukan apa yang benar-benar dapat dicapai. Sedangkan tingkat eksplanatori akan memberi penjelasan dari tingkat operasional. Termasuk mengevaluasi, merasionalisasi, dan mengkritik kebijakan atau politik luar negeri tersebut.

Secara umum konsep kepentingan yang meliputi kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, dan kesejahteraan ekonomi akan mendominasi dalam proses pembuatan keputusan. Dengan demikian kepentingan nasional negara tidak dapat dipisahkan dalam proses pembuatan keputusan pada tingkat negara.

Meskipun demikian, pokok kajian analisa adalah *decision maker* (pembuat keputusan). Pembuat keputusan adalah sekelompok orang yang secara sah dapat bertindak dan mengambil keputusan atas nama negara atau mewakili negara. Dengan dasar motivasi yang rasional dan motivasi yang dilandasi oleh latar belakang personal atau kelompok pembuat keputusan. Bagaimana pembuat keputusan tersebut mampu mendefinisikan situasi

²⁷ *Ibid.*, hal 173

yang ada dengan kandungan nilai-nilai dan *political behaviour* yang dimilikinya yang dapat menjadi *state behaviour*. Kebijakan dibuat berdasarkan persepsi pembuat keputusan dan bukan dari persepsi masyarakat. Dengan demikian, dalam tulisan ini, yang menjadi kajian analisa pembuat keputusan adalah rasionalitas dan motivasi Ariel Sharon sebagai Perdana Menteri Israel.

Richard C. Snyder, mengasumsikan semua keputusan adalah rasional dengan mempertimbangkan *cost and benefit, pain and gain, dan utility and probability*. Untuk memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai. Meskipun tujuan tersebut tidak selalu dapat dicapai secara maksimal. Snyder mendefinisikan *decision making* sebagai berikut:

Sebuah proses yang menyangkut pemilihan dari sejumlah masalah yang terbentuk secara sosial, pemilihan sasaran-sasaran alternatif yang diterangkan dalam urusan negara yang dipikirkan oleh pembuat keputusan.²⁸

Dalam teori *Decision Making Process*, Snyder memulai penyelidikan dengan menganalisa beberapa faktor yang relevan. Diantaranya; pertama, semua tindakan politik yang dilakukan oleh manusia secara konkret. Kedua, apabila seorang peneliti ingin memahami dinamika-dinamika dari tindakan ini, peneliti harus siap untuk memandang dunia dari perspektif dari pembuat keputusan.²⁹

Dalam usaha memahami suatu tindakan dengan tepat, peneliti harus mengetahui dua faktor utama yang berperan. Pertama siapa yang membuat keputusan penting yang menyebabkan timbulnya tindakan tertentu. Kedua, menilai proses-proses intelektual dan interaktif yang ditempuh oleh para pembuat keputusan dalam mencapai suatu keputusan. Dari dua faktor tersebut, kemudian Snyder menjelaskan bahwa ada tiga kelompok elemen utama yang berpengaruh di dalamnya, yaitu:³⁰

1. Keadaan internal, adalah masyarakat kepada siapa para pejabat membuat keputusan.
2. Keadaan eksternal, terdiri dari aksi dan reaksi (yang berarti para pembuat keputusan di masing-masing negara tersebut) dan masyarakat untuk siapa mereka bertindak.
3. Adanya proses pembuatan keputusan yang timbul dalam organisasi pemerintahan dan di tempat-tempat proses tersebut merupakan suatu bagian.

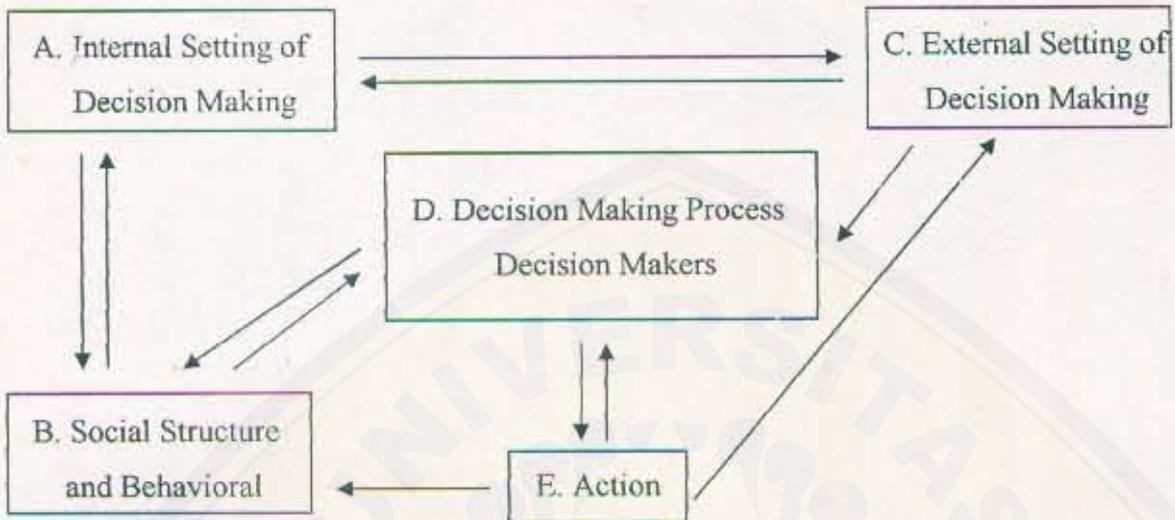
²⁸ Richard C. Snyder, *Foreign Policy Making: An Approach to Study International Politics*. New York, The Free Press, 1962.

²⁹ Richard C. Snyder, dalam S. P. Varma, *Toeri Politik Modern*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hal 191

³⁰ *Ibid*, hal 392

Snyder menjelaskan teori tersebut secara lebih spesifik dalam bentuk skema analisa, yaitu:³¹

Gambar 1



Skema diatas berangkat dari asumsi-asumsi yang dapat dijelaskan oleh Snyder sebagai berikut:³²

1. Analisa pada level negara merupakan cara yang paling efektif untuk memperoleh perspektif tentang politik internasional serta tingkah laku suatu negara.
2. Negara merupakan unit yang menentukan dalam tindakan politik, strategi tindakan politik serta sumber-sumber komitmen diputuskan pada tingkat nasional.
3. Istilah "negara sebagai aktor dalam situasi" merupakan model dasar sebagai cara yang singkat untuk symbol-simbol yang masih melekat pada dugaan terhadap negara sebagai suatu kumpulan.
4. Tindakan negara merupakan tindakan yang dilakukan atas nama negara.
5. Setiap negara berbeda-beda dalam tindakan politik, tergantung pada cara mereka dalam mendefinisikan situasi yang menyebabkannya.
6. Adanya faktor-faktor lain yang berperan dalam politik internasional selain faktor hubungan antar negara pada tingkat pemerintahan.

³¹ Richard C. Snyder, dalam James N. Rosenau, ed, *International Politics and Foreign Policy*, Free Press, New York, 1969, hal. 199

³² *Ibid*, hal. 201

7. Faktor dalam negeri suatu negara berpengaruh terhadap proses pembuatan keputusan.
8. Proses pembuatan keputusan bukan hanya dipengaruhi faktor dalam negeri tapi juga faktor dari luar negeri. Dan keduanya saling berkaitan.

Penelahan proses decision making adalah untuk mengetahui apa dan bagaimana proses pengambilan keputusan mempengaruhi keputusan yang dihasilkan. Dan apakah proses pembuatan keputusan yang berbeda akan membuahkan hasil keputusan yang berbeda pula. Teori pembuatan keputusan yang diajukan oleh *Dougherty* dan *Pfalzgraf* mencakup studi bagaimana suatu keputusan diduga benar-benar dibuat oleh para pembuat keputusan dan para eksekutif negara untuk mencapai tujuan yang digariskan. Dengan demikian esensi dari setiap pembuatan keputusan adalah pemilihan diantara berbagai kemungkinan alternatif yang ada untuk kesinambungan hidup suatu bangsa.³³

Karena pengambilan keputusan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan, maka penulis perlu memperjelas definisi kebijakan tersebut. *Thomas Dye* memberikan batasan kebijakan sebagai berikut “ ... apa saja yang hendak dilaksanakan oleh pemerintah.”³⁴ Sedangkan *Richard Hoggenberg* mendefinisikan kebijakan sebagai berikut “... produk yang kelihatan dari keputusan-keputusan yang diambil dari oleh tokoh-tokoh yang mendekati diri dengan cita-cita masyarakat.”³⁵ Sedangkan *James Anderson* mengemukakan definisi yang lebih jelas, yaitu: “suatu pola tingkah laku yang terarah pada tujuan dan diikuti oleh seorang atau beberapa orang dalam menangani suatu masalah.”³⁶

Graham T. Allison mengajukan tiga model untuk mendeskripsikan pembuatan keputusan politik luar negeri.³⁷

Model I: Aktor Rasional. Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk melakukan suatu tujuan. Pembuatan keputusan luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan sebagai

³³ *Jurnal Ilmu Politik 9, Op. Cit.*, hal 17

³⁴ *Thomas Dye R., Understanding Public Policy*, edisi III, Engle Wood Cliffs, New Jersey, 1978

³⁵ *Richard Hoggenberg, The Study of Public Policy*, Indianapolis, 1979

³⁶ *James Anderson, Public Policy Making*, Holt, Rinehart dan Winston, New York, 1979

³⁷ *Graham T. Allison, Essence of Decision: Coseptual Model's and the Cuban Misile Crisis*, *American PoliticalScience Review*, 1969; dan *Allison dan Molton Happerin, Bureaucratic Politics: A Paradigm and Some Policy Implication*, *World Politic*, 1972; dalam Mas' oed, *Op. Cit.*, hal 275.

perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Analisa politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa. Dalam model ini para pembuat keputusan dianggap rasional dan kita umumnya cenderung berpikir bahwa keputusan luar negeri dibuat secara rasional.

Model II: Proses Organisasi. Model ini menggambarkan politik luar negeri sebagai hasil kerja suatu organisasi besar yang berfungsi menurut suatu pola perilaku. Pembuatan keputusan bukan semata-mata proses intelektual, namun lebih cenderung sebagai suatu proses mekanis atau disebut sebagai *Standart Operated Procedures* (SOP). Pembuatan keputusan dilakukan secara mekanik merujuk pada keputusan-keputusan yang telah dibuat di masa yang lalu, prosedur rutin yang berlaku, atau pada peran yang ditetapkan bagi unit birokrasi itu. Pemerintah dapat mempengaruhi keputusan proses ini namun tidak dapat mengontrol sepenuhnya.

Model III: Politik Birokrasi. Politik luar negeri dipandang bukan sebagai hasil dari proses intelektual yang menghubungkan tujuan dan sarana secara rasional. Politik luar negeri merupakan hasil dari proses interaksi, penyesuaian diri dan perpolitikan diantara berbagai aktor dan organisasi. Hal ini melibatkan berbagai permainan tawar-menawar (*bargaining games*) diantara pemain-pemain dalam birokrasi dan arena politik nasional. Dengan kata lain, pembuatan keputusan politik luar negeri adalah proses sosial. Atau dapat juga disebut proses politik.

Dalam permasalahan Kebijakan Israel ini, kebijakan yang diambil dianggap sebagai suatu kebijakan yang rasional karena dibuat oleh pembuat keputusan yang rasional. Sharon sebagai decision maker adalah aktor rasional yang dianggap menggunakan pertimbangan intelektualitas dan rasionalitasnya dalam memandang suatu permasalahan, sehingga tulisan ini menggunakan Teori Pembuatan Keputusan model I.

Keterlibatan aktor-aktor politik seperti partai politik sebagai unit analisa utama dalam proses pembuatan keputusan harus ditinjau dari perspektif tingkat analisa. Dengan demikian dalam menentukan latar belakang suatu keputusan, analisa harus menggunakan tingkat analisa yang relevan.

Untuk mendapatkan analisa yang tepat, penulis menggunakan analisa tingkat kelompok. Dalam hal ini tindakan seorang pengambil keputusan yang terafiliasi ke dalam

suatu kelompok (partai politik) adalah identik dengan tindakan kelompok. Individu akan mengidentifikasi diri dengan kelompok, memberikan loyalitas kepada kelompok tersebut dan bertindak untuk menjaga sifat, ciri, dan kelangsungan kelompok itu.

Pelaku aksi-aksi bom bunuh diri ini diorganisasikan oleh kelompok-kelompok kepentingan di kawasan Timur Tengah. Kelompok kepentingan menurut *Gabriel Almond* didefinisikan sebagai suatu organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa, dalam waktu yang sama, berkehendak memperoleh jabatan publik. Kelompok ini muncul sebagai akibat dari adanya kekecewaan sekelompok orang terhadap kebijakan yang dibuat oleh kelompok lain yang berkuasa. Ketidakpuasan tersebut menimbulkan tuntutan untuk merubah suatu tatanan formal secara terorganisir dengan perencanaan yang baik akan mengartikulasikan kepentingan dengan caranya sendiri guna mendapatkan kompromi dengan kekuasaan.

Kelompok-kelompok kepentingan yang ada di Timur Tengah terutama yang anti-Israel seringkali menggunakan cara-cara teror seperti aksi bom bunuh diri dalam menyampaikan aspirasinya. Sehingga seringkali disebut sebagai kelompok teroris internasional. Timbulnya teroris internasional ini dilatarbelakangi oleh rasa frustrasi atas keberpihakan Amerika Serikat (AS) sesuai dengan kepentingan nasionalnya terhadap Israel dalam konflik melawan Palestina. Contohnya, kelompok kepentingan Palestine Liberation Organization (PLO) ataupun HAMAS, lebih didasarkan pada tuntutannya untuk mengenyahkan Israel dan mengembalikan tanah milik bangsa Palestina secara keseluruhan.³⁸ Meskipun dalam cara-cara penyampaiannya tidak sama.

Dalam pandangan kelompok teroris, organisasi internasional seperti PBB terlalu didominasi oleh negara-negara Barat, sehingga memiliki keberpihakan yang sangat kuat pada Barat (dalam hal ini Israel)³⁹. Kenyataan tersebut melahirkan rasa frustrasi dan hilangnya kepercayaan terhadap efektifitas lembaga tersebut. Aksi teror kemudian dipilih sebagai alternatif terakhir setelah segala kegiatan diplomasi dalam upaya pemecahan masalah Israel-Palestina dianggap telah gagal.

³⁸ Suara Hidayattulah, no 09/xv/jan 02, *Mereka (Teroris Israel) harus berhati-hati*, hal 20.

³⁹ Sukawarsini Djelantik, *Teroris Internasional: Aktor bukan Negara dalam Hubungan Internasional*, dalam Andre H. Pareira, ed, *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 174

Kelompok-kelompok seperti demikian meskipun melakukan tindakan terorisme, namun tidak bersedia untuk disebut teroris. Karena memiliki tujuan politik yang jelas dan dapat digunakan sebagai alasan penbenaran dari aksi mereka, mereka biasa menyebut diri sebagai “pejuang kemerdekaan” (*Freedom Fighter*).

Tindakan terorisme sendiri dibedakan menjadi *state terrorism* dan *non-state terrorism*.⁴⁰ Teroris negara adalah suatu bentuk teror yang terkoordinasi, terorganisasi, dan didanai secara nasional, dengan tokoh utama adalah pemimpin negara. Sedangkan terorisme bukan negara adalah suatu kelompok yang berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan pemerintah negaranya, bahkan kerap kali berlawanan. Namun demikian, terorisme sendiri belum memiliki definisi yang disepakati dalam Hukum Internasional.

1.5 Hipotesa

Suatu keharusan dalam suatu karya ilmiah adalah adanya suatu hipotesa sebagai jawaban sementara dari permasalahan yang ada. *W. J. S. Poerwodarminto* berpendapat bahwa hipotesa adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau untuk mengutarakan pendapat, meski kebenarannya belum dibuktikan.⁴¹

Sementara itu *Sutrisno Hadi* memberikan definisi hipotesis yang lebih jelas, yaitu:

Hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar atau mungkin salah atau mungkin dapat dipegang sebagai kesimpulan yang bersifat sementara, penolakan atau penerimaan hipotesis sangat bergantung pada hasil penyelidikan terhadap faktor-faktor yang dikumpulkan.⁴²

Hipotesa dilakukan sebagai usaha untuk menentukan alternatif yang mendekati kebenaran dari berbagai dugaan yang ada. Dan kebenaran dari hipotesa memerlukan pembuktian lagi.

Terpilihnya Ariel Sharon dari partai Likud sebagai Perdana Menteri Israel pada Pemilu tahun 2001 mencemaskan banyak pihak yang mengharapkan perdamaian di Timur Tengah. Meskipun berkoalisi dengan Partai Buruh, Likud dikenal sebagai partai konservatif yang bersifat konfrontatif terhadap Palestina.

⁴⁰ Sukawarsini Djelantik, *Op. Cit.*, hal. 181

⁴¹ W. J. S. Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal 76.

⁴² Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1980, hal 63.

Salah satu kunci kemenangan suatu partai dalam pemilu di Israel adalah kemampuannya dalam memberikan rasa aman di dalam negeri dan menjaga prestise bangsa Yahudi di mata internasional.⁴³ Sehingga apabila masyarakat Yahudi merasa suatu partai yang berkuasa tidak dapat melindungi dan menjaga harga diri bangsanya, mereka akan cenderung untuk beralih pada oposisi pada saat pemilu selanjutnya. Sehingga

Ariel Sharon, menurut *Joseph Alpher*, seorang mantan direktur *Jaffe Center for Strategic Studies* (sebuah lembaga penelitian strategis di Israel) sebagai sosok yang pragmatis dan nasionalis.⁴⁴ Sharon berpihak pada pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah Palestina. Keamanan warga Israel baik di wilayahnya maupun di Tepi Barat dan Jalur Gaza akan diprioritaskan.

Reputasi Sharon dalam menjaga keamanan penduduk Israel dan keutuhan (bahkan perluasan) wilayah Israel cukup dikenal. Mulai dari 1948, ikut membantai sekitar 360 warga Palestina di desa Deir Yasin. Pada 1953, di Qibya Yordania, terjadi pembantaian oleh "unit 101" yang dipimpinnya terhadap 166 warga Palestina. Pada Juni 1982, ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan, ia memimpin invasi ke kamp pengungsi di Sabara dan Shatila, Lebanon bagian Selatan. Dan pada 28 September 2000, memimpin pendudukan di masjid Al Aqsa yang memicu ledakan intifadah II.⁴⁵ Semua tindakannya tersebut didasari oleh alasan untuk menjaga keamanan Israel dan cita-cita terciptanya Israel Raya di Palestina.

Untuk mengkaji permasalahan pembangunan pagar keamanan tersebut, penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut:

Kebijakan Israel untuk membangun Pagar Keamanan di Tepi Barat mempunyai beberapa alasan. Pertama, menjaga integritas wilayah dan bangsa serta menjamin keamanan nasional bagi penduduknya dari ancaman serangan bom bunuh diri militan Palestina di wilayah Israel. Kedua, tuntutan akan perlindungan keamanan dan prestise bangsa Yahudi adalah salah satu faktor penentu kemenangan suatu partai politik di Israel. Sehingga setiap penguasa akan berusaha memenuhi tuntutan tersebut dengan cara-cara tertentu untuk menjaga kelangsungan rezimnya. Ketiga, merupakan suatu alternatif kebijakan, berdasarkan pengalaman tentang hal serupa (penjagaan ketat yang disertai pengawasan melalui alat-alat detektor dan sensor) yang diberlakukan di Jalur Gaza yang mampu mengurangi gerakan perlawanan warga Palestina di Jalur Gaza terhadap Israel. Bertujuan untuk mangawasi dan mencegah terjadinya infiltrasi militan Palestina ke dalam

⁴³ Riza Sihbudi, dkk, *Profil Negara-Negara Timur Tengah*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995

⁴⁴ Tempo, 17 November 2002, *Tiga Bulan Mengadu Untung*, hal 135

⁴⁵ Jawa Pos, 4 Februari 2001

wilayah Israel sehingga tercipta situasi keamanan dan eksistensi Israel yang terkendali.

1.6 Metode Penelitian

Dalam suatu penyusunan karya ilmiah, diperlukan adanya penelitian. Tujuan dari penelitian adalah untuk menjelaskan suatu fenomena. Untuk memahami suatu fenomena, seorang peneliti juga harus dapat mencari hubungan suatu fenomena dengan fenomena yang lain. Untuk itu diperlukan data-data yang selanjutnya akan dianalisis.

Agar suatu penelitian mendapatkan hasil yang optimal diperlukan metode penelitian dan pendekatan yang tepat. Seperti yang dikatakan oleh *The Liang Gie*:

Cara atau langkah yang berulang kembali sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala. Pada ujung awalnya merupakan cara atau langkah untuk mengumpulkan data-data, sedang pada ujung akhirnya merupakan suatu cara atau langkah untuk memeriksa kebenaran dari pada pernyataan yang dibuat dari gejala tersebut.⁴⁶

1.6.1 Tahap Pengumpulan Data

Untuk menyelesaikan karya tulis ini, penulis melakukan penelitian secara tidak langsung. Data hasil pengamatan terhadap obyek yang diteliti didapat dari jurnal-jurnal, buku-buku terbitan, artikel, pemberitaan dari media massa, dan internet.

Dengan demikian, penulis menggunakan metode penelitian Pustaka (*Library Research*) dan studi literatur. Dan data yang didapat dan digunakan dalam karya ilmiah ini merupakan data sekunder. Penulis melakukan penelitian di:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Ruang Baca FISIP, Universitas Jember

1.6.2 Metode Analisa Data

Setelah data-data yang diperlukantelah terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data. Penulis menggunakan metode analisa kualitatif yaitu segenap nilai-nilai dari suatu variabel yang tidak dapat diuraikan dengan angka-angka namun dengan kategori.

⁴⁶ The Liang Gie, *Ilmu Politik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1979, hal 73.

Dan menggunakan metode berpikir reflektif, yaitu mengkombinasikan antara metode berpikir deduktif dengan induktif. Menurut *Marzuki*, metode berpikir reflektif adalah:

Mulai dengan induktif untuk menunjukkan persoalan atau menetapkan hipotesa kemudian diikuti dengan deduktif guna meletakkan atau jalan untuk pembuktian hipotesa yang dibuatnya itu. Selanjutnya hipotesa perlu diuji kebenarannya dengan induksi sehingga diperoleh pemecahan yang konklusif.⁴⁷

Metode induktif adalah cara berpikir yang diawali dari hal-hal yang khusus untuk kemudian dirumuskan dalam suatu rumusan umum. Penulis menggunakan metode ini untuk menetapkan garis besar permasalahan dan hipotesa untuk memudahkan dalam menganalisa fenomena tersebut.

Sedangkan metode deduktif berangkat dari hal-hal yang umum terlebih dahulu dan kemudian menuju hal-hal yang khusus. Garis besar permasalahan dan hipotesa yang diajukan oleh penulis adalah hal umum yang selanjutnya akan penulis jabarkan ke hal-hal yang khusus untuk dapat lebih memahami fenomena yang ada.

Setelah penjabaran tersebut terbukti kebenarannya, maka penulis kembali menggunakan cara berpikir induktif. Metode ini kembali digunakan untuk menentukan kesimpulan atas pengamatan pada fenomena.

Dalam rangka mendapatkan hipotesa yang memadai, penulis memperhatikan beberapa hal yang berupa peristiwa-peristiwa yang meliputi seluruh proses pergerakan perjuangan bangsa Palestina dan upaya-upaya dari Israel dalam mendapatkan keamanan. Penekanan pada bagaimana upaya-upaya Israel dibawah pimpinan P.M. Ariel Sharon untuk tetap menjaga stabilitas keamanan di daerah-daerah yang telah diraihnya atau dimana terdapat pemukiman Yahudi terutama atas ancaman serangan bom bunuh diri warga Palestina dari daerah Tepi Barat.

1.7 Metode pendekatan

Dalam upaya untuk mempertajam analisa, diperlukan suatu pendekatan yang dapat membuat penelitian menjadi lebih spesifik. Pendekatan akan semakin jelas dari sudut mana kita menganalisa suatu permasalahan. Pendekatan menurut The Liang Gie adalah:

⁴⁷ Marzuki, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Gajah Mada, Yogyakarta, 1980, hal 21.

Keseluruhan rangkaian sikap penyelidikan, sudut pandangan, ukuran pangkal duga, dan kerangka dasar dari suatu ilmu. Jadi pendekatan merupakan keseluruhan unsure yang dipakai untuk mendekati suatu sasaran, memasuki suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mengenai sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut.⁴⁸

Pendekatan adalah keseluruhan unsur yang dipakai untuk mendekati suatu sasaran bidang ilmu pengetahuan secara teratur dan sistematis. Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan sejarah-politik (*political-historis approach*) dan pendekatan personalitas (*personality approach*).

Pendekatan sejarah-politik merupakan suatu pendekatan yang melihat atau memahami gejala-gejala politik yang muncul dengan berdasarkan proses sejarahnya. Pemahaman akan suatu fenomena akan lebih mudah apabila diketahui latar belakang maupun kejadian-kejadian yang mendahului timbulnya fenomena tersebut. Sejarah-politik, menurut Gie merupakan hamparan sejarah dengan menggunakan pengetahuan tentang masa lampau apabila menafsirkan pertumbuhan gejala-gejala politik pada masa kini maupun masa depan yang mungkin terjadi.⁴⁹

Politik dan sejarah memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya saling mempengaruhi dan melengkapi untuk perkembangan keduanya. Bahkan dapat dikatakan bahwa sejarah adalah gambaran politik pada masa lalu, sedangkan politik adalah proses pembentukan sejarah pada masa kini. Segala peristiwa politik dipengaruhi proyeksi- proyeksi sejarah baik dalam hubungan dengan sejarah masa kini menuju masa depan yang tidak terlepas dari situasi masa lalu seiring dengan perjalanan waktu. Konflik Israel-Palestina dalam perjalanannya, tidak dapat dipisahkan dari telaah-telaah atas sejarah Israel maupun Palestina. Baik pada masa lalu, kini, maupun pada masa mendatang.

Selanjutnya, penulis juga menggunakan pendekatan personalitas dalam upaya untuk memahami peran dan motivasi dari pihak-pihak yang terlibat terutama kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Ariel Sharon sebagai Perdana Menteri Israel pada masa ini. Sehingga dengan demikian dapat diketahui secara lebih mendalam munculnya kebijakan tentang Pagar Keamanan ditengah konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina.

⁴⁸ Gie, *Op. Cit.*, Hal 49

⁴⁹ *Ibid.*, hal 87

GAMBARAN UMUM ISRAEL DAN
SEJARAH PERLAWANAN PALESTINA



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

2.1 Gambaran Umum Israel

2.1.1 Latar Belakang Sejarah

Israel adalah sebuah negara kecil di pinggiran timur Laut Tengah. Dan dikelilingi oleh negara-negara Arab. Sebelah utara berbatasan dengan Lebanon, di sebelah timur dengan Yordania dan Suriah, sedangkan di barat daya ada Mesir. Israel memiliki luas sekitar setengah luas negara Belanda.¹

Negara Israel resmi berdiri sejak proklamasi kemerdekaan pada 14 Mei 1948. Dengan kemerdekaan ini, cita-cita orang Yahudi yang tersebar di seluruh belahan dunia untuk mendirikan negara sendiri tercapai. Berdirinya negara ini sesuai dengan amanat dari *Theodor Herzl* dalam tulisannya *Der Judenstaat* (Negara Yahudi) pada 1896.

Israel adalah sebuah negara Yahudi yang dikelilingi oleh oleh negara mayoritas Islam. Orang Israel yang bergaya hidup budaya Barat hidup di tengah-tengah kebudayaan Timur. Mereka mayoritas adalah masyarakat imigran atau keturunan imigran sedangkan tetangga-tetangganya adalah penghuni turun-temurun yang telah mendiami desa atau kampung selama ribuan tahun. Masyarakat Israel telah menjalankan sistem politik modern seperti membentuk partai politik, kelompok-kelompok buruh, profesi, dan birokrasi pemerintahan. Sementara negara-negara di sekelilingnya banyak yang masih hidup dalam komunitas seperti kerajaan, keluarga, klan, suku, dan lain-lain.

Perbedaan ini terutama disebabkan karena sebagian dari penduduk Israel adalah para imigran yang berasal dari negara-negara maju seperti Eropa dan AS yang telah menerapkan sistem organisasi modern. Sedangkan penduduk dari negara-negara Arab terbiasa dengan sistem monarki dan belum mengenal organisasi modern.

Berdirinya Negara Israel tidak dapat terlepas dari usaha Zionisme. *Theodor Herzl* (1860-1904) adalah penyusun doktrin zionisme sejak 1882, di Wina. Dan kemudian dikongreskannya secara sistematis. Pada 1897, diadakan Kongres Yahudi se-Dunia di Basel yang diantaranya memutuskan untuk membentuk suatu negara Yahudi di Palestina. Sejak

¹ Riza Sihbudi dkk, *Profil Negara-negara Timur Tengah*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hal. 102

itulah, zionisme menjadi gerakan politik. Buku yang ditulis Herzl, *Der Judenstaat* (Negara Yahudi), mengatakan sebagai berikut:²

Karakter bangsa kami dalam sejarah sangat terkenal, dan meskipun ada penurunan, penurunan itu terlalu halus untuk menginginkannya. Nasionalis Yahudi sangat jelas, tidak mau, dan tidak juga boleh dihancurkan. Masalah Yahudi... merupakan masalah nasional yang dapat dipecahkan dengan membuatnya menjadi masalah politik dunia yang harus diperbincangkan dan diselesaikan oleh bangsa-bangsa dunia yang beradab dalam permusyawaratan.

Nasionalisme yang kuat sejak masa lampau disertai dengan pengalaman buruk sejarah bangsa Yahudi yang beberapa kali diusir bahkan dianiaya dan dibantai telah memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran politiknya. Herzl menolak penyelesaian masalah Yahudi dengan jalan asimilasi dengan alasan karena seluruh bangsa di dunia ini memusuhi Yahudi. Dan solusi terbaik adalah mengumpulkan seluruh orang Yahudi di seluruh dunia dalam suatu nasyon tunggal bangsa Yahudi. Mungkin juga pengalaman sejarah itu menjadikan Yahudi sebagai suatu bangsa yang proteksionis dan egois dengan nasionalisme yang tinggi, yang selalu khawatir akan keselamatan dan eksistensinya. Yang selalu ingin berhasil mendapatkan yang diinginkannya.

Usaha Yahudi untuk memiliki suatu negara sendiri telah dimulai pada saat keluarnya *Manifestasi Biru*.³ Dikeluarkan oleh sekelompok pemuda Yahudi yang berasal dari Kharkov, Rusia, pada 1882 di Konstantinopel. Akibat adanya penindasan terhadap orang-orang Yahudi pada 1881 yang terjadi di Rusia. Mereka meminta suatu daerah yang berotonomi lokal di wilayah Turki. Sedangkan urusan luar negeri diserahkan pada Turki. Dilanjutkan dengan Deklarasi Balfour yang menjanjikan suatu tanah air bagi Yahudi. Dengan tokoh utama Herzl, Yahudi menentukan Palestina sebagai tanah pilihannya untuk mendirikan negara untuk Yahudi. Dengan bentuk negara yang normal seperti layaknya negara-negara lain yang telah ada.

Pada 1904 Herzl meninggal dunia. Tetapi zionisme terus menarik pengikut yang lebih banyak lagi. Organisasi Zionis Dunia yang pernah dipimpinnya menjadi suatu gerakan

² George Lenczowski, *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*, Sinar Baru Algasindo, Bandung, 1993, hal. 234

³ A. Rahman Zainuddin, *Benturan Pemikiran di Timur Tengah dan Implikasinya Terhadap Tata Dunia Mendatang*, dalam *Jurnal Ilmu Politik* 12, LIPI, Gramedia, Jakarta,

yang kuat dengan dibiayai oleh Dana Nasional Yahudi (*Keren Kayemeth*) yang diorganisasi untuk mendapatkan tanah di Palestina, dan oleh Dana Yayasan Palestina (*Keren Hayesod*).

Zionisme, pada awalnya digunakan untuk menyebut sekelompok orang penganut Yudaisme. Mereka adalah penganut Yudaisme yang menantikan datangnya Sang Juru Selamat di akhir zaman. Maka pada masa itu, “seluruh keluarga di dunia” akan dipanggil menuju Kerajaan Tuhan. Kerajaan ini dipusatkan di tempat terjadinya kisah-kisah yang dialami oleh *Nabi Abraham* dan *Musa*.⁴

Zionisme keagamaan ini hanya menginginkan terciptanya sebuah pusat kegiatan spiritual yang memungkinkan tersebarnya agama dan kebudayaan Yahudi ke seluruh dunia. Mereka tidak menginginkan adanya suatu negara tersendiri. Oleh karena itu, kehadiran mereka tidak meresahkan. Bahkan mereka mampu bergaul dengan penduduk lain yang beragama Islam ataupun Kristen secara damai. Pada masa ini, zionisme tidak lebih dari sekedar kelompok religi yang mencoba menjalankan perintah agamanya.

Zionisme agama inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok orang, termasuk Herzl, untuk mendirikan suatu tempat untuk seluruh keluarga Yahudi dalam bentuk negara. Padahal menurut *Roger Garaudy*, seorang peneliti tentang Timur Tengah dan Agama, Herzl adalah orang yang ingkar agama.⁵ Ia menentang segala bentuk rumusan yang menyatakan Yudaisme adalah sebuah agama. Dengan mempolitisir zionisme, maka orang Yahudi di seluruh dunia ikut tergerak dan berbondong-bondong ke Palestina. Dan berdirilah sebuah negara Yahudi.

Para penentang gerakan Zionisme ini mempunyai beberapa alasan yang berbeda. Namun pada dasarnya mereka tidak setuju karena Zionisme yang dikemukakan Herzl adalah suatu gerakan politik sekular yang terlepas sama sekali dari gerakan agama yang seharusnya menjadi alasan utama zionisme. Zionisme Herzl juga dianggap melanggar hak-hak penduduk Palestina yang telah terlebih dahulu ada di tanah tersebut.

Para Rabbi (pendeta Yudaisme) Amerika Serikat, menentang pendapat Herzl tentang pendirian negara Yahudi. Protes juga disuarakan oleh para ilmuwan Yahudi seperti; *Albert Einstein*, *Martin Buber*, dan *Profesor Judah L. Magnes* (seorang Guru Besar

⁴ Roger Garaudy, *Zionisme: Sebuah Gerakan Agama dan Politik*, terjemahan, Gema Insani Pres, Jakarta, 1988, dalam Riza Sihbudi, *op cit*, hal 102

⁵ *Ibid*, hal. 104

Universitas Hebrew).⁶ Mereka mengajukan sedikitnya dua alasan yang menentang zionisme Herzl. Pertama, berdirinya Negara Yahudi di Palestina, akan mengakibatkan terjadinya pertikaian dengan penduduk asli yang telah berabad-abad menempati wilayah tersebut. Kedua, zionisme akan membangkitkan kecurigaan terhadap orang Yahudi di seluruh dunia. Mereka akan dianggap memiliki kesetiaan ganda dan kewarganegaraan rangkap.⁷

Pada 24 Mei 1917, Montefiore dan Alexander, masing-masing adalah ketua asosiasi Inggris-Yahudi dan ketua Dewan Perwakilan, yang mengumumkan protes terbuka terhadap program Zionis dalam majalah *The Times*. Mereka mendefinisikan program Zionisme politik tersebut sebagai berikut:⁸

Suatu kebangsaan Yahudi yang sekular, direkrut atas prinsip ras yang longgar dan tidak jelas serta kekhasan etnografi. Akan tetapi, ini bukan Yahudi dalam arti spiritual sehingga pendiriannya di Palestina akan merupakan penolakan terhadap semua cita-cita dan harapan karena kelangsungan hidup bangsa Yahudi di daerah itu menilai hati nurani dan simpati bangsa Yahudi sendiri.

Dan dengan alasan tersebut, Komite Badan Perwakilan dan Asosiasi Inggris-Yahudi mengutuk proposal kebangsaan zionis.

Sedangkan *Mayer Sulzberger*, mantan ketua Pengadilan Pembelaan Masyarakat di Pennsylvania, menentang zionisme dengan alasan merupakan penolakan terhadap demokrasi. Lebih terperinci, ia mengungkapkan:⁹

Demokrasi berarti bahwa masyarakat suatu negara akan memilih pemerintahannya dan memelihara kekuasaannya. Mengingat prinsip demikian, suatu konvensi Zionis yang mengharapkan suatu pemerintahan di Palestina akan sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi yang paling sederhana sekalipun. Hal ini tidak bermakna kecuali tujuannya ialah menyingkirkan penduduk yang ada di Palestina dan mencabut hak mereka untuk memerintah sendiri dengan menggantikannya dengan kemauan pihak luar yang mungkin pernah atau tidak pernah melihat Palestina.

Bahkan Komisi Yahudi AS yang diwakili oleh ketuanya, *Jacob H. Schiff*, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:¹⁰

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ George Lenczowski, *Op Cit*, hal. 236

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hal 237

Saya percaya bahwa saya tidak begitu keliru bila saya katakan bahwa antara 50 dan 70 persen yang disebut dengan nasionalis Yahudi adalah atheis atau murtad, dan bahwa sebagian besar pemimpin nasionalis Yahudi pasti tidak menaruh minat terhadap agama Yahudi.

Namun segala tentangan ini tidak mampu menggagalkan berdirinya negara untuk bangsa Yahudi yang bernama Israel. Berkumpulnya para Yahudi di tanah Palestina ini tidak lagi dengan alasan agama namun lebih dikarenakan rasa ketidakpantasan mereka untuk tinggal bersama bangsa-bangsa yang lain. Diliputi dengan kerinduan dan rasa persaudaraan yang tinggi, imigran Yahudi berdatangan menuju "tanah yang dijanjikan".

Dengan berdirinya Israel, zionisme tidak lagi menjadi gerakan keagamaan. Bahkan mereka semakin sewenang-wenang terhadap golongan bukan Yahudi. Israel melasanakan kebijakan yang diskriminatif dan rasis. Pada 10 November 1975, Majelis Umum PBB pernah menyetujui Resolusi 3379 (xxx) yang antara lain berbunyi: Zionisme adalah se bentuk rasisme dan diskriminasi rasial.¹¹ Tetapi ini tidak menghentikan berbagai gelombang imigran yang berdatangan ke Palestina. Gelombang imigrasi massal yang biasa disebut *aliyah* ini berdatangan dari berbagai negara seperti Rusia, Rumania, Polandia, Bulgaria, Yugoslavia, Yaman, Aden, Jerman, dan negara-negara Afrika. Dilihat dari sejarahnya, gelombang aliyah ini semakin mendapat dukungan ketika Menteri Luar Negeri Inggris, *Arthur James Balfour*, mengirim surat kepada *Lord Rothchild*, seorang tokoh zionis. Yang isinya merupakan dukungan Pemerintah Inggris kepada gerakan zionisme untuk mendirikan negara Yahudi di Paletina. Surat yang dikirim tanggal 2 November 1917 itu kemudian lebih dikenal dengan sebutan *Deklarasi Balfour*.¹²

Asher Arian membagi periode imigrasi antara 1882 sampai 1988 menjadi empat kategori.¹³ Pertama, masa 1882-1924, adalah masa pertumbuhan. Dengan jumlah yang tidak terlalu besar tetapi secara politis sangat menentukan. Kedua, masa 1925-1948, adalah generasi mandat. Perjuangan melawan Inggris, Rusia, dan Nazi; dan untuk kemerdekaan. Ketiga, periode 1948-1954, banyak berdatangan imigran dari Asia dan Afrika, selain dari Eropa.

¹¹ *Ibid.*

¹² Riza Sihbudi, *op cit.* hal 105

¹³ Asher Arian, *Politics in Israel: The Second Generation*, Chatham House Publishers, New Jersey, 1989, dalam Riza Sihbudi, *Ibid*

Mereka berlomba mendapatkan tanah yang dijanjikan. Keempat, periode 1954-1988, dimana para imigran mulai diseleksi. Untuk mengurangi jumlah buruh yang tidak produktif.

Dengan kedatangan imigran Yahudi dari seluruh dunia tersebut menyebabkan keseimbangan penduduk Arab dan Yahudi di Palestina berubah. Pada 1939, orang Yahudi telah mencapai 31% dari seluruh populasi yang ada di Palestina. Ini merupakan peningkatan drastis dari 17% pada 1931, kurang dari 10% pada 1919, dan sekitar 6% pada saat awal aliyah.¹⁴ Dengan kedatangan para imigran ini diharapkan nantinya wilayah Palestina akan dipenuhi dengan bangsa Yahudi. Dengan tujuan untuk merubah keseimbangan proporsi jumlah penduduk di wilayah tersebut. Karena bila di wilayah tersebut mayoritas penduduknya adalah Yahudi maka akan dapat digunakan sebagai salah satu alasan pembenaran untuk mendirikan negara untuk bangsa Yahudi.

Kedatangan aliyah yang berasal dari seluruh penjuru dunia ini membawa keberagaman perilaku kehidupan penduduk Israel. Sebelum negara itu berdiri, disana sudah ada penduduk Arab-Palestina disamping turunan Yahudi yang telah bermukim sejak puluhan bahkan ratusan tahun sebelumnya. Dan ditambah dengan para imigran tersebut. Untuk membedakan para imigran Yahudi itu, timbullah istilah *Sephardim* dan *Ashkenazim*.¹⁵

Sephardim adalah para imigran dari Asia dan Afrika. Sedangkan Ashkenazim adalah kelompok imigran dari Eropa dan Amerika. Kedua kelompok ini memiliki beberapa perbedaan. Kebanyakan Sephardim tidak memiliki keahlian dan berpendidikan rendah. Maka mereka memiliki status sosial, pekerjaan, dan kekuasaan politik yang rendah.

Populasi Yahudi antara 1919-1948, Ashkenazim berjumlah 90% sedangkan Sephardim 10%. Tetapi pada periode 1948-1964, Sephardim telah mencapai 55%. Data lain bahkan menyebutkan antara tahun 1952-1954, Sephardim telah mencapai jumlah 76%. Dari sekitar 13 juta masyarakat Yahudi di seluruh dunia, sekitar 85% adalah Ashkenazim dan 15% adalah Sephardim. Dari jumlah itu, 10% Ashkenazim tinggal di Israel, sementara Sephardim sekitar 66% tinggal di Israel.¹⁶ Tidak diketahui dengan pasti apakah yang menyebabkan begitu banyaknya Sephardim dibanding Ashkenazim. Tetapi mungkin dikarenakan para Yahudi yang berada di kawasan Asia dan Afrika tidak seberuntung yang tinggal di AS dan

¹⁴ M. Riza Sihbudi, dkk, *Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah*, Eresco, Bandung, 1993, hal. 46

¹⁵ Riza Sihbudi, *loc cit*

¹⁶ *Ibid*, hal. 106

Eropa. Mereka tidak memiliki kehidupan sosial dan ekonomi sebaik 'saudara-saudara' mereka yang ada di AS dan Eropa. Seperti kita ketahui bahwa bangsa Yahudi di AS dan Eropa lebih mendapatkan simpati dan kedudukan.

Jumlah penduduk Israel sampai dengan Juli 2002, menurut Badan Sensus Israel adalah sebanyak 6.029.529 jiwa.¹⁷ Jumlah sudah termasuk orang-orang Yahudi yang berada di Tepi Barat sebanyak 182.000 jiwa, 20.000 orang di daerah pendudukan dataran tinggi Golan, hampir 7000 penduduk di Jalur Gaza, dan sekitar 176.000 orang di Yerusalem bagian Timur. Dengan pertumbuhan imigran sebanyak 2,11 per 1000 populasi.¹⁸ Meskipun pemerintah Israel secara besar-besaran dan terus-menerus mengupayakan pemukiman bagi para aliyah, namun banyak juga penduduk Israel yang tinggal di pemukiman liar, terutama di kawasan Tepi Barat dan Jalur Gaza. Dan pemukiman liar ini tentunya menjadi masalah baru bagi pemerintah Israel. Pemukiman-pemukiman liar ini akan menambah masalahnya dengan bangsa Palestina. Selain itu, pemukiman liar yang tidak terjaga dengan baik akan menjadi sasaran mudah bagi aksi teror pejuang Palestina.

Pada saat ini agama yang dipeluk penduduk Yahudi bermacam-macam. Pada tahun 1988, penganut Yudaisme sebesar 82%, Islam 13,5%, Kristen 2,5%, dan lainnya 1,5%. Bahasa yang dipakai sehari-hari adalah Ibrani, Arab, dan lain-lain.¹⁹

Memang secara formal Israel adalah negara demokrasi sekuler. Tetapi bukan berarti tidak ada hubungan antara penganut agama dengan negara. Di dalam pemerintahan terdapat Departemen Agama yang mengurus berbagai agama seperti: Yudaisme, Islam, Druze, Kristen, dan lainnya. Negara menjamin kehidupan keagamaan masing-masing, termasuk cara-cara menikah dan bercerai.

Meski demikian ternyata Departemen Agama lebih banyak mengurus mayoritas Yahudi. Mengadakan upacara kematian (*kosher*), mengurus kerabian, dan sekolah agama (*Yeshivot*). Bahkan di Israel, antara dimensi nasional dengan keagamaan telah terjalin demikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan.²⁰ Sehingga terlihat bahwa hari besar nasional dianggap sebagai hari besar Yahudi, dan demikian pula sebaliknya. Sehingga akan sulit dibedakan antara identitas nasional Israel dengan identitas agama Yahudi (Yudaisme).

¹⁷ Badan Sensus Yahudi, dalam situs www.state.gov/israel.html tertanggal 9 Desember 2002

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Riza Sihbudi, *loc. cit.*

²⁰ *Ibid.*

2.1.2 Politik Dalam Negeri

Jauh sebelum Israel berdiri, masyarakat Yahudi mendirikan apa yang dinamakan *Histadrut* pada 1920.²¹ *Histadrut* yang terdiri dari para buruh Yahudi ini mempunyai peran yang cukup penting dalam kiprah ekonomi dan politik Israel. Ketika Israel belum lahir, *Histadrut* mengorganisir para imigran, menyiapkan pasukan para Yahudi, membangkitkan kembali kebudayaan dan bahasa Yahudi, dan membeli tanah untuk pemukiman. Mereka juga mendirikan industri, bank, perusahaan asuransi, mengelola koran, dan asosiasi olah raga, dan lain-lain.

Organisasi ini dikelola secara modern. Setelah Israel merdeka, aspirasi politik mereka disalurkan melalui partai Buruh. Namun setelah tahun 1965, suara mereka terpecah dan sebagian dari mereka mendukung *Likud*. *Histadrut* bukan merupakan tataran struktur politik Israel, namun merupakan suatu kelompok kepentingan yang sangat berperan dalam sistem politik Israel.²²

Israel merupakan suatu negara penganut demokrasi parlementer.²³ Yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan Eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab pada Legislatif (*Knesset*). Kekuasaan Yudikatif adalah independen. Sedangkan Presiden sebagai Kepala Negara yang menjadi simbol negara.

Presiden (*Nasi*) dipilih oleh *Knesset*.²⁴ Masa jabatan presiden adalah lima tahun dan boleh menduduki dua kali masa jabatan. Walaupun kekuasaan Presiden terbatas namun memiliki Prestise yang tinggi. Presiden dapat menunjuk *Knesset* untuk membuat pemerintahan baru menyusul adanya pemilu atau dapat membubarkan pemerintahan yang sedang berjalan.

Tugas lain dari Presiden adalah menerima surat kepercayaan duta besar asing di Israel; menandatangani perjanjian dan undang-undang yang telah disetujui oleh *Knesset*; memberi rekomendasi untuk pengangkatan Gubernur Bank Israel dan misi diplomatik ke luar negeri; dan memberikan grasi atau pengurangan hukuman atas rekomendasi Menteri Kehakiman.²⁵

²¹ *Ibid*, hal 107

²² *Ibid*.

²³ *Ibid*.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ *Ibid*, hal 108

Sebagai negara penganut demokrasi parlementer, parlemen Israel memiliki kedudukan yang sangat strategis. Knesset memiliki fungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Anggota Knesset dibagi menjadi sepuluh komisi.²⁶ Yaitu komisi rumah tangga; komisi hukum, undang-undang, dan peradilan; komisi keuangan; komisi urusan luar negeri dan keamanan; komisi imigrasi dan penampungan; komisi ekonomi; komisi pendidikan dan kebudayaan; komisi urusan dalam negeri dan lingkungan; komisi perburuhan dan kesejahteraan; dan komisi kontrol negara. Dari komisi-komisi tersebut ada tiga komisi yang dianggap paling penting, yaitu: komisi rumah tangga, komisi urusan luar negeri dan keamanan, dan komisi keuangan. Ketiga komisi ini biasanya dikuasai oleh partai penguasa.

Ada tiga sidang untuk membicarakan suatu RUU atau rancangan kebijakan yang masuk ke meja knesset. Kebanyakan RUU atau kebijakan tersebut diusulkan oleh pemerintah. Setiap RUU yang masuk harus menginap selama 48 jam di knesset sebelum dibicarakan pada sidang pertama.

Pada sidang pertama, menteri yang berkepentingan menjelaskan RUU secara umum. Kemudian dibuka diskusi atau perdebatan tentang RUU itu. Bila dianggap cukup, maka RUU diputuskan diterima dan dibicarakan lebih lanjut atau dikembalikan kepada pemerintah. Jika RUU diterima, sidang pertama juga menentukan komisi bidang apa yang harus menangani lebih lanjut.

Dalam komisi itu RUU dibahas secara detail. Pemerintah yang diwakili menteri yang bersangkutan bisa menyarankan sesuatu. Seringkali saran ini diterima dengan mudah, tetapi apabila terjadi perbedaan pendapat, maka masalah akan diserahkan kepada komisi rumah tangga. Masalah-masalah penting bisa diakhiri dimeja komisi secara kekeluargaan. Tidak ada batas waktu berapa lama komisi dapat mempertimbangkan RUU dan tidak ada mekanisme yang dapat digunakan untuk menekan komisi segera melaporkan RUU. Anggota komisi itu sendiri yang dapat menentukan lama tidaknya pembahasan suatu RUU.

Perubahan RUU dapat diusulkan oleh komisi yang kemudian dilaporkan ke knesset. Pada sidang ke dua RUU versi komisi tersebut di bahas. Jika tidak ada perubahan lagi maka sidang ke dua dan ke tiga dapat dilakukan pada waktu yang sama. Artinya sidang ke

²⁶ *Ibid*, hal 109

tiga yang berfungsi untuk mensyahkan RUU dapat dilangsungkan setelah sidang ke dua selesai. Bila ternyata pada sidang ke dua ad perubahan RUU, maka sidang ke tiga di tunda.

RUU akan menjadi UU setelah di tandatangani oleh perdana menteri, presiden, dan menteri yang bersangkutan. Kemudian UU yang telah di sahkan tersebut disiarkan dlam lembaran negara.

Pemimpin eksekutif, seorang Perdana Menteri, dibantu oleh sejumlah menteri. Para menteri ini dipilih oleh partai dan bertanggung jawab kepada anggota partainya dalam Knesset.²⁷ Biasanya perdana menteri tidak bisa mencampuri pilihan partai. Susunan kabinet dapat berubah sewaktu-waktu.

Seorang Perdana Menteri haruslah anggota Knesset, sedangkan menteri tidak. Walaupun lazimnya, seorang menteri berasal dari anggota Knesset. Masa kerja suatu kabinet adalah empat tahun. Tetapi masa kerja ini bisa lebih cepat diakhiri apabila Perdana Menteri meninggal dunia atau kabinet mendapat mosi tidak percaya dari Knesset.

Keberadaan anggota kabinet yang berasal dari anggota parlemen membawa suatu dampak. Kabinet dapat digambarkan sebagai representasi dari parlemen dan tokoh-tokoh penting dalam partainya, pemikiran atau usulan yang ada di eksekutif tentunya juga telah dibicarakan di partai. Dengan demikian, eksekutif dalam merumuskan suatu rancangan kebijakan tidak menemui kendala yang berarti untuk disahkan menjadi kebijakan resmi di parlemen.

Lazimnya, menteri-menteri penting dalam kabinet seperti Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri diduduki oleh tokoh –tokoh dari partai penguasa. Atau, oleh tokoh-tokoh yang dianggap mampu dan tidak beroposisi terhadap pemerintahan. Seperti pada pemerintahan Sharon saat ini, meskipun posisi Menteri Pertahanan dan Luar Negeri dipegang oleh tokoh dari Buruh, tetapi pemerintahan Sharon ini adalah pemerintahan koalisi sehingga tidak ada oposisi.

Dengan dikuasanya kabinet dan tiga komisi penting di Knesset, maka kedudukan eksekutif akan kuat. Apalagi bila seorang Perdana Menteri yang sedang berkuasa adalah mantan perwira tinggi militer, akan juga mendapat dukungan sepenuhnya dari pihak IDF.

²⁷ Ibid, hal 110

Kekuasaan yudikatif adalah independen. Para hakim dipilih oleh Presiden berdasarkan nominasi suatu komite. Mereka dipilih untuk semur hidup atau berakhir masa jabatan pada usia 70 tahun.²⁸ Hirarki kekuasaan yudikatif adalah pengadilan rendah; pengadilan distrik, tempat naik banding bagi pengadilan rendah; dan mahkamah agung, tempat banding paling akhir.²⁹

Masalah hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian diserahkan pada yurisdiksi khusus pengadilan agama. Pengadilan *Rabbi* untuk agama Yahudi; pengadilan *Shariah* untuk agama Islam dan Druze, dan pengadilan *Gereja* untuk agama Kristen. Mahkamah Agung akan mengawasi mereka agar tidak keluar dari yurisdiksi yang berlaku.³⁰

Pemilu diadakan untuk memilih anggota Knesset. Pemilu diadakan empat tahun sekali atau dapat dipercepat. Hanya Knesset yang dapat mempercepat Pemilu dan pemerintah tidak dapat membubarkan Knesset.

Jika tidak ada perubahan dari Knesset, maka pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan peraturan. Tidak ada ketentuan pada tanggal berapa suatu pemilu harus diadakan. Namun peraturan menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan pada hari Selasa minggu ketiga bulan Yahudi *Hesvan* (sekitar November), tahun terakhir masa kerja Knesset. Namun apabila pada tahun sebelumnya terdapat loncatan hari menurut kalender Yahudi, maka pemilu akan dilaksanakan pada hari Selasa minggu pertama bulan yang sama.³¹

Sebagai negara demokrasi parlementer, peranan pemilu sangat besar. Masing-masing partai politik akan berusaha memasukkan sebanyak mungkin anggotanya menjadi anggota Knesset. Knesset memiliki 120 kursi. Partai yang mendapat sekurangnya 61 kursi akan memegang kekuasaan eksekutif di Israel. Namun hal ini sulit untuk tercapai karena tidak ada suatu partai yang dominan. Sehingga yang kerap terjadi adalah pemerintahan yang merupakan koalisi dari beberapa partai. Israel menganut sistem multi partai. Sehingga siapapun boleh mendirikan partai asalkan sesuai dengan tata cara yang berlaku. Pada kenyataannya, hanya ada dua partai politik yang bersaing dan secara stabil mendapat mendapat suara besar dalam pemilu yaitu Partai Likud dan Partai Buruh.

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*, hal. 111

³¹ *Ibid*

Partai Buruh (*Mifleget Ha'avoda Ha-Israelit*) secara resmi berdiri pada pada 21 Januari 1968. Merupakan partai aliansi dari beberapa partai buruh terdahulu yaitu *Mapai*, *Mapam*, *Ahdut Ha'avoda Poale Zion*, dan *Rafi*.³² Sedangkan *Likud* pertama kali mengikuti pemilu pada 1973. Partai ini adalah gabungan dari beberapa partai yang sebelumnya menjadi rival partai buruh. Mereka meliputi *Herut*, *Gahal*, *Liberal*, *Shlomzion*, dan *Progresif*.³³

Kedua kelompok ini selalu bersaing bahkan sebelum berdirinya negara Israel. Kelompok Buruh yang sebenarnya berasal dari Histadrut telah terbentuk sejak tahun 1920-an menghimpun para pekerja Yahudi di Palestina dan para imigran yang datang awal abad ke-20. Mereka menguasai kehidupan perekonomian warga Yahudi di Palestina. Sementara Likud berawal dari para imigran Yahudi dari Eropa pada tahun 1930-an. Mereka berimigrasi karena adanya tekanan dan kekejaman Nazi Jerman. Mereka merupakan imigran yang terdiri dari para terpelajar dan kalangan menengah. Sehingga menciptakan suatu kelas baru dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Perbedaan diantra kedua kelompok tersebut misalnya tampak pada perlakuan mereka kepada orang-orang Palestina. Histadrut yang telah lama berada di Palestina lebih menghormati kehidupan masyarakat Palestina. Sedangkan Likud lebih bersifat konfrontatif, seperti mengusir orang-orang Palestina. Seperti yang mereka alami ketika masih berada di Eropa.

Selain kedua kelompok tersebut, masih ada kelompok-kelompok lain yang juga terwakili dalam partai politik. Yang tidak memiliki suara yang signifikan. Namun dapat berpengaruh dalam menentukan manakah kelompok (partai Buruh ataukah Likud) yang akan memegang kekuasaan dengan cara melakukan koalisi dengan mereka.

Kelompok-kelompok partai kecil tersebut adalah kelompok partai yang berlandaskan agama dan kelompok partai yang dibentuk oleh orang-orang Arab, partai-partai komunis, dan partai independen. Kelompok partai-partai agama antara lain adalah *Mizrahi*, *Hapoal Hamizrahi*, *Agudat Israel*, *Poalei Agudat Israel*, *Front Agama Torah*, *Agama Nasional*, *Front Persatuan Agama*, *Shas*, dan *Kach*.³⁴ Partai Kach dikenal sebagai partai yang sangat radikal dan rasialis. Sehingga sempat dilarang untuk mengikuti Pemilu karena alasan tersebut.

³² *Ibid.*, hal. 113

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hal 114

Kelompok berikutnya terdiri dari partai-partai Arab. Antara lain *Partai Demokratik Arab*, *Arab Progresif*, *Petani Arab*, dan *Persatuan Arab*. Kelompok partai-partai komunis yang terdiri dari *Rakkah*, *Maki*, *Front Demokratik untuk Perdamaian dan Persamaan*. Dan kelompok partai-partai gerakan independen. Yang meliputi *Sephardim*, *Organisasi Wanita Zionis Israel (WIZO)*, *Yemenitas*, *Gerakan Pembela Hak Asasi*, *Gerakan Demokratik untuk Perubahan*, dan *Moked*.³⁵

Sedangkan menurut sumber yang lain, sebelum proklamasi kemerdekaan, partai – partai politik di Israel terbagi menjadi tiga kelompok besar.³⁶ Yaitu partai milik Organisasi Zionis, kelompok-kelompok revisionis yang tidak berhubungan dengan Zionis, dan kelompok-kelompok non-Zionis. Kelompok Zionis terbagi dalam beberapa partai politik seperti *Mapai (Partai Buruh Sosialis)*, *Hashomer Hatzair*, *Poalei Zion*, *Zionis Umum*, *Mizrachi*, *Aliya Hadasha (Partai Imigran Baru)*, dan *Ihud (Partai Persatuan)*. Pada umumnya, mereka setuju untuk mendirikan negara dwi-bangsa di Palestina yang meliputi bangsa Yahudi dan Palestina dibawah bendera Israel.

Kelompok kedua, terdiri dari para mantan anggota Zionis yang membentuk Organisasi Zionis baru dibawah *Vladimir Zhabothinski*. Kelompok ini juga disebut dengan kelompok revisionis, yang menentang setiap politik moderat dan menginginkan pendirian negara Israel untuk bangsa Yahudi diseluruh wilayah Palestina dan Transyordania (Yordania). Sedangkan kelompok ketiga, terdiri dari Yahudi non-Zionis yang dihimpun dalam suatu organisasi yang disebut dengan *Agudath Israel*. Yaitu suatu aliran agama yang tidak berpolitik.

Bagi masyarakat dan pemilih, faktor yang cukup menentukan pilihan mereka adalah keamanan dan prestise.³⁷ Artinya, partai yang mampu menjamin keamanan dan prestise masyarakat Yahudi akan mempunyai peluang yang lebih besar untuk memenangkan pemilu. Hal ini dapat dilihat dari pandangan masing-masing partai terhadap suatu hal yang dianggap sebagai ancaman keamanan, seperti gerakan intifadah Palestina. Semenjak berlangsung intifadah, dunia telah berulang kali mengecam tindakan Israel yang dianggap

³⁵ *Ibid*.

³⁶ George Lenczowski, *Op Cit*, hal. 238

³⁷ Riza Sihbudi, *op cit*, hal. 115

tidak manusiawi. Tentu saja, intifadah ini mengancam kelangsungan hidup penduduk Israel dan menjatuhkan citra Israel.

Buruh dan Likud sepakat untuk mengakhiri ancaman intifadah. Namun tentu saja dengan cara yang berbeda. Likud selalu cenderung menyelesaikannya dengan jalan kekerasan. Hal ini seperti terlihat dari pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh para petinggi Likud. Ariel Sharon mengatakan dalam kampanyenya bahwa bila partai Likud menang maka yang pertama akan diselesaikan adalah masalah intifadah. *Benjamin Begin* menyatakan bahwa bila mereka meninggalkan Yerusalem, maka yang akan menggantikan adalah PLO. Tentu saja hal itu tidak diinginkan karena akan mengganggu keamanan dan eksistensi Yahudi. *Yitzhak Samir*, seorang ketua Likud era 1980-an pernah berkampanye bahwa berdirinya negara Palestina di daerah pendudukan Israel, maka dapat menyebabkan terjadinya perang dunia ketiga. Dan *Golda Meir*, mantan Perdana Menteri Israel menyatakan bahwa tidak ada yang disebut dengan bangsa Palestina sehingga tidak mungkin ada negara Palestina Merdeka.³⁸

Bahkan bila perlu mengusir tokoh yang memimpin intifadah dari daerah pendudukan. Daerah pendudukan tersebut akan diintegrasikan ke dalam wilayah Israel. Dengan demikian tidak ada lagi wilayah orang Palestina. Sikap ini di tunjukan antara lain oleh Ariel Sharon.

Sedangkan Buruh ingin menyelesaikan masalah intifadah secara damai. *Shimon Peres* bahkan mengusulkan untuk menyerahkan Tepi Barat asalkan Palestina mau berkonfederasi dengan Yordania. Meskipun pada kelanjutannya pembicaraan tentang hal tersebut tidak berhasil karena Raja Yordania, *Hussein*, tidak mau mewakili orang-orang Tepi Barat lagi karena Yordania telah mencabut klaim mereka atas Tepi Barat dan melepas hubungan administrasi dengan daerah tersebut. *Yitzhak Rabin*, ketua Buruh, yang menjadi Perdana Menteri Israel semenjak kemenangan Buruh pada pemilu 1992 menandatangani suatu deklarasi bersama dengan PLO yang dianggap sebagai wakil dari Palestina. Disebut dengan Deklarasi Prinsip (*Declaration of Principle*) pada 13 September 1993. Namun kenyataannya, pelaksanaan dari jadwal-jadwal yang tertera dalam perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan tepat.

³⁸ Satrio Arismunandar, Liputan Media Massa tentang Timur Tengah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, dalam Jurnal Ilmu Politik 12, Gramedia, Jakarta, 1991, hal 61

Meskipun berdirinya Israel merupakan hasil jerih payah Organisasi Zionis, namun terdapat ketegangan diantara organisasi tersebut dengan negara Israel (pemerintahan Israel) pada dekade awal berdirinya Israel.³⁹ Hal tersebut berkaitan dengan dua hal utama, yaitu masalah kendali kebijakan Israel dan imigrasi. Para pemimpin Israel setuju untuk meneruskan keberadaan Organisasi Zionis dan Agen Yahudi, namun menolak mereka untuk mencampuri urusan politik dalam negeri. *Ben Gurion*, PM Israel, pada 12 September 1960 berpidato bahwa gerakan Zionis bagaikan perancah di sekeliling rumah Israel. Bila pembangunan rumah telah selesai, maka keberadaannya (perancah) tidak diperlukan lagi.⁴⁰

2.1.3 Politik Luar Negeri.

Politik luar negeri Israel seperti juga lazimnya dengan negara-negara lain adalah berdasarkan kepentingan dalam negeri. Segala kebijakan luar negerinya sedapat mungkin memberi keuntungan atau manfaat yang sebesar-besarnya pada kehidupan dalam negeri. Sesuai dengan sejarah berdirinya negara ini, maka keamanan nasional juga merupakan salah satu fungsi diplomatik internasionalnya.

Menurut *Andersen*, kebijakan luar negeri Israel dapat dibagi menjadi tiga fase.⁴¹ Fase pertama, Israel disibukkan dengan awal berdirinya negara. Dan kebutuhan akan pengakuan internasional. Fase kedua, politik luar negeri Israel lebih menitikberatkan pada kepentingan domestik. Pembangunan disesuaikan dengan keamanan daerah perbatasan. Untuk mendekati negara-negara Arab disekitarnya, Israel menggunakan politik *carrot and stick*.⁴² Politik carrot digunakan pada negara-negara Arab yang mau beketja sama. Sedangkan politik stick, ditujukan untuk memperlihatkan kekuatan Israel dalam bidang militer yang superior. Untuk itu, Israel sangat bergantung pada kemurahan negara-negara Barat terutama AS dalam memperkuat posisi militernya.

Pada fase ketiga, pada masa 1970-an sampai dengan 1980, hubungan diantara keduanya sedikit merenggang. AS ingin memenuhi kebutuhannya akan minyak pada negara-negara Timur Tengah. Karena adanya embargo minyak Timur Tengah pada 1970-an cukup

³⁹ George Lenczowski, *Op Cit*, hal. 274

⁴⁰ *Ibid*, hal 236

⁴¹ Roy. R. Andersen, *Politics and Change in the Middle East: Sources of Conflict and Accomodation*, Englewood Cliffs, New Jersey, dalam Riza Sihbudi, *op cit*, hal. 120

⁴² *Ibid*.

merepotkan AS. Sehingga AS harus mengubah politik luar negerinya di Timur Tengah dengan memperhatikan kepentingan negara-negara Arab yang dianggap moderat.⁴³

Melihat kenyataan ini, Israel menerapkan politik luar negeri yang pragmatis dan mandiri. Berusaha menciptakan keamanan negaranya dengan cara mendekati negara-negara Arab melalui perjanjian. Bahkan Israel bersedia berunding dengan PLO yang sebelumnya dianggap sebagai organisasi teroris oleh Israel.

2.2 Sejarah Perlawanan Palestina

2.2.1 Latar Belakang

Seperti yang telah diketahui, bahwa inti permasalahan sengketa antara Arab dengan Israel adalah Palestina. Yaitu sengketa atas (tanah) Palestina antara rakyat Arab dan Palestina dengan rakyat Yahudi. Penyelesaian permasalahan tersebut akan menyangkut pengakuan dan pelaksanaan hak-hak nasional rakyat Palestina disamping hak hidup Yahudi. Keduanya merasa berhak atas negeri itu dan berusaha untuk menguasainya dan mengembangkan kehidupannya nasionalnya. Dengan demikian, kedua kelompok masyarakat tersebut saling berhadapan satu sama lain sebagai pihak yang saling berlawanan.

Sengketa tersebut dimulai dari ketidaksetujuan dari pihak Arab yang mewakili Palestina kepada bantuan Inggris pada pembentukan negara Israel. Setelah permasalahan tersebut diserahkan pada PBB, tetap saja pihak Arab tidak menerima pembagian wilayah yang ditawarkan oleh PBB, sedangkan Yahudi menerimanya walaupun pada dasarnya tetap keberatan karena juga menginginkannya secara keseluruhan. Arab merasa tidak ada pembenaran apapun yang mengizinkan berdirinya negara untuk Yahudi dikawasan tersebut seberapapun besar wilayahnya.

Dengan penolakan atas usulan yang dikeluarkan PBB tersebut, maka pada saat berakhirnya mandat Inggris atas Palestina, kedua pihak telah menyiapkan rencananya masing-masing. Israel telah memproklamkan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948 atau sehari setelah keluarnya pemerintah mandat Inggris dari Palestina. Sedangkan Arab yang bertindak sebagai pembela Palestina telah bersiap untuk menyerang Israel untuk membantu rakyat Palestina.

⁴³ Ibid.

Perang Arab-Israel pertama sejak berdirinya Israel tersebut menunjukkan hasil yang merugikan pihak Arab terutama rakyat Palestina. Karena aliansi Arab dalam perang tersebut mengalami kekalahan dan gagal menjatuhkan Israel. Selain kalah perang, Palestina mengalami kerugian karena akibat dari perang tersebut, wilayah Israel yang sebelumnya, menurut pembagian yang disetujui dan diusulkan PBB, yaitu sebesar sekitar 53% dari wilayah Palestina meluas menjadi sekitar 75% dari seluruh wilayah Palestina termasuk sebagian Jalur Gaza, Tepi Barat, dan daerah Gunung Sinai.⁴⁴ Sedangkan Tepi Barat dan Yerusalem bagian timur dianeksasi oleh Yordania, dan Jalur Gaza dikuasai tentara Mesir.⁴⁵ Serangan terhadap Israel oleh negara-negara Arab tidak mampu mengusir Israel, tetapi justru kekalahan mereka menyebabkan meluasnya wilayah yang dikuasai Israel.

Rakyat Palestina tidak hanya gagal mencapai kemerdekaan dan mendirikan negara, namun juga kehilangan wilayah, dan ditambah dengan pengusiran yang dilakukan oleh Israel atas pemilik tanah Palestina yang telah didudukinya. Mereka terpecah menjadi kelompok-kelompok yang tersebar di banyak negara, mayoritas sebagai pengungsi. Kepergian mereka selain karena diusir juga karena telah diperintahkan oleh negara-negara Arab yang menyerang Israel karena dikhawatirkan akan menjadi korban dalam perang tersebut bila tetap berada di tanahnya masing-masing.

Sebagai akibat fragmentasi dan penyebaran dalam penngasingan itu rakyat Palestina mengalami suatu kemunduran sebagai bangsa. Perhatian mereka untuk soal-soal politik menjadi kecil. Dalam sengketa tersebut mereka lebih menjadi obyek dan bukan sebagai subyek. Mereka tidak diikutsertakan dalam perundingan-perundingan, namun merupakan bahan pembicaraan. Bahkan PBB hanya menganggap mereka sebagai suatu kelompok pengungsi dan bukan sebagai suatu bangsa. Resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 22 November 1967, no 242, membatasi mereka sebagai masalah pengungsi dan bukan masalah politik.⁴⁶

Persebaran pengungsi Palestina tidak hanya di negara-negara sekitar Palestina dan Arab, namun juga mencapai Eropa dan AS. Namun, jumlah pengungsi terbanyak terdapat di Yordania yang berbatasan langsung dengan wilayah Palestina. Selain itu, Suriah dan Lebanon

⁴⁴ Kirdi Dipoyudo, *Timur Tengah dalam Pergolakan*, CSIS, Jakarta, 1977, hal. 85

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 86

tercatat sebagai penerima pengungsi terbanyak selanjutnya. Selain karena alasan geografi, alasan lain menumpuknya pengungsi di Yordania adalah karena Yordania adalah satu-satunya negara Arab yang menerima mereka secara terbuka.⁴⁷ Baik kepada penduduk Tepi Barat maupun kepada mereka yang mengungsi ke Yordania, diberi kewarganegaraan. Dan diikutsertakan dalam pemerintahan negara sebagai anggota parlemen, kabinet, dan lembaga-lembaga negara lainnya.

Meskipun terpecah dan tersebar dalam pengasingan di beberapa negara, orang Palestina tetap merasa terikat dengan negeri asal mereka dan merindukannya. Mereka merasa sebagai orang Palestina yang suatu saat akan kembali ke tanah air mereka. Nasionalisme Palestina tetap hidup dan lambat laun berkembang lagi.

2.2.2 Terbentuknya Kelompok-kelompok Perjuangan

Dari tempat persebarannya, orang Palestina membentuk beberapa organisasi perlawanan. Menurut *Amos*, ada tiga alasan utama yang menyebabkan timbulnya organisasi perlawanan.⁴⁸ Pertama, adanya kejadian-kejadian yang menimpa orang Palestina dan reaksi-reaksi politik dari sebagian besar negara-negara Arab. Kedua, adanya perasaan “kepalestinaan” sebagai suatu identitas kultural untuk membentuk masyarakat Palestina. Ketiga, usaha untuk mempersatukan masyarakat Palestina yang secara geografis dan sosial tersebar di berbagai tempat dalam suatu organisasi. Organisasi-organisasi perjuangan yang muncul kemudian, pada dasarnya dapat dibedakan menjadi kelompok moderat dengan semangat nasionalisme dan menempuh jalan politik dengan kelompok garis keras atau radikal yang berada di jalur gerilya dengan berlandaskan ke-Islaman. PLO adalah suatu organisasi yang pada awalnya berada di jalur radikal, namun dalam perkembangannya menjadi kelompok moderat yang bergerak secara politis. Sedangkan Hamas adalah kelompok yang tetap bertahan di jalur kekerasan dan militer.

Munculnya pemimpin-pemimpin baru yang menjadi perintis gerakan nasionalisme Palestina telah membuka suatu babak baru. Mereka memperjuangkan pembebasan negeri

⁴⁷ *Ibid*, hal. 87

⁴⁸ M. Hamdan Basyar, *Dilema Palestina dalam Perang Teluk*, dalam *Jurnal Ilmu Politik* 9, Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 69

mereka dari kekuasaan penjajah Israel dan dalam rangka itu, mengobarkan semangat nasional dan menyusun suatu kekuatan sosial.

Bangsa-bangsa Arab menghendaki adanya suatu organisasi yang bisa mewakili identitas Palestina dan dapat diterima sebagai wakil rakyat Palestina oleh negara-negara Arab dan internasional. Hal ini terungkap dalam KTT Arab pada awal 1964 di Kairo. Yang salah satu hasilnya adalah perlunya untuk mengembalikan identitas orang-orang Palestina dan membuat organisasi Palestina dengan angkatan perangnya. Sementara orang Palestina menginginkan suatu organisasi yang dapat mencakup seluruh aspirasi Palestina.

Dengan tujuan untuk membentuk kekuatan sosial melalui suatu organisasi tersebut membawa mereka pada suatu Kongres Bangsa Palestina pertama pada 28 Mei sampai 2 Juni 1964 di Yerusalem Timur. Dan dalam kongres tersebut berhasil membentuk suatu organisasi yang disebut dengan *Palestine Liberation Organization (PLO)*.⁴⁹ Dalam mukadimahnya, PLO adalah sebagai pemimpin penggerak kekuatan-kekuatan Palestina untuk melancarkan pembebasan, perisai hak-hak dan aspirasi-aspirasi rakyat Palestina, dan sebagai jalan kemenangan. Organisasi ini memiliki dua bagian penting. Pertama, Dewan Nasional Palestina (*Palestine National Council*). Kedua, Komite Eksekutif (*Executive Committee*), sebagai pusat kekuasaan gerakan nasionalisme Palestina. Selain kedua badan tersebut, PLO juga memiliki Tentara Pembebasan Palestina, Dewan Perancang, dan Pusat Penelitian dan Dana Nasional Palestina. Dewan Nasional Palestina merupakan badan tertinggi dibawah Kongres Rakyat yang berfungsi sebagai parlemen dan memilih anggota Dewan Eksekutif yang berfungsi sebagai pemerintahan.

PLO memperjuangkan pembebasan Palestina dari kekuasaan Israel dan mendirikan suatu negara demokratis yang memberi kedudukan yang sama kepada semua penduduknya tanpa membedakan ras dan agama. Untuk itu, PLO berusaha menggalang persatuan rakyat Palestina yang tersebar dan memupuk semangat nasionalismenya guna melawan Israel.

PLO merupakan suatu organisasi perjuangan yang terbesar dan dianggap mewakili bangsa Palestina. Organisasi yang diketuai oleh Yasser Arafat mulai tahun 1969,

⁴⁹ Kirdi Dipoyudo, *Op. Cit.*, hal. 87-88

pada KTT Arab di Rabbat, Maroko, diakui sebagai satu-satunya wakil sah bangsa Yahudi. Status ini diperkuat dengan Majelis Umum PBB pada 22 November 1974.⁵⁰

Untuk mencapai sasaraannya, PLO bergerak di bidang politik dan militer. Dalam bidang politik, untuk menunjukkan pada dunia bahwa perjuangan rakyat Palestina adalah perjuangan pembebasan nasional dengan dukungan dari negara-negara Arab untuk menarik simpati dan dukungan internasional. Dalam bidang militer, PLO mengadakan perlawanan gerilya sambil menyiapkan kekuatan rakyat Palestina menghadapi suatu revolusi.

Kekalahan tentara-tentara Arab yang bertindak sebagai pembela hak bangsa Palestina dalam perang dengan Israel tahun 1948 dan 1967 telah membuka mata para pemimpin Palestina bahwa masalah Palestina hanya dapat diselesaikan oleh rakyatnya sendiri. Aksi-aksi gerilya meningkat. Demikian pula prestise dan kepopuleran gerilyawan. Namun terjadinya konflik dengan Yordania dalam hal klaim atas Tepi Barat, ditambah dengan perpecahan di dalam tubuh organisasi karena adanya visi yang berbeda dalam menempuh jalan untuk mencapai tujuan telah melemahkan PLO secara militer.

Tetapi dalam bidang politik, organisasi ini mendapatkan kemajuan yang signifikan. Selain mendapatkan status sebagai wakil resmi bangsa Palestina, dalam sidang Majelis Umum PBB bulan November 1974 tersebut, juga dihasilkan resolusi yang merupakan suatu kemenangan bagi Palestina. Pertama, mengukuhkan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, memiliki kemerdekaan dan kedaulatan nasional, kembali ke rumah dan milik mereka, dan untuk mendapatkan semua itu dengan segala cara sesuai dengan azas-azas dan tujuan-tujuan Piagam PBB. Kedua, memberikan PLO kedudukan sebagai peninjau dalam semua persidangan Majelis Umum dan konferensi internasional yang menyangkut tentang masalah Palestina. Dengan demikian, PLO akan selalu dilibatkan dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian konflik tersebut. Masuknya PLO sebagai salah satu pihak dalam konferensi, sidang maupun perjanjian mulai sedikit merubah garis perjuangannya menjadi lebih moderat dan kooperatif.

Dalam pidato Yasser Arafat pada Sidang Majelis Umum PBB yang membicarakan masalah Palestina tersebut, sekali lagi ditegaskan oleh PLO bahwa bangsa Palestina memiliki hak penuh atas tanah airnya, Palestina. Dalam negara yang diperjuangkan tersebut, baik

⁵⁰ *Ibid*, hal. 90-91

Yahudi, Muslim, maupun Kristen akan hidup berdampingan dengan persamaan kedudukan. Tetapi yang disebut Yahudi disini adalah orang Yahudi dan keturunannya yang telah menetap di tanah tersebut sebelum dikuasai oleh Israel. Sedangkan mereka yang datang berimigrasi dikemudian hari harus pergi meninggalkan tanah tersebut. Wilayah negara Palestina harus meliputi seluruh perbatasan pada saat masih dipegang oleh pemerintahan mandat Inggris. Berarti meliputi seluruh wilayah yang kini dikuasai Israel, dan ditambah dengan Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Dalam Kongres Dewan Nasional di Aljir, Aljazair, pada 15 November 1988 dikumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Negara Palestina.⁵¹ Dengan wilayah meliputi seluruh wilayah Palestina pada saat mandat Inggris. Proklamasi ini memulai babak baru dimana perjuangan selama puluhan tahun telah menghasilkan secara de-jure atas Negara Palestina dan perjuangan selanjutnya untuk mewujudkannya secara riil karena daerah yang diklaim tersebut berada dalam kekuasaan Israel.

Proklamasi tersebut tidaklah semulus yang diperkirakan. Karena pada kenyataannya, AS sebagai salah satu negara adidaya pada saat tersebut tidak mengakui adanya negara Palestina merdeka. AS beranggapan bahwa PLO bukan sebagai gerakan nasionalisme Palestina tetapi adalah organisasi teroris. Dan karenanya, AS tidak akan mengakui proklamasi yang dikumandangkan oleh kelompok teroris. PLO memandang AS sebagai suatu kekuatan yang akan mampu memberi tekanan pada Israel karena AS sebagai *superpower* yang mempunyai latar belakang sejarah yang mendukung kemerdekaan dan demokrasi di dunia.

Hal ini menambah kepercayaan PLO untuk semakin intensif dan serius untuk berjuang secara politik dan diplomatik. PLO merubah garis kebijakannya yang radikal menjadi lebih moderat dan kooperatif sehingga mendapat simpati dan bantuan dari AS. Selanjutnya, satu bulan setelah proklamasi tersebut, secara mengejutkan PLO mengakui adanya negara Israel dan mengecam segala bentuk terorisme yang dilakukan pada Israel. Perubahan ini tentu saja ditanggapi dengan baik oleh AS dan Israel. Namun ini menjadikan PLO sebagai penghalang bagi kelompok-kelompok perjuangan lain yang bersifat radikal.

⁵¹ M. Hamdan Basyar, *Op. Cit.*, hal. 70

Sementara rakyat Palestina yang berada di dalam pendudukan Israel merasakan penderitaan yang terus-menerus dari Israel. Tekanan dan penderitaan tersebut telah melahirkan intifadah. Gerakan ini memiliki akibat yang cukup serius. Pergolakan yang selama ini terjadi telah memakan banyak korban dari pihak rakyat Palestina sehingga menimbulkan citra yang kurang baik pada Israel. Selanjutnya orang Palestina mendapatkan simpati dari dunia internasional. Sedangkan Israel dituduh sebagai pihak yang mengingkari hak hidup orang lain.

Penggerak utama intifadah adalah suatu organisasi perjuangan Palestina yang disebut dengan HAMAS (*Harakat Muqawwamat al-Isamiyah* [Gerakan Perlawanan Islam]).⁵² Perjuangan kelompok ini menggunakan atribut Islam. Hal ini karena adanya hubungan yang erat antara Hamas dengan *al-Ikhwannun al-Muslimun*, suatu organisasi yang berjuang atas nama Islam.

Adalah *Syeikh Akhmad Yasin* yang semenjak usia remaja telah ikut dalam gerakan-gerakan perlawanan dan demonstrasi. Yasin bersama dengan beberapa tokoh dari *al-Ikhwannun al-Muslimun* telah sepakat untuk mendirikan suatu organisasi perlawanan yang disebut dengan Hamas yang lahir secara resmi beberapa hari setelah meletusnya intifadah pada 8 Desember 1987.⁵³

Komunike Hamas yang menyangkut masalah intifadah adalah bahwa gerakan ini memiliki dua target makro.⁵⁴ Pertama, menolak semua solusi untuk masalah Palestina yang bersifat *al-istislaamiyah* (menyerah) termasuk segala perjanjian yang telah dilakukan oleh negara-negara Arab maupun PLO seperti perjanjian *Camp David, Oslo*, proyek otonomi, dan lain-lain. Kedua, menggerakkan aksi berkesinambungan dalam upaya mengusir penjajah Israel. Memerdekakan negeri dan tempat-tempat suci dari cengkeraman zionis berdasarkan pijakan Islam.

Gerakan perlawanan dari rakyat Palestina telah mengalami perubahan. Yang pada awal intifadah menggunakan tongkat, ketapel, dan batu menjadi lebih keras dengan menggunakan senjata api dan bom. Peningkatan intensitas dan kualitas perlawanan ini mempunyai dua mata sisi yang berlawanan bagi perjuangan pendirian Negara Palestina

⁵² Ahmad Demyathi Bashori, *Jalan Hidup Syeikhul Hamas*, dalam Suara Hidayatullah, no. 07/XV/November 2002, hal. 12

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

Merdeka. Pada satu sisi merupakan perkembangan yang cukup berarti karena Israel tidak lagi akan meremehkan mereka karena kemampuan mereka dalam mengancam keselamatan dan keamanan bangsa Yahudi tidak hanya di Israel namun juga para pendukungnya yang ada di luar negeri. Namun pada sisi yang lain, perlawanan secara “militer” ini juga menghambat perjuangan secara politis. Karena tindakan mereka yang dapat dikategorikan sebagai terorisme membuat pihak Israel tidak bersedia melanjutkan proses diplomatis sebelum dihentikannya aksi-aksi tersebut.

2.2.3 Arti Kelompok Perjuangan Palestina bagi Israel

Kelompok-kelompok yang lahir dari rasa nasionalisme Palestina ini mendapatkan antusiasme yang besar dari rakyat Palestina. Tentu saja dikarenakan mereka adalah perwakilan rasa nasionalisme dan perlawanan bangsa Palestina terhadap Israel. Meskipun pada awalnya kurang mendapat sambutan, namun semakin bertambahnya anggota kelompok-kelompok ini yang dibuktikan dengan semakin banyaknya aksi-aksi teror dan ancaman dari kelompok-kelompok tersebut. Contohnya pelaku aksi bom bunuh diri. Bila pada awal Intifadah sampai dengan tahun 2000 sulit untuk mendapatkan sukarelawan yang bersedia menjadi operator bom bunuh diri, maka pada tahun-tahun terakhir ini banyak pemuda bahkan pemudi yang mendaftarkan diri sebagai operator.⁵⁵ Sehingga sangat memungkinkan untuk meningkatkan jumlah aksi bom tersebut.

Situasi ini tentu saja sangat merugikan pihak Israel. Aksi-aksi yang selalu dibalas dengan kebijakan-kebijakan yang represif ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan berkurang. Malahan pada periode tahun 2001 sampai 2002 semakin meningkat. Peningkatan jumlah aksi bom bunuh diri selama dua tahun ini cukup pesat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebanyak lebih kurang 38 kali aksi bom bunuh diri terjadi mulai tahun 1993 sampai tahun 2000, kemudian meningkat menjadi 36 kali aksi sepanjang 2001, dan bahkan terjadi 28 kali aksi bom tersebut hanya dalam empat bulan pertama pada tahun 2002.⁵⁶ Ini tentu saja merupakan suatu ancaman yang luar biasa bagi Israel. Dapat kita bayangkan meskipun dengan penjagaan terus-menerus tetapi aksi peledakan dapat terjadi sewaktu-waktu dan menelan korban siapa saja. Kehilangan satu orang saja akan diperhitungkan oleh Israel,

⁵⁵ Suara Hidayatullah, no. 09/XV/Januari 2003, *Mereka Teroris Harus Berhati-hati*, hal. 23

⁵⁶ Tempo, 15 Desember 2002, *“Jalur cepat” menuju Surga*, hal 84.

apalagi sekian banyaknya aksi tersebut yang akan membawa kepanikan bagi warga dan pemerintah Israel.

Meningkatnya jumlah aksi bom bunuh diri tersebut tentu saja menambah jumlah kerugian yang diderita Israel. Jumlah korban jiwa maupun luka-luka meningkat pesat. Dari sejumlah 82 korban meninggal pada 2001 meningkat menjadi 233 orang meninggal sampai dengan bulan November 2002.⁵⁷ Sedangkan sumber yang lain menyebutkan sejak September 2000 sampai dengan Agustus 2002 tercatat sekurang-kurangnya terdapat 619 korban jiwa dan 4.497 korban cedera yang diderita Israel.⁵⁸ Dan sejak 1993, tidak kurang dari 149 kali terjadi aksi yang disebut oleh pihak Palestina sebagai *Aksi Bom Syahid*.⁵⁹

Israel tidak menerima PLO, Hamas, maupun kelompok-kelompok lain sebagai suatu kelompok penekani, namun sebagai kelompok teroris yang membahayakan keamanan dan eksistensinya. Israel tidak bersedia berunding dengan kelompok tersebut karena alasan tersebut. Sampai dengan terlaksananya perjanjian Oslo, Madrid, dan lain-lain, salah satu tuntutan Israel terhadap PLO yang dianggap mewakili bangsa Palestina adalah dihentikannya tindakan terorisme yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Palestina terhadap Israel. Ketidakmampuan dan ketidakmauan PLO dalam menghentikan aksi teror tersebut merupakan salah satu faktor yang membuat tidak efektifnya segala bentuk hasil perundingan diantara kedua pihak. Selain juga karena kecilnya niatan baik dari pihak Israel untuk melaksanakannya.

Aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut beragam, baik yang berskala internasional maupun lokal. Selain melakukan aksi bom bunuh diri yang dilakukan di dalam wilayah negara Israel, mereka juga melakukan aksinya di negara-negara lain, baik terhadap instalasi milik Israel maupun negara-negara lain yang dianggap mendukung Israel dan menghalangi perjuangan mereka. Seperti menyerang kedutaan-kedutaan besar, membajak pesawat-pesawat udara komersial berbendera asing, sampai dengan melakukan penculikan

⁵⁷ Purwani D. Prabandari, *Jalur Cepat Menuju Surga*, dalam *Tempo*, 15 Desember 2002, hal. 85

⁵⁸ Ahmad Demyathi Bashori, *Jalan Hidup Syekhul Hamas*, *Op.Cit.*, hal. 13

⁵⁹ *Ibid.*

maupun penyanderaan terhadap individu-individu.⁶⁰ Mereka seringkali menyerang korban sipil, yang dianggap sebagai suatu jalan mutakhir dalam menyampaikan tuntutan mereka.

Meskipun kelompok-kelompok ini sebagian berlandaskan pada ajaran Islam, namun metode-metode yang mereka lakukan seringkali melanggar hukum Islam yang mereka yakini sebagai sebagai satu-satunya jalan hukum dan jalan penyelesaian untuk menghadapi segala macam masalah hidup. Ini menunjukkan bahwa mereka beranggapan bahwa moral, hukum, dan kepentingan dapat didistorsikan, dan kemudian dibentuk kembali di bawah tekanan.⁶¹

Tanggapan Israel terhadap kelompok tersebut juga dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan Israel dalam menghadapi mereka. Israel selalu membalas aksi-aksi teror dengan tindakan-tindakan kekerasan dan militer yang dinyatakan sebagai suatu pembalasan maupun hukuman pada pihak-pihak yang dianggap telah mengganggu Israel. Israel menggunakan dalih-dalih serangan balasan (*retaliation*), serangan sebelum diserang (*preemptive strike*), atau tindakan hukuman (*punitive action*) untuk melegalkan dan mencari dukungan atas tindakan militer mereka dalam mananggapi aksi-aksi serangan Palestina.⁶² Dan pada umumnya, baik kepada negara-negara Arab yang menentanginya maupun pada kelompok-kelompok tersebut, Israel selalu berusaha lebih dahulu menyerang dan tidak menunggu untuk diserang terlebih dahulu. Israel menganggap kekalahan perangnya meskipun hanya sekali namun akan menjadi perangnya yang terakhir dan jalan kehancuran bangsanya.

Israel tidak bersedia berunding atau bernegosiasi dengan teroris. Dalam perkembangan selanjutnya, terlaksanya perundingan-perundingan diantara pihak PLO dengan Israel terjadi sebab PLO dianggap telah melemah dalam bidang militer dan berkonsentrasi pada perjuangan diplomatik. Dan ketika terjadi intensitas serangan bom bunuh diri mulai tahun 2000, Israel kembali mensyaratkan penghentian aksi teror bila pembicaraan diplomatik masih ingin dilanjutkan. Semenjak tahun 2001, Ariel Sharon sebagai Perdana Menteri Israel tidak bersedia berunding dengan Yasser Arafat karena dianggap mendukung terorisme dengan

⁶⁰ Sukawarsini Djelantik, *Terorisme Internasional: Aktor Bukan Negara dalam Hubungan Internasional*, dalam *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, ed. Andre H. Pareira, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 178

⁶¹ Martin Kramer, *The Moral Logic of Hizballah*, dalam Walter Reich (ed), *Origins of Terrorism, Psychologies, Ideologies, Theologies, State of Mind*, dalam Sukawarsini Djelantik, *Op. Cit.*, hal. 191

⁶² Satrio Arismunandar, *Op. Cit.*, hal. 64

cara tidak menghentikannya. Dan meminta dibentuknya kabinet baru yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri sebagai wakil bangsa Palestina.

Israel sebagai sebuah negara yang berdaulat tentu saja akan berusaha untuk mengatasi segala ancaman bagi kepentingan nasionalnya. Perjuangan Palestina untuk mengusir mereka dari wilayah Palestina merupakan suatu tantangan yang sangat serius. Ketidakmampuan pemerintah Israel dalam mengatasi gerakan intifadah akan dapat berakibat buruk bagi rezim tersebut dan eksistensi Israel.

Terjadinya perang, pembangunan (perluasan) pemukiman secara terus-menerus, penyerangan disertai penangkapan dan pembunuhan terhadap aktivis pejuang Palestina, sampai dengan perundingan adalah cara-cara yang telah ditempuh Israel dalam menjaga eksistensi dan keamanannya. Namun semua itu tidaklah cukup untuk meredam gerakan intifadah dan negara-negara Arab untuk mengusir mereka dari tanah Palestina yang menurut Israel adalah tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan pada bangsa Yahudi.

Cita-cita Israel Raya diseluruh tanah Palestina merupakan tujuan yang harus terlaksana. Bangsa Yahudi percaya bahwa berdirinya negara bagi mereka adalah amanat dari Kitab Suci. Meskipun pada kenyataannya, Zionisme yang mampu mendirikan negara Israel di tanah Palestina itu bukan lagi merupakan gerakan agama namun adalah gerakan politik yang telah merubah tujuan awal dari Zionisme tersebut. Halangan dan rintangan yang dialami Yahudi tidak mampu menghalangi mereka dalam mendirikan suatu negara. Namun agaknya bangsa Yahudi tidak dapat memaksakan segala kehendaknya. Tindakan-tindakan kekerasan dan pembalasan yang dilakukan tidak pernah membuat Palestina dan negara-negara Arab mau menyerah pada kehendak Israel.

Aksi bom bunuh diri bukan lagi merupakan ancaman potensial yang dapat meledak sewaktu-waktu namun merupakan ancaman yang secara nyata dan berkelanjutan mengancam keselamatan dan keamanan penduduk Israel dan kelanjutan hidup negara Israel. Akan sulit untuk mencegah terjadinya aksi bom ini karena sulitnya untuk mendeteksi para operator bom yang dengan mudah keluar dan masuk di wilayah Israel. Tidak adanya batasan yang jelas antara wilayah Israel dengan wilayah Palestina. Sehingga memudahkan terjadinya infiltrasi bagi para operator. Orang-orang Palestina memiliki akses yang relatif mudah untuk memasuki wilayah Israel karena memang sebagian dari orang Palestina berada di dalam

wilayah Israel dan merupakan penduduk Israel. Sedangkan yang berada di kamp-kamp pengungsian sebagian bekerja di Israel sebagai tenaga kasar. Sehingga arus keluar-masuk dan hilir-mudik orang-orang Palestina di wilayah Israel merupakan pemandangan sehari-hari. Berangkat dari kenyataan tersebut, maka pemerintah Israel mulai berpikir untuk mencegah infiltrasi dengan demarkasi wilayah yang jelas sehingga menganggap perlu adanya pengepungan dan pemisahan secara jelas batas wilayah yang telah dikuasai Israel dengan yang ditempati bangsa Palestina. Dan pengawasan ketat terhadap arus keluar-masuk orang Palestina dari dan ke wilayah Israel.

Pembuatan pemisah wilayah ini meskipun bertentangan dengan cita-cita Israel Raya namun merupakan suatu bentuk preventif pragmatis demi menjaga keamanan nasionalnya. Dan mencegah semakin banyaknya korban-korban di pihak Israel. Meskipun keberhasilan strategi ini belum dapat dipastikan. Sikap-sikap Israel ini dikarenakan Israel tidak dapat berharap pada AS maupun PLO untuk dapat menekan aksi-aksi bom bunuh diri maupun ancaman-ancaman lain yang ditujukan kepadanya. Dan ini berarti Israel harus mampu menjaga keamanannya secara mandiri.



KEBIJAKAN ISRAEL DALAM MENGHADAPI MASALAH KEAMANAN

Masalah keamanan di daerah Palestina selalu menghadapi tantangan terutama semenjak munculnya tuntutan pendirian negara untuk bangsa Yahudi. Zionis melalui Kongres Zionis IV menolak tawaran wilayah di Afrika (Uganda) yang diberikan oleh Inggris sebagai pengganti Palestina. Mereka tetap meminta tanah Palestina sebagai tempat bagi pendirian negara Israel dengan alasan tanah ini adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan pada bangsa Yahudi. Hal ini berkesesuaian dengan hasil Kongres Zionis I di Basel, Swiss, pada tahun 1897. Sedangkan negara-negara Arab yang telah ada sebelumnya tentu saja menolak adanya negara Yahudi di tengah-tengah mereka. Namun segala kecaman dan ancaman itu tidak menurunkan minat Yahudi untuk mewujudkan cita-citanya.

Gangguan keamanan yang didapat oleh Yahudi sebenarnya telah ada sebelum berdirinya negara Israel. Pembatasan periode setelah proklamasi Israel, dipilih karena setelah masa tersebut, kebijakan yang dikeluarkan dianggap telah merupakan kebijakan resmi pemerintah Israel. Ancaman tersebut menurut asal datangnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dari negara-negara Arab dan dari bangsa Palestina. Sebelum pecahnya gerakan intifadah pada 1988, ancaman akan keamanan dan eksistensi Israel datang dari negara-negara Arab di sekitarnya. Tercatat setidaknya ada empat negara yang berbatasan secara langsung dengan wilayah Israel yaitu Lebanon, Suriah, Transyordania (sekarang Yordania), Mesir, dan ditambah dengan bangsa Palestina dan negara-negara Arab yang lain seperti Irak, Iran, dan Arab Saudi. Meskipun dengan intensitas yang berbeda-beda, namun pada dasarnya mereka lebih memilih untuk tidak adanya negara Israel. Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, dan Irak merupakan penentang utama negara Israel pada awalnya.

Sedangkan setelah meletusnya intifadah, ancaman keamanan secara lebih nyata datang dari pihak bangsa Palestina sendiri yang menjadi korban dari politik Israel dan peperangan Arab-Israel yang telah terjadi beberapa kali. Gerakan demonstrasi secara keras tersebut memberikan tantangan baru terhadap Israel. Apalagi setelah gerakan ini menggunakan cara-cara kekerasan yang mengarah pada gerakan militer, seperti penggunaan senjata api dan bom.

3.1 Setelah Proklamasi Kemerdekaan Israel tahun 1948

Berakhirnya pemerintahan mandat di wilayah Palestina oleh Inggris dan disusul dengan proklamasi negara Israel oleh Dewan Nasional Yahudi di Tel Aviv telah membuka lembaran baru politik internasional di wilayah tersebut. Permusuhan yang terjadi antara Arab dan Israel telah mencapai puncaknya. Segera setelah proklamasi tersebut, tentara-tentara Arab dari Suriah, Lebanon, Yordania, Irak, dan Mesir memasuki Palestina.

Kekuatan Arab dan Yahudi itu jelas tidak sebanding. Tentara Arab merupakan tentara-tentara reguler, elit, dan tentara sukarela. Legiun Arab dari Yordania yang berisi empat puluh perwira Inggris dipimpin oleh *Brigadir John Bagot Glubb Pasha*.¹ Tentara reguler Irak, Lebanon, Suriah, dan Mesir dilengkapi dengan tentara sukarela. *Tentara Pembebasan Arab*, dibawah komando mantan tentara Jerman Nazi, *Fauzi al-Kawukji*. Palestina sendiri membentuk *Tentara Yudea* dengan pimpinan *Abdul Kadir al-Hussaini*.² Arab telah siap untuk menghancurkan Israel.

Tentara Israel dipimpin oleh *Yaakov Dori* dengan komandan operasi *Kol. Yigal Yadin*. Tentara Israel ini berisi pasukan beladiri *Haganah* yang dibagi menjadi *Palmah* (pasukan elit), *Hish* (tentara reguler), dan *Mishmar* (pasukan pengawal negara). Juga pasukan pembantu wanita yang sangat membantu dalam membebaskan rekan-rekannya yang berada di garis depan. Ditambah dengan dua bekas organisasi teroris (tentara bayaran) *Irgun* dan *Komplotan Stern* yang berperang secara terpisah.³ Ditambah para sukarelawan Yahudi dari negara-negara lain yang sebagian berpendidikan militer. Tentara Israel mempunyai kelemahan karena bukan merupakan satu kesatuan yang utuh. Namun semangat mereka yang sangat tinggi dan perlengkapan yang lengkap sangat membantu mereka. Senjata, amunisi, sampai dengan pesawat terbang dibelinya dari luar negeri terutama dari Cekoslowakia dan selundupan dari AS dan negara-negara Eropa lainnya.

Perang ini membawa perubahan besar pada situasi politik di kawasan Timur Tengah. Menurut Lenczowski, setidaknya ada enam pokok-pokok perubahan penting dari perang tersebut.⁴ Pertama, Israel memperoleh kemenangan gemilang. Hanya Legiun Arab dari Yordania yang relatif masih dalam keadaan baik. Kelompok tentara lain menderita kekalahan hebat. Kedua, kemenangan ini didapat berkat semangatnya yang tinggi,

¹ George Lenczowski, *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*, Sinar Baru Algasindo, Bandung, 1993, hal. 251

² *Ibid.* hal. 252

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.* hal. 253

perlengkapan yang lebih baik, dan organisasi yang efektif dan efisien. Sedangkan kekalahan tentara Arab disebabkan karena semangatnya yang rendah, dan perselisihan politik diantara negara-negara Arab tersebut. Ketiga, Liga Arab terbukti tidak cukup memadai sebagai alat politik yang cukup nekat. Adanya persaingan antara Mesir, Yordania, dan Irak untuk menjadi hegemon kawasan telah membawa perselisihan diantara mereka. Contohnya, Mesir mendukung proklamasi Palestina merdeka oleh Mufti Agung di Gaza pada 20 September 1948, sedangkan Yordania tidak mengakuinya dan kemudian menganeksasi bagian Timur Palestina (Tepi Barat) pada 1 Desember 1948.

Keempat, adanya bantuan dari luar negeri dan solidaritas Yahudi di seluruh dunia terbukti memberikan dukungan yang luar biasa. Kemampuan intelejen Israel yang berada di Palestina maupun di luar negeri terbukti lebih hebat dibanding intelejen Arab. Kelima, pertahanan yang kurang baik terhadap perkampungan Palestina menyebabkan banyaknya pemukiman Palestina yang berhasil dihancurkan oleh Yahudi agar pemiliknya tidak kembali lagi. Peristiwa yang terkenal adalah pembantaian penduduk sipil Palestina di desa Deir Yasin pada 1948. Keenam, munculnya masalah pengungsi. Terusirnya penduduk Palestina dari perkampungannya baik karena dihancurkan oleh Israel maupun atas anjuran dari negara-negara Arab untuk mengosongkan wilayah pertempuran. Perkampungan yang mereka tinggalkan telah dikuasai oleh Israel sehingga mereka tidak berani untuk kembali. Para pengungsi ini tersebar di negara-negara Arab dan tempat-tempat lain yang dianggap aman.

Selama perang ini, Israel telah memperluas wilayahnya dari yang telah ditetapkan PBB dan tidak bersedia untuk menarik pasukannya dari wilayah pendudukan. Sikap ini didasari oleh alasan bahwa dengan penyerbuan Arab ke Israel tersebut, Arab telah merusak resolusi pembagian wilayah dan karena itu Arab tidak lagi memiliki klaim yang sah atas wilayah tersebut. Israel juga menolak resolusi PBB tentang internasionalisasi Yerusalem. Bahkan PM Ben Gurion memindahkan ibukota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 1949.⁵

Di lain pihak terdapat kecurigaan bahwa sebenarnya Israel telah mengetahui dan mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan Arab pada 1948 itu. Israel sengaja tidak mencegah serangan tersebut dan menggunakan kesempatan (perang Arab-Israel 1948)

⁵ Ibid. hal. 257

tersebut sebagai kesempatan dan alasan untuk memperluas teritorialnya.⁶ Karena tanpa melalui jalan peperangan tersebut, maka wilayah yang didapat Isreal hanya 53 persen dari keseluruhan wilayah Palestina. Namun pendapat tersebut tentu saja bertentangan dengan prinsip keamanan nasional karena tidak ada jaminan bahwa Israel pasti akan dapat memenangkan perang tersebut. Tidak ada negara yang akan mempertaruhkan teritorial dan kelangsungan hidup negaranya dengan membiarkan dirinya diserang oleh negara lain. Kecuali negara tersebut memiliki intelejen dan kekuatan militer yang sangat tangguh.

Israel juga menerapkan kebijakan imigrasi tak terbatas yang diikuti dengan pembangunan pemukiman dan sarana-saran pendukung lainnya secara besar-besaran di tempat-tempat yang telah dikuasainya. Pelaksanaan imigrasi besar-besaran ini membawa masalah sosial dan ekonomi. Penyediaan tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas sosial untuk menampung para imigran ini, serta lapangan pekerjaan yang harus disediakan untuk mengatasi masalah pengangguran yang pasti dialami oleh para imigran. Kecepatan penyediaan sarana dan prasarana ini sedikit tertinggal dibanding kecepatan imigrasi yang terjadi.

Selama hampir tiga tahun pertama gelombang imigrasi berjumlah 500.000 imigran yang masuk ke Israel. Komposisi penduduk Israel pada 1951 diperkirakan terdiri dari 1.400.000 Yahudi dan 170.000 Arab.⁷ Sekitar 110.000 imigran berada di kamp-kamp penampungan sementara dan 10 persen penduduk Yahudi tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap.⁸ Namun Israel tetap tidak menolak masuknya para imigran ini. Namun mulai diberlakukan seleksi untuk mengurangi jumlah tenaga kerja yang tidak efektif.

Penolakan Israel atas kembalinya para pengungsi Palestina ke kampung halamannya membawa dampak semakin membanjirnya imigran Yahudi yang memasuki Israel dan menempati wilayah-wilayah yang ditinggalkan penghuninya tersebut. Perselisihan antara Israel dan Arab yang tidak juga mereda mengundang banyaknya kerusuhan dan penganiayaan yang ditujukan pada orang-orang Yahudi yang ada di negara-negara Arab dan negara-negara lain. Para Yahudi di Yaman, Aden, Afrika Utara, Perancis, Libia, dan Irak tidak lagi mampu bertahan di tempatnya masing-masing.⁹ Dan mereka pun

⁶ Dra. Retna Winarni, *Pengaruh Zionisme Politik dengan Hubungan Israel-Palestina*, Universitas Jember, Jember, 1995, hal. 28-29

⁷ George Lenczowski, *Op. Cit.*, hal. 254

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.* hal. 259

beremigrasi ke Israel. Yang lebih memberatkan Israel adalah bahwa para imigran ini adalah kelompok yang sosial ekonominya rendah.

Selain penolakan terhadap kembalinya pengungsi Palestina, Israel juga keberatan atas resolusi PBB tentang internasionalisasi Yerusalem dan pembenahan garis perbatasan wilayah Israel sesuai dengan resolusi pembagian wilayah yang dikeluarkan pada November 1947. Ketiga resolusi ini diterima oleh Arab dan pihak Arab mendesak Israel untuk juga menyetujuinya. Sebenarnya momentum ini dapat digunakan oleh Israel untuk menghembuskan angin perdamaian dengan meyetujui ketiga resolusi tersebut. Namun sepertinya Israel lebih menyukai untuk mempertahankan bahkan menguasai seluruh wilayah Palestina. Israel tetap menolak negara Palestina karena dikhawatirkan akan dapat dijadikan alat pembalasan oleh negara-negara Arab atas kekalahan mereka dari Israel pada perang tahun 1948.

Sikap Israel tersebut telah membuat situasi perbatasan semakin memburuk. Walaupun Israel dan negara-negara Arab telah menyetujui gencatan senjata, namun pendirian mereka yang tidak mau saling berkompromi tersebut menyebabkan semakin hari semakin banyak terjadi pelanggaran terhadap gencatan senjata di daerah perbatasan. Bentrokan sering terjadi karena tentara perbatasan kedua pihak yang saling masuk ke daerah musuh. Selain itu, para pengembara Arab juga sering menimbulkan masalah. Mereka baik secara kelompok maupun perseorangan seringkali dengan alasan mencari pekerjaan atau mencari sanak saudaranya berusaha untuk memasuki wilayah yang dikuasai Israel.

Israel dibawah pimpinan PM Ben Gurion melakukan aksi pembalasan untuk menghentikan infiltrasi tersebut. Sekurangnya ada empat penyerbuan besar diantara serangan-serangan yang dilakukan Israel dalam menjaga perbatasannya.¹⁰ Yaitu, pembantaian di penampungan Palestina di Kibya, pembantaian di perkampungan Nahhalin di Yordania, serangan terhadap markas besar tentara Mesir di Jalur Gaza, dan penghancuran desa di wilayah Suriah di sebelah timur Galilea.

Menurut Kepala Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata Palestina, Mayor Jenderal Vagn Bennike, serangan terhadap Kibya pada 14 Oktober 1953 dilakukan oleh sekitar 250 sampai 300 tentara terlatih Israel yang menelan korban 53 korban meninggal dan rumah-rumah yang dihancurkan.¹¹ Serangan ini bersamaan dengan usaha Israel untuk

¹⁰ *Ibid*, hal. 265

¹¹ *Ibid*.

mengeringkan rawa-rawa Huleh untuk dibangun stasiun hidroelektrik di zona demiliterisasi Israel-Suriah. Karena proyek ini mengalihkan aliran sungai Yordan ke Israel, maka Suriah mengajukan protes kepada PBB. Dan akhirnya proyek ini dihentikan karena AS memutuskan untuk menghentikan bantuannya ke Israel sampai proyek ini diakhiri.

Pada 17 Maret 1954, kelompok tak dikenal menembak mati sebelas orang Israel dalam bus dekat Beersheba.¹² Israel menuduh Yordania adalah sponsor serangan tersebut. Sebelas hari setelah peristiwa tersebut, tepatnya pada 28 Maret 1954, Israel sepertinya berusaha membalas dengan mengirimkan dua kompi tentara Israel untuk menyerang Nahhalin di wilayah Yordania. Mengambil korban sembilan orang Yordania meninggal dan sembilan belas lainnya terluka.¹³

Perbatasan Israel-Mesir pun tidak luput dari aksi kekerasan. Pada 28 Februari 1955, pasukan Israel menyerang markas garnizun tentara Mesir. Membunuh 38 dan melukai 31 orang Mesir.¹⁴ Serangan besar lain dilakukan Israel pada 11 Desember 1955 di wilayah Suriah. Satu detasemen Israel menyerang pos-pos luar perbatasan dan menghancurkan sebuah desa, menyebabkan 49 korban jiwa. Pemerintah Israel menyatakan bahwa serangan ini adalah pembalasan atas kekejaman pos-pos perbatasan Suriah atas para nelayan Israel.¹⁵

Sementara itu, dunia Arab juga berusaha memperkuat militernya. Mereka mulai berpaling dari AS karena menurut mereka AS lebih mendukung kebijakan Israel. Karena itu negara-negara Arab berusaha mencari alternatif lain. Uni Soviet yang saat itu merupakan salah satu kekuatan besar memperlihatkan diri sebagai negara yang siap membantu Arab dalam militer maupun politik. Apalagi, Timur Tengah merupakan suatu wilayah yang relatif masih bebas dari pengaruh kapitalisme Blok Barat pimpinan AS sehingga dapat dijadikan sebagai daerah pengaruh bagi kekuatan komunis. Maka mulailah terjadi kedekatan antara Uni Soviet dengan negara-negara Arab. Meskipun demikian, Uni Soviet tidak pernah benar-benar memusuhi Israel.

Kedekatan negara-negara Arab terutama Mesir pada Uni Soviet dan satelit-satelitnya ditambah dengan sempat putusya hubungan diplomatik Israel-Uni Soviet pada 1953 membuat Israel tidak lagi dapat menjaga netralitasnya dalam berhubungan dengan

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

AS dan Uni Soviet. Bantuan-bantuan ekonomi, teknik, dan militer blok Uni Soviet pada negara-negara Arab menyadarkan Israel bahwa ia hanya bisa mengandalkan AS. Selama ini hanya AS yang secara rutin memberikan bantuannya baik secara ekonomi, militer, maupun dalam bentuk lain kepada Israel dengan jumlah yang besar. Namun kondisi politik dalam negeri AS sedang mengalami perubahan akibat menangnya partai Republik dalam pemilu tahun 1952. Berbeda dengan partai Demokrat yang lebih memihak Israel, Presiden Eisenhower (Republik) memilih untuk bersikap lebih netral dengan memperkenalkan "Politik Bersahabat dan Tidak Memihak di Timur Tengah."¹⁶ Bahkan Israel pernah memprotes pernyataan Asisten Menlu AS *Henry A. Byroade* yang mengkritik masalah kebijakan imigrasi Israel yang tak terbatas.

Negara-negara Arab tidak hanya memusuhi Israel secara militer saja. Tetapi lewat cara-cara yang lain. Arab berusaha mengucilkan Israel dengan beberapa cara diantaranya adalah embargo ekonomi, pelarangan penerbangan yang membawa orang Israel melintasi wilayah udara Arab, memberi pilihan bagi para mitra usaha untuk melakukan hubungan dengan Arab dan meninggalkan Israel atau berhubungan dengan Israel tapi tidak dengan Arab, termasuk menghalangi segala bentuk pelayaran dari dan menuju Israel yang melalui *Terusan Suez* yang dilakukan oleh Mesir. Segala pelayaran dari dan menuju Israel berpusat di *Teluk Aqaba* yang terdapat *Laut Merah* akan melalui Terusan Suez. Karena itu dengan ditutupnya Terusan tersebut akan dapat mematikan pelayaran Israel.

Mesir merupakan potensi lawan terkuat pada saat itu. Dibawah pimpinan Presiden Gamal Abdul Nasser, Mesir merupakan salah satu negara yang berani menentang dunia Barat dan Israel. Mesir melakukan nasionalisasi terhadap Terusan Suez pada Juli 1956, sehingga semua pelayaran yang melewati terusan tersebut harus mendapatkan izin dari Mesir.¹⁷ Tindakan Mesir ini tentu saja memancing reaksi negatif dari negara-negara Barat. Inggris dan Perancis merupakan negara yang paling menentang politik Mesir ini. Karena akan menghalangi perdagangan internasional. Mesir juga mampu menyatukan kekuatan militer antara Mesir, Suriah, dan Kerajaan Arab Saudi dibawah pimpinan Mesir melalui persetujuan militer.¹⁸ Sehingga Israel khawatir bila Mesir akan mendapatkan hegemoni regional dan akan mengepung Israel. Kekhawatiran ini sangat beralasan karena

¹⁶ *Ibid.* hal. 268

¹⁷ *Ibid.* hal. 271

¹⁸ *Ibid.*

dunia Arab sangat membenci Israel terutama setelah kekalahan Arab pada perang tahun 1948 dan sikap keras Israel terhadap negara-negara Arab disekitarnya.

Akhirnya pasukan Israel menyerbu Mesir pada 30 Oktober 1956. Penjelasan resmi Israel saat itu menyatakan bahwa serangan ini merupakan aksi polisi lokal untuk memberantas konsentrasi *fedayin* (pejuang-pejuang Arab-Palestina) yang ada di Jazirah Sinai yang merupakan wilayah Mesir. Tetapi dalam kenyataannya, serangan ini merupakan tindakan preventif yang dilakukan oleh Israel untuk mencapai beberapa tujuan. Yaitu, menghancurkan potensi militer Arab sebelum menjadi lebih kuat, menurunkan prestise Presiden Nasser dikawasan Timur Tengah, memaksa Mesir untuk membuka Terusan Suez bagi pelayaran Israel, dan berusaha membuka kembali usaha penyelesaian konflik Israel-Arab.¹⁹

Operasi militer ini dapat berjalan dengan sukses. Israel mampu menguasai Jalur Gaza yang sebelumnya diduduki oleh Mesir, merebut benteng Mesir di *Sharm al-Shikh*, dan menduduki *Sela Tiran*. Israel juga berhasil menguasai sebagian jazirah Sinai dalam penyerbuan ini. Serangan ini semakin menyulitkan Mesir karena Inggris dan Perancis juga melakukan aksi militer terhadap Mesir. Tentara Mesir sebanyak 6000 orang ditawan oleh Israel.²⁰ Sedangkan Israel hanya kehilangan 171 tentara yang meninggal dan 4 lainnya ditawan Mesir.²¹ Perbatasan diantara keduanya juga menjadi lebih tenang. Selain karena tentara Mesir dan feyadin di daerah perbatasan telah dihancurkan, juga karena ditempatkannya pasukan perdamaian PBB di perbatasan. Teluk Aqaba berhasil dikuasai Israel namun pada saat itu belum berhasil membuka Terusan Suez bagi pelayarannya.

Desakan internasional agar Israel meninggalkan daerah-daerah Mesir yang dikuasainya direspon positif oleh Israel. Namun tentu saja bukan dengan tanpa syarat. Israel mengajukan syarat utama yaitu dibukanya Terusan Suez dan Teluk Aqaba bagi pelayaran Israel dan internasional. Bila syarat tersebut dipenuhi maka Israel bersedia untuk menarik pasukannya dari daerah Sinai dan mengembalikannya kepada Mesir. Namun perundingan antara kedua pihak yang bertikai pada kenyataannya sulit tercapai sehingga Israel menarik keinginannya untuk tawar-menawar meskipun dalam posisi yang menguntungkan.

Gerakan Nasser yang mulai memasuki Yordania menjadi ancaman lain bagi Israel. Selama ini Yordania hanya memberikan ancaman yang tergolong ringan bagi Israel.

¹⁹ *Ibid.* hal. 272

²⁰ *Ibid.* hal. 273

²¹ *Ibid.*

Sehingga Israel khawatir bila terjadi penggulingan kekuasaan atau perubahan politik Yordania yang pro-Nasser akan mengancam negara Israel. Yordania adalah salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Israel sehingga rawan bagi wilayah Israel bila Yordania juga memusuhinya secara keras. PM Ben Gurion menyatakan bahwa bila terjadi perubahan status Kerajaan Yordania maka Israel akan harus memaksakan demiliterisasi wilayah barat Yordania hingga ke sungai Yordan.²² Selain dari Mesir, Yordania juga mendapat ancaman infiltrasi dari Irak yang kala itu dipimpin oleh *Hashimiyah*. Irak adalah satu-satunya negara Arab yang terlibat dalam perang tahun 1948 yang tidak menandatangani perjanjian gencatan senjata. PM Ben Gurion juga menyatakan bahwa bila pasukan Irak memasuki wilayah Yordania maka Israel akan “bebas bertindak.”²³

Israel juga meningkatkan kemampuan militernya yang mengarah pada kekuatan nuklir. Pada tahun 1956, Israel menerima *siklotron* (pemecah atom) pertama dari Universitas Cornell.²⁴ Dan pada 1960 diperkirakan para ahli Israel akan mampu memecahkan nuklir. Israel juga telah membuat pabrik nuklir di Rehovot. Namun Israel membantah bila nuklir ini digunakan untuk keperluan militer melainkan untuk keperluan sipil. Namun yang mengagetkan negara-negara Arab bahwa pada 5 Juli 1961 Israel mampu meluncurkan roket meteorologi antariksa pertamanya.²⁵

Itu berarti Israel telah mampu memproduksi tenaga nuklir. Tentu saja, kemampuan ini sangat mengkhawatirkan bangsa-bangsa Arab. Tidak hanya yang berbatasan langsung dengan Israel namun juga yang tidak berbatasan langsung seperti Irak. Karena selama ini kebijakan Israel dalam masalah keamanan yang represif dan cenderung bermusuhan dengan negara-negara tetangganya.

Pada periode awal pembentukan negara Israel, permasalahan keamanan yang dihadapinya adalah pengakuan dan kedaulatan yang mendapat ancaman dari negara-negara sekitarnya. Tercatat beberapa kali negara-negara Arab maupun non-Arab disekitar Israel yang mayoritas penduduknya beragama Islam menyerang Israel. Mereka tidak mengizinkan adanya negara bagi Yahudi terutama karena alasan teologis.

Serangan terhadap Israel ini dapat dikategorikan sebagai ancaman pada tingkat negara. Maksudnya, ancaman tersebut berasal dari negara-negara yang telah berdaulat terhadap negara lain yang (baru saja) berdaulat. Ancaman yang ditimbulkan bersifat

²² *Ibid.*, hal. 274

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

mengancam eksistensi hidup keseluruhan komponen negara. Meskipun Israel saat itu tidak mendapatkan pengakuan dari negara-negara Timur Tengah, namun pengakuan dari beberapa negara besar yang berpengaruh seperti AS dan Uni Soviet memiliki kekuatan yang lebih besar. Perjuangan Israel dalam memperoleh dan mempertahankan kedaulatannya ini cukup berat karena mendapat penolakan sampai terjadinya perang dengan negara-negara tetangganya.

Keinginan Israel merdeka sangat kuat. Sehingga meskipun harus menghadapi peperangan dengan negara-negara lain, tetap merupakan kebulatan yang tidak dapat ditawar. Semangat dan kebulatan tekad tersebut dapat dilihat dalam perang tahun 1948. Israel yang baru saja memproklamasikan dirinya harus menghadapi serangan beberapa negara yang lebih mapan. Diatas kertas tanpa memperhitungkan hal-hal non teknis, dengan kekuatan yang ada seharusnya pasukan Arab tersebut yang terdiri dari pasukan elit dan reguler mampu menghancurkan Israel. Namun ternyata pasukan Arab mampu dihancurkan oleh laskar-laskar Israel yang bersemangat tinggi dan disertai perlengkapan yang memadai. Bahkan Israel mampu memperluas wilayahnya dalam perang ini. Demikian pula pada perang-perang setelahnya.

Dalam menghadapi ancaman tersebut, kebijakan Israel adalah sebagai berikut. Pertama, mempersiapkan kekuatan militer dan para-militer mulai dari pasukan sampai dengan perangkat militernya. Israel juga melibatkan kelompok-kelompok yang sebelumnya merupakan tentara bayaran ataupun teroris seperti Irgun dan Stern. Kebijakan ini tentu saja ditujukan untuk menghadapi serangan dari luar negeri yang berpotensi menghancurkan negara Israel. Pada tahun-tahun selanjutnya, Israel tetap berusaha meningkatkan kemampuannya. Kebijakan ini ditujukan untuk mengantisipasi serangan maupun ancaman lainnya yang datang dari luar. Sampai dengan pada era 1960-an dimana Israel mampu meluncurkan roket meteorologi yang berarti ia telah mencapai tahap kemampuan nuklir.

Kedua, melalui jalur diplomasi. Israel melakukan diplomasi yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Terlepas dari proses pembentukannya, Israel cukup mendapatkan pengakuan dari negara-negara yang telah berdaulat. Ini disebabkan karena gerakan zionisme mampu menciptakan suatu citra sebagai suatu gerakan nasionalis yang humanis. Gerakan yang berusaha mengumpulkan suatu bangsa yang tercerai-berai karena mendapatkan berbagai tekanan mulai dari perbudakan, pengusiran, sampai dengan pembantaian. Propaganda ini cukup berhasil.

Terbukti dengan lahirnya Israel dan pengakuan tersebut. Israel mengumandangkan dirinya sebagai suatu negara yang demokratis, menjunjung persamaan-kebebasan dan keadilan, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan.²⁶

Keberhasilan Israel dalam bidang diplomasi tidak terlepas dari kemampuan para diplomatnya. Perwakilan Israel di dunia internasional terkenal dengan sikapnya yang moderat dan cerdas yang merupakan sifat “warisan” dari Zionisme. Mereka tidak memaksakan untuk meraih semua kepentingan yang telah dirumuskan secara keseluruhan. Lebih baik menurut mereka untuk hanya mendapatkan satu tujuan daripada tidak sama sekali. Sikap fleksibel juga ditunjukkan dalam merespon gagasan dan tuntutan dari pihak lain. Sikap ini berbeda dengan perwakilan negara-negara Arab yang cenderung kaku dan selalu menolak gagasan-gagasan serta tuntutan-tuntutan dari pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan oleh ngaranya masing-masing.

Contohnya dalam menyikapi resolusi PBB tahun 1947 tentang pembagian wilayah antara Israel dan Palestina. (Zionis) Israel mau menerimanya karena meski hanya mendapat 53 persen, namun tanah tersebut cukup untuk memulai berdirinya negara Israel. Sedangkan negara-negara Arab termasuk penguasa bangsa Palestina saat itu menolak mentah-mentah resolusi tersebut. Sikap moderat ini mendapat tanggapan yang baik dari pihak internasional. Israel seakan-akan bersedia mengalah dengan menerima bagiannya dan mengakui bagian yang lain adalah hak dari Palestina. Sedangkan negara-negara Arab meskipun dengan alasan yang kuat untuk menolak, namun terlihat seperti serakah dengan menginginkan keseluruhan tanah itu. Kasus seperti inilah yang mampu menaikkan citra bangsa Yahudi dan melemahkan citra bangsa Arab.

Ketiga, Israel juga demikian keras terhadap negara-negara yang dianggapnya menjadi ancaman terutama Mesir dan Irak yang memiliki kekuatan militer yang cukup kuat. Misalnya terhadap Mesir dibawah Presiden Nasser yang berusaha menjatuhkan Israel dengan cara melakukan nasionalisasi terhadap Terusan Suez dan menutup semua jalur pelayaran menuju Teluk Aqaba yang merupakan pusat jalur perdagangan Israel. Israel merespon dengan memutuskan untuk menyerang Mesir. Dari serangan itu, Israel mampu menguasai Sinai dan Terusan Suez. Sedangkan Yordania yang juga merupakan negara

²⁶ Avi Shlaim, *The Significance of Madrid Treaty*, dalam Davis, M. Jane, ed, *Politics and International Relation in the Middle East*, Department of International Politics University of Wales, Edward Eigar, Aldershot, 1995

besar dikawasan tersebut terkesan lebih lunak terhadap Israel dan bukan merupakan ancaman yang begitu mengkhawatirkan baginya.

Persaingan ketiga negara (Mesir, Irak, dan Yordania) ini untuk menjadi hegemon di kawasan Timur Tengah ini justru membawa berkah bagi keamanan Israel. Karena persaingan ini membawa perpecahan di kawasan tersebut. Meskipun pada dasarnya hampir semua negara di kawasan ini menolak berdirinya Israel, namun mereka tidak cukup memiliki persatuan untuk menghancurkannya. Dan ketidakpaduan ini pada periode berikutnya mampu digunakan dengan baik oleh Israel.

Keempat, kebijakan tentang imigrasi. Kebijakan lain yang sangat berpengaruh pada situasi keamanan dan kelangsungan Israel adalah kebijakan untuk mendatangkan imigran secara besar-besaran dari luar negeri. Kedatangan imigran ini pada masa awal kemerdekaan Israel cukup membantu masalah keamanan. Karena semakin banyak imigran yang datang maka keinginannya untuk menambah jumlah personel militer dan para militer dapat terpenuhi. Hal ini akan memperkuat kekuatan militernya.

Imigran ini juga akan memenuhi tempat-tempat kosong yang ditinggalkan oleh pemiliknya (Arab-Palestina) yang telah dikuasai Israel melalui perang-perang yang dilakukannya. Israel menggambarkan derasnya arus imigran ini merupakan bukti klaim zionisme yang merindukan suatu nasion untuk bangsa Yahudi yang tersebar di seluruh dunia. Mereka menerima masuknya imigran dikarenakan besarnya tuntutan dari orang-orang Yahudi baik yang berada di dalam negeri maupun dalam negeri untuk berkumpul bersama sebagai suatu "keluarga" di tanah yang telah dijanjikan-Nya pada bangsa Yahudi.

Namun sebenarnya salah satu tujuan kebijakan imigrasi ini selain memenuhi tanah kosong untuk memenuhi salah satu syarat terbentuknya negara yaitu adanya penduduk, adalah untuk dapat memenangkan klaim atas tanah Palestina. Diharapkan pada masa mendatang ketika bangsa (imigran) Yahudi telah memenuhi tanah tersebut dan berjumlah lebih banyak dari penduduk sebelumnya (Palestina dan Arab) maka apabila diadakan referendum (atau bentuk yang lain) akan dapat dimenangkan oleh Israel. Karena di wilayah-wilayah tersebut lebih banyak bangsa Yahudi yang memilih kelangsungan Israel daripada bangsa Palestina dan sedikit Arab yang menolak Israel.

Keberhasilan baik secara militer maupun politik yang diraih Israel ini tidak terlepas dari keberhasilan zionisme. Propaganda dan provokasi yang dilakukan Israel maupun gerakan zionisme itu telah menumbuhkan semangat zionisme yang lebih dari hanya semangat keagamaan, namun juga nasionalisme Yahudi yang tinggi. Bahkan

keberhasilan zionisme ini lebih besar dibandingkan dengan keberhasilan revolusi Bolshevik di Rusia yang melahirkan negara Komunis Uni Soviet ataupun Ultra-Nasionalis (Nazi) di Jerman dan negara-negara Poros sebelum Perang Dunia II.

Kekuatan Zionisme ini disebabkan karena beberapa sebab. Pertama, faktor sejarah yaitu pengalaman nasib (penderitaan) tidak beruntung di masa lalu baik yang berasal dari biblikal (perbudakan Mesir), masa setelah Masehi (penjajahan, pengusiran, maupun pembantaian oleh Romawi, Spanyol, dan lain-lain) maupun pada era modern (pengusiran, pengejaran, dan pembantaian di Rusia, Jerman, dan Italia, dan lain lain).²⁷

Kedua, alasan politik. Dengan segala penderitaan itu, mereka menganggap seluruh bangsa di dunia membenci dan memusuhi mereka. Karena itu lebih baik bangsa yang tercerai berai ini dikumpulkan sebagai suatu negara daripada harus mengalami penderitaan yang lain di negara orang lain seperti yang diungkapkan oleh Herzl.²⁸ Disamping itu, sebagian besar orang-orang Yahudi sendiri memiliki nasionalisme yang tinggi. Walaupun merupakan warga negara suatu negara yang berdaulat namun tetap merasa sebagai bangsa Yahudi yang merindukan untuk pulang ke "kampung halamannya". Sehingga zionisme sebagai gerakan politik nasionalisme disambut luas oleh orang-orang Yahudi di seluruh dunia.

Ketiga, alasan teologis. Bahwa tanah Palestina atau juga disebut tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan Tuhan pada Bangsa Yahudi yang membebaskan mereka dari perbudakan oleh bangsa Mesir melalui Nabi Musa sebagaimana tertulis dalam Kitab Suci mereka.²⁹ Dan alasan terakhir inilah yang begitu kuat dipegang oleh orang Yahudi dan menjadi kekuatan spiritual yang mendasar mulai sebelum berdirinya negara Yahudi yang menyebabkan gerakan ini lebih hebat dibandingkan dengan Komunisme di Rusia ataupun Nasionalisme di Jerman. Selain alasan psikologis dan politis yang juga kuat.

Secara umum, kebijakan-kebijakan yang ditempuh Israel pada periode awal kelahirannya telah berhasil dilaksanakan. Ini dapat dilihat hasil yang dicapai Israel sejalan dengan tujuan nasional yang dicanangkan. Dimulai dari kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan, mendapatkan pengakuan, mendatangkan imigran, memperkuat militer, sampai dengan memperluas wilayahnya. Israel mampu menjalankan politik luar negerinya yang merupakan salah satu cara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya.

²⁷ *lih.* Bab II

²⁸ *lih.* Bab II

²⁹ *lih.* Bab II

3.2 Periode pasca Perang Arab-Israel tahun 1967

Pada tahun 1967, kembali pecah peperangan antara Israel dengan Arab seperti pada tahun 1948. Pada perang selama enam hari ini, hampir seluruh wilayah Palestina menurut resolusi PBB no. 181 tahun 1947 telah dikuasai oleh Israel ditambah dengan Dataran Tinggi Golan (Golan Heights) yang sebelumnya adalah wilayah Suriah dan Gurun Sinai yang merupakan wilayah Mesir. Khusus untuk wilayah Tepi Barat, Israel tetap mempertahankan wilayah tersebut dengan dalih bahwa Tepi Barat adalah termasuk wilayah *Samaria* dan *Yudea* yang dijanjikan Kitab Suci pada bangsa Yahudi. PBB melalui resolusi DK-PBB no. 242 tahun 1967 telah menghimbau Israel untuk mengembalikan tanah Palestina diluar resolusi tahun 1947 dan ditukar dengan pengakuan hidup bangsa Yahudi (negara Israel) dan jaminan keamanan dari negara-negara Arab.³⁰

Resolusi ini merupakan penerjemahan dari ide *Land for Peace*.³¹ Yang secara sederhana dapat diartikan bahwa tanah yang seharusnya tidak dimiliki oleh Israel (yaitu tanah yang menurut resolusi PBB no. 181 tahun 1947 adalah tanah milik bangsa Palestina) dikembalikan pada Palestina untuk mendirikan negara Palestina dan Israel akan mendapatkan pengakuan dari bangsa Arab sebagai kompensasinya. Namun Israel menolaknya dengan dua alasan. Pertama, alasan biblikal seperti yang telah disebutkan diatas. Kedua, Israel juga menolak mengembalikan tanah tersebut karena Israel tidak menginginkan adanya negara Palestina merdeka menjadi tetangga mereka.

Peperangan kembali terjadi pada bulan Oktober tahun 1973. Mesir dibawah Presiden Sadat yang memerintah sejak 1970 bersama dengan Suriah yang dipimpin Presiden Assad menyerang Israel melalui perbatasannya masing-masing. Operasi militer yang disebut Operasi Badr ini pada awalnya cukup berhasil memukul pasukan Israel.³² Setidaknya yang berada di wilayah Golan dan Sinai yang diduduki Israel. Dalam lima hari pertama serangan, Mesir dan Suriah berhasil memporakporandakan dan memaksa mundur pasukan Israel. Dataran Tinggi Golan dapat dibebaskan sekitar setengahnya, dan di Sinai, pasukan Israel mundur sampai mendekati Terusan Suez.

Keberhasilan pasukan Mesir dan Suriah selain dikarenakan penyusunan rencana yang baik tapi juga karena disertai dengan semangat yang tinggi. Semangat tinggi ini salah

³⁰ M. Hamdan Basyar, Politik Israel Terhadap Palestina, Jurnal Ilmu Politik 12, Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 54

³¹ M. Hamdan Basyar, Politik Israel Terhadap Palestina, Jurnal Ilmu Politik 12, Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 54

³² Hassanein Heikal, Di Kaki Langit Gurun Sinai, penerj. H. Mahbub Djunaidi, PT. Al Maarif, Bandung, 1979, hal 265

satu faktornya karena dipicu oleh nasionalisme yang kuat. Karena pada perang 1967, kedua negara tersebut, terutama Mesir, merasa dipermalukan karena tidak mampu menjaga keutuhan teritorialnya.³³ Keutuhan territorial adalah salah satu kepentingan nasional tiap negara yang tidak dapat ditawar lagi. Serangan kali ini bertujuan untuk membebaskan kedua wilayah tersebut dari kekuasaan Israel. Hal ini menyebabkan meskipun Mesir memiliki kesempatan untuk lebih maju lagi dan masuk ke wilayah Israel, namun kesempatan itu tidak digunakan oleh Mesir.

Keberhasilan memukul mundur Israel dari kedua wilayah tersebut tidak dapat dipertahankan setelah lima hari tersebut. Israel menyerang balik posisi pasukan Mesir di Sinai dan Suriah di Golan. Suriah mengalami kerugian yang lebih besar dibanding Mesir. Hal ini disebabkan karena Israel terlebih dahulu menyerang Suriah di Golan yang dianggap sebagai daerah yang lebih strategis karena merupakan daerah perbukitan yang dapat dijadikan benteng alam.³⁴ Sedangkan ketika Israel menyerang Mesir di Sinai, tidak lama kemudian terjadi gencatan senjata.

Keberhasilan Israel memukul mundur serangan Mesir dan Suriah ini erat kaitannya dengan bantuan militer dari AS. Kurang dari dua minggu semenjak serangan dimulai, AS mulai mengirimkan bantuan militernya pada Israel. Bahkan faktor utama keberhasilan Israel pada perang kali ini adalah keberhasilan Israel untuk meyakinkan AS untuk mengirim bantuan tersebut. Kondisi militer Israel saat itu kurang siap karena mendapat serangan secara tiba-tiba dan bangsa Yahudi sendiri sedang menyambut salah satu hari besar Yahudi yaitu hari raya Yom Kippur, karenanya, serangan ini disebut pula perang Yom Kippur. Ketidaksiapan ini menyebabkan dalam beberapa hari awal saja Israel kehilangan ratusan tank dan pesawat tempur.³⁵ Semakin menipisnya kekuatan Israel ini mengharuskan Israel meminta bantuan pada AS. Bahkan Henry Kissinger, seorang pejabat kementerian luar negeri AS saat itu menyatakan bahwa kekuatan militer Israel saat itu hanya dapat bertahan selama sembilan hari, dan selanjutnya, Israel akan meminta bantuan AS.³⁶

AS bersedia memberi bantuan pada Israel dengan motif-motif tertentu. Namun yang cukup menentukan adalah karena kehadiran Uni Soviet yang merupakan pesaing AS di kawasan tersebut. Semenjak merenggangnya hubungan Israel-Uni Soviet, maka Uni

³³ *Ibid.*, hal. 336

³⁴ *Ibid.*, hal. 277

³⁵ *Ibid.*, hal. 336

³⁶ *Ibid.*

Soviet menjalin kerjasama yang kuat dengan beberapa negara di Timur Tengah termasuk Mesir dan Libya. Kekuatan militer yang dimiliki negara-negara di kawasan itu (kecuali Israel) sebagian besar berasal dari Uni Soviet. AS mengkhawatirkan kehadiran Uni Soviet di kawasan ini akan merubah perimbangan pengaruh diantara kedua negara. AS yang terlebih dahulu hadir namun kurang peduli pada tuntutan Arab untuk menekan Israel khawatir pihak Uni Soviet menggunakan isu Israel ini untuk memperkuat pengaruhnya di negara-negara Arab. AS beranggapan bila Israel tidak dibantu, maka kehancuran Israel akan menyisakan negara-negara Arab yang pro pada Uni Soviet. Hal ini tentu tidak diinginkan oleh AS.

Hampir bersamaan dengan perang Oktober 1973 itu, negara-negara Arab juga melakukan embargo minyak pada negara konsumen minyak. Embargo ini berupa pengurangan produksi minyak yang disertai kenaikan harganya.³⁷ Tindakan itu ditujukan pada negara-negara yang mendukung Israel baik secara politik maupun militer. Pihak yang paling merasakan dampak embargo ini adalah AS, Jepang, dan Eropa Barat sebagai konsumen utama minyak Arab. Arab dengan senjata minyaknya tidak secara langsung berhadapan AS, namun berusaha menekan Eropa dan Jepang yang merupakan konsumen minyak terbesar dengan ketergantungan mencapai 75 persen kebutuhan energi dari Arab.³⁸ Arab menggunakan Jepang dan Eropa untuk mempengaruhi AS agar tidak lagi membantu Israel.³⁹

Sedangkan bagi AS, Raja Faisal yang memimpin kerajaan Arab Saudi sekaligus embargo ini pada tanggal 20 Oktober 1973 mulai memberlakukan penangguhan pengiriman 638.500 barel minyak yang sedianya akan dijual ke AS. Namun penangguhan minyak dari Arab Saudi ini hanya 4 persen dari kebutuhan minyak AS secara keseluruhan.⁴⁰ Sehingga AS yang banyak memiliki cadangan minyak tidak terlalu terpengaruh secara langsung dengan embargo ini.

Bahkan, AS melalui perusahaan-perusahaan minyaknya yang berjumlah sekitar 60 persen dari seluruh perusahaan minyak yang beroperasi di Jazirah Arab dan Persia dapat mengeruk keuntungan sebesar-besarnya atas menurunnya suplai dan kenaikan harga yang terjadi.⁴¹ Posisi AS sebagai "makelar" justru membuatnya mendapatkan keuntungan

³⁷ *Ibid.*, hal. 353

³⁸ Robert Lacey, *Kerajaan Petrodollar Saudi Arabia*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1986, hal. 506

³⁹ Hassanain Heikal, *Loc. Cit.*, hal. 349

⁴⁰ Robert Lacey, *Loc. Cit.*, hal. 505

⁴¹ *Ibid.*, hal. 339

dari embargo ini. Sedangkan krisis energi yang terjadi di AS mulai 1972 itu sebenarnya merupakan permasalahan internal di AS sendiri antara perusahaan minyak dengan kelompok pencinta lingkungan.

Tujuan embargo ini untuk menunjukkan kemampuan Arab dalam mempengaruhi politik dunia. Senjata minyak ini diharapkan dapat ikut menentukan politik internasional.⁴² Mereka ingin menegaskan bahwa dunia Arab memiliki suatu aset yang dapat digunakan sebagai senjata untuk mengingatkan dunia akan tuntutan mereka, yaitu enyahnya Israel. Isi dari resolusi yang memulai embargo ini cukup jelas meskipun tidak dapat tercapai. Yaitu, embargo berlaku sampai saat rencana tata waktu pengosongan semua daerah arab yang diduduki (oleh Israel), termasuk Yerusalem bagian Arab, disetujui secara internasional.⁴³ Ini berarti tujuan akhir dari embargo ini adalah hengkangnya Israel dari kawasan tersebut.

Dalam bidang pemukiman, Israel tetap konsisten dengan kebijakan imigrasi dan perluasan wilayahnya. Setelah usainya perang tahun 1967 tersebut, Israel menganggap bahwa cita-cita Israel Raya bakal terwujud. Karena daerah-daerah baru yang didudukinya merupakan daerah kosong yang ditinggalkan oleh pemiliknya (orang Palestina). Pemerintah Israel membagi tanah di wilayah tersebut menjadi tiga klasifikasi berdasarkan status kepemilikan.⁴⁴ Pertama, tanah pribadi yang dimiliki oleh orang Palestina (atau Arab). Kedua, tanah pribadi yang dimiliki oleh orang Yahudi. Ketiga, adalah tanah negara, yaitu semua tanah yang berada diluar kedua kategori sebelumnya.

Daerah-daerah kosong yang termasuk dalam kategori tanah negara tersebut harus segera diisi oleh para imigran Yahudi. Pemerintah Israel terus-menerus membangun pemukiman baru ditempat-tempat tersebut. Meskipun tidak jarang tanah orang Palestina juga diserobot untuk dibangun rumah oleh orang Yahudi. Salah satu usulan pembangunan pemukiman yang terkenal saat itu adalah *Rencana Allon*. Suatu proposal yang disodorkan oleh salah seorang menteri Israel saat itu yaitu *Yigal Allon*.⁴⁵

Salah satu yang diusulkan oleh Allon adalah pembangunan pemukiman di daerah pinggiran wilayah yang berfungsi selain untuk pemukiman juga untuk pengaman. Pemukiman ini akan digunakan sebagai “pagar hidup” (pembatas) antara wilayah Israel

⁴² *Ibid.*, hal. 351

⁴³ *Ibid.*, hal. 355

⁴⁴ M. Hamdan Basyar, *Politik Israel Terhadap Palestina*, Jurnal Ilmu Politik 12, Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 54

⁴⁵ M. Hamdan Basyar, *Politik Israel Terhadap Palestina*, Jurnal Ilmu Politik 12, Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 54

dengan negara-negara tetangganya seperti Lebanon, Suriah, dan Yordania.⁴⁶ Pemukiman tersebut diisi oleh para tentara Israel dan penduduk Israel yang telah mendapat pelatihan menjadi para-militer yang dapat membantu mempertahankan wilayahnya dari serangan dari tetangganya.⁴⁷

Walaupun secara resmi Rencana Allon ini tidak pernah menjadi kebijakan resmi pemerintah Israel, namun pembangunan pemukiman yang dilakukannya sepertinya mirip dengan proposal Allon tersebut. Pembangunan pemukiman diperluas memasuki Jalur Gaza, Tepi Barat, dataran tinggi Golan, daerah Sinai, dan Yerusalem. Meskipun tidak keseluruhan bagian dari wilayah-wilayah tersebut yang dibangun pemukiman, namun pembangunan ini telah lebih banyak lagi mendesak wilayah yang didiami Palestina. Terutama di wilayah Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem.

Pada 1982 Departemen Pemukiman Organisasi Zionis bekerja sama dengan pemerintah Israel dan IDF merumuskan suatu perencanaan pemukiman yang mempunyai dua sasaran.⁴⁸ Sasaran jangka pendek adalah dapat dimukimkannya 100.000 imigran antara tahun 1982-1987. Sasaran kedua dalam jangka panjang (sampai sekitar tahun 2010) dapat dimukimkan sekitar 500.000 Yahudi di Jalur Gaza. Departemen tersebut juga telah menyiapkan 165 pemukiman di Tepi Barat yang akan menampung sampai 1.300.000 orang Yahudi dalam jangka waktu sampai 30 tahun mendatang.⁴⁹

Menurut Biro Pusat Statistik Israel, pada akhir 1986, diperkirakan ada 65.000 orang Yahudi yang akan tinggal di Tepi Barat. Dengan lokasi 120 pemukiman. Sekitar 13.500 yang telah ditempati dan 4000 rumah lainnya siap menunggu imigran Yahudi.⁵⁰ Di sekitar Green Line, dibangun pemukiman sub-urban yang telah didahului dengan pembangunan segala infrastrukturnya.

Pemerintah Israel menginginkan persebaran penduduk Yahudi di wilayah-wilayah tersebut (Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem) dapat terlaksana secepat mungkin. Tujuan akhir dari rencana pemukiman seperti pernah disebutkan sebelumnya adalah bahwa klaim dari Palestina atas wilayah tersebut akan dapat dimentahkan karena wilayah-wilayah tersebut telah ditempati oleh mayoritas Yahudi sehingga orang-orang

⁴⁶ M. Hamdan Basyar, *Politik Israel Terhadap Palestina*, Jurnal Ilmu Politik 12, Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 54

⁴⁷ M. Hamdan Basyar, *Politik Israel Terhadap Palestina*, Jurnal Ilmu Politik 12, Gramedia, Jakarta, 1991

⁴⁸ M. Hamdan Basyar, *Politik Israel Terhadap Palestina*, Jurnal Ilmu Politik 12, Gramedia, Jakarta, 1991

⁴⁹ M. Hamdan Basyar, *Politik Israel Terhadap Palestina*, Jurnal Ilmu Politik 12, Gramedia, Jakarta, 1991

⁵⁰ M. Hamdan Basyar, *Politik Israel Terhadap Palestina*, Jurnal Ilmu Politik 12, Gramedia, Jakarta, 1991

Palestina akan menjadi minoritas.⁵¹ Atau, bila pada masa mendatang akan diadakan referendum di wilayah tersebut, maka bangsa Yahudi di Tepi Barat telah berjumlah lebih banyak dibanding penduduk pribumi (Palestina). Sedangkan di Sinai dan Dataran Tinggi Israel bersikap lebih berhati-hati karena meskipun dikuasainya, tetapi status secara resmi milik negara-negara lain.

Namun pernyataan resmi pemerintah Israel membangun pemukiman di Tepi Barat dengan dalih adanya permintaan yang tinggi dari masyarakat (Yahudi).⁵² Menurutnyanya banyak masyarakat Yahudi yang ingin tinggal di wilayah tersebut. Karena Tepi Barat berdekatan dengan beberapa kota yang dianggap kota suci seperti kota Yerusalem.

Pemerintah Israel membagi wilayah Tepi Barat menjadi tiga bagian berdasarkan permintaan (demand zone).⁵³ Pertama, daerah peminat tinggi (High Demand Zone). Sekitar 30 menit perjalanan darat dari Tel Aviv. Sampai tahun 2010 diperkirakan daerah ini akan ditempati 250.000 sampai 450.000 orang Yahudi atau sekitar 65 sampai 75 persen dari total penduduk Tepi Barat.

Kedua, daerah peminat sedang. Berada di sebelah timur daerah peminat tinggi dan akan memakan waktu 50 menit perjalanan darat dari Tel Aviv. Sampai tahun 2010 diproyeksikan akan ditempati 100.000 sampai 150.000 orang Yahudi atau sekitar 20 sampai 25 persen penduduk Tepi Barat.

Ketiga, daerah peminat rendah (Low Demand Zone), yaitu bagian paling timur dari Tepi Barat. Direncanakan akan ada 40.000 hingga 70.000 pemukim Yahudi di sana sampai dengan tahun 2010. Jumlah ini adalah antara 10 sampai 15 persen dari seluruh Penduduk Tepi Barat.

Selain kebijakan tentang pemukiman, Israel juga berusaha memecah belah persatuan Arab dengan melakukan perjanjian damai secara terpisah dengan masing-masing negara Arab. Peluang ini didapat Israel setelah negara-negara Arab menyadari bahwa persoalan Israel-Arab dan Israel-Palestina tidak dapat diselesaikan melalui perang. Terbukti selama perang beberapa kali, gabungan negara Arab tidak mampu menumbangkan negara Israel. Kemudian mereka berjuang melalui jalan-jalan lain. Kesempatan ini dipergunakan dengan baik oleh Israel. Ia kemudian melakukan pendekatan

⁵¹ M. Hamdan Basyar, *Politik Israel Terhadap Palestina*, Jurnal Ilmu Politik 12, Gramedia, Jakarta, 1991, hal 56

⁵² M. Hamdan Basyar, *Politik Israel Terhadap Palestina*, Jurnal Ilmu Politik 12, Gramedia, Jakarta, 1991

⁵³ M. Hamdan Basyar, *Politik Israel Terhadap Palestina*, Jurnal Ilmu Politik 12, Gramedia, Jakarta, 1991

secara terpisah pada masing-masing negara Arab dengan harapan mampu mempengaruhi mereka satu persatu.

Usaha Israel ini membawa hasil yang cukup memuaskan. Dimulai dengan Camp David, perjanjian damai antara Israel dengan Mesir pada 1979. Dalam perundingan ini, Israel bersedia menarik pasukannya dari Sinai mengembalikan wilayah itu kepada Mesir dengan beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut di antara lain adalah pengakuan Mesir terhadap Israel dan pelarangan pembuatan basis militer Mesir di wilayah Sinai tersebut. Pihak Mesir pun mnyetujuinya.⁵⁴ Dengan demikian telah tercapai perjanjian damai antara Mesir dengan Israel. Israel kemudian melakukan hal serupa dengan negara-negara Arab yang lain demi mencapai keamanan dan eksisitensinya.

Perjanjian ini tentu saja merusak persaruaan Arab. Negara-negara Arab radikal seperti Libya dan Sudan merasa kecewa dengan keputusan Mesir tersebut karena Mesir telah mengingkari pernyataannya tentang keengganannya melakukan persetujuan terpisah dengan Israel dan tindakannya tersebut dapat melemahkan perjuangan Arab dan Palestina melawan Israel. Mesir kemudian dikucilkan dari Liga Arab dan pergaulan negara-negara Arab. Meskipun sangat mungkin bahwa Mesir melakukannya dengan motif yang berbeda.

AS sebagai pemrakarsa perundingan ini memberikan beberapa komitmen bagi kedua pihak. Antara lain bantuan kepada Mesir berupa bantuan militer, bantuan ekonomi sebesar 7,5 milyar dollar AS selama 5 tahun, dan lain-lain.⁵⁵ Demikian pula terhadap Israel atas penarikan mundur pasukannya dari Sinai, AS akan memberikan beberapa kompensasi. Bisa jadi, Mesir sangat tertarik dengan janji AS ini sehingga memutuskan untuk datang pada perjanjian tersebut.

Israel selama ini meyakini bahwa "kekalahan perangnya yang pertama akan menjadi perangnya yang terakhir".⁵⁶ Oleh karena itu, ia tidak pernah menunggu diserang untuk kemudian melakukan serangan balasan, kecuali pada perang Yom Kippur pada 1973. Israel selalu melakukan serangan preemptive dan membalas setiap aksi teroris maupun aksi-aksi lain yang mengganggu keamanannya dengan serangan yang berlipat ganda kuatnya dibandingkan dengan yang dilakukan oleh lawan-lawannya. Pada periode ini, ancaman keamanan yang dihadapi Israel tetap pada level negara. Israel menyiagakan

⁵⁴ Haim Ramon, dalam *Prospek Perdamaian di Timur Tengah: Sebuah Tilikan Latar Belakang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, hal. 18-19

⁵⁵ *Ibid*, hal. 20

⁵⁶ A. Hasnan Habib, *Dimensi Keamanan dan Srategis Perkembangan Timur Tengah*, Jurnal Ilmu Politik 12, Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 28

militernya untuk menghadapi ancaman-ancaman dan serangan dari negara-negara sekitarnya.

Mempertahankan kesiagaan nasional pada tingkat tinggi dengan tingkat persenjataan yang semakin meningkat membutuhkan konsekuensi yang tinggi. Tindakan-tindakan preemptive maupun retaliation yang dilakukan Israel membutuhkan biaya yang tinggi, peningkatan kualitas persenjataan, ditambah dengan rasa was-was dan tidak aman adalah suatu harga yang harus dibayar Israel untuk menjamin keselamatan dan keamanannya. Sangat mungkin di kemudian hari mengarah pada kekuatan nuklir yang merupakan senjata ampuh dan menakutkan. Sampai periode ini, kebijakan Israel mengeluarkan beberapa kebijakan di dalam bidang keamanan. Pertama, tetap meningkatkan kekuatan militernya secara besar-besaran merupakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan terbukti berhasil mengamankan wilayahnya dari ancaman dari luar negeri.

Potensi nuklir ini akan sangat menakutkan. Karena secara geografis, negara-negara di kawasan tersebut sangat berdekatan dan padat sehingga akan menimbulkan kerusakan yang parah dan korban yang lebih banyak lagi. Semakin besarnya peluang untuk mendapatkan segala macam senjata mulai dari konvensional, kimia, biologi, sampai dengan nuklir akan membuat persaingan senjata antar negara di kawasan tersebut. Seperti yang diketahui, tidak hanya negara yang mampu membeli senjata secara, namun juga kelompok dan perorangan baik secara legal maupun ilegal. Ini dapat dilihat dari kemampuan kelompok-kelompok baik yang ada di Arab maupun Israel sendiri.

Serangan Mesir dan Suriah pada Oktober 1973 yang dilanjutkan dengan embargo minyak adalah serangan yang paling hebat yang dilakukan oleh negara-negara Arab. Selain harus menghadapi serangan, Israel juga mengalami krisis energi akibat kesulitan suplai minyak yang dihentikan oleh negara-negara produsen minyak. Saat itu, Israel untuk pertama kalinya tampak seperti akan mengalami kekalahan. Serangan hebat dari Mesir dari Sinai dan Suriah dari Golan ditambah kesulitan untuk memperoleh bantuan militer karena negara-negara lain khawatir dengan sanksi embargo minyak dari Arab. Namun kejelian Israel dalam membujuk AS untuk mengirimkan bantuannya merupakan jalan keluarnya.

Kebijakan Israel dalam menghadapi serangan tahun 1973 dan embargo tersebut tersebut antara lain:

1. Meminta bantuan militer dan minyak kepada AS.

2. Melakukan serangan balik terhadap pasukan Suriah di Dataran Tinggi Golan dan pasukan Mesir di Sinai.
3. Menggunakan jalur diplomasi untuk memperoleh dukungan internasional dan mengutuk serangan yang dilakukan oleh Suriah dan Mesir tersebut.

Awalnya AS tidak terlalu bersemangat untuk mengirim bantuan pada Israel. Selain karena embargo itu tidak terlalu berdampak padanya, juga karena dengan embargo tersebut, AS melalui perusahaan minyaknya mendapat keuntungan yang berlipat-lipat. Namun keengganan AS untuk secara terbuka membantu Israel melalui bantuan militer tersebut berakhir akibat kekhawatiran akan menurunnya *sphere of influence*-nya di Timur Tengah. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan yang menjadi ajang persaingan pengaruh antara AS dengan Uni Soviet. AS ingin mengeluarkan Uni Soviet atau setidaknya mengecilkan pengaruh dan keterlibatannya di kawasan ini.

AS juga mengancam negara-negara Arab bahwa selama embargo diberlakukan, maka AS tidak dapat bertindak apapun terhadap Israel dan negara-negara konsumen minyak akan mencari sumber minyak yang lain.⁵⁷ Maka embargo-pun dicabut. Dan kemenangan dapat dicapai semua pihak dengan lingkup yang berbeda.

Dunia Arab mendapat kemenangan hanya pada awal serangan dan embargo tersebut dan setidaknya dapat menunjukkan potensi ancamannya. Serangan militer tersebut dapat dikategorikan sebagai serangan yang paling sukses selama peperangannya dengan Israel.⁵⁸ Embargo minyak menunjukkan adanya persatuan Arab yang memiliki potensi mengacaukan dunia melalui minyak. Dalam kesempatan ini, Arab menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan (senjata) untuk menekan pihak-pihak lain. Serangan militer (oleh Mesir dan Suriah) dan embargo minyak (oleh negara-negara produsen minyak termasuk Arab Saudi) merupakan suatu momentum yang menampilkan keunggulan Arab. Meskipun hanya sementara karena Arab kurang mampu menggunakan kelebihan tersebut.⁵⁹

Sedangkan AS, Israel, dan negara-negara konsumen minyak mendapat kemenangan sebenarnya dengan kembalinya tatanan ketertiban dunia (*world order*) menurut kehendak mereka. Israel dan AS sekali lagi menunjukkan ketangguhannya. Sementara itu Uni Soviet belum mampu menunjukkan kekuatan pengaruhnya di jazirah Arab ini.

⁵⁷ Hassanein Heikal, *Loc. Cit.*

⁵⁸ *Ibid.*, hal 336

⁵⁹ *Ibid.*, hal 356

Kedua, dalam jalur diplomasi Israel menggunakan strategi yang disebut dengan stick and carrot. Stick berarti Israel bersikap keras dan selalu berusaha menghukum negara-negara yang bersikap menentang dan berusaha menghancurkan eksistensi negara Israel. Sedangkan carrot, yaitu mendekati dan berusaha menciptakan persahabatan dengan negara-negara yang bersikap moderat dan menerima negara Israel. Stick seperti terlihat pada beberapa aksi militer yang dilakukannya terhadap beberapa negara tetangga, misalnya serangan-serangan terhadap wilayah-wilayah di perbatasan yang dicurigai sebagai sarang fedayin.

Ketiga, mengadakan perjanjian damai secara terpisah dengan negara-negara Arab. Israel mampu menggunakan kesempatan lemahnya persatuan negara-negara Arab. Dengan pertimbangan kepentingan nasional negara-negara tersebut, Israel menggunakan pendekatan secara terpisah dan sendiri-sendiri terhadap negara-negara lawannya untuk memecah belah Arab. Misalnya dengan imbalan dikembalikannya Sinai kepada Mesir, Israel mencoba mendekati Mesir.

Menurut perhitungan Israel, bila dapat berdamai dengan Mesir maka Israel akan mendapat keuntungan yang berlipat. Pertama, dengan cara berdamai dan mendapatkan pengakuan dari salah satu negara musuh yang memiliki militer yang kuat, maka akan berkurangnya ancaman keamanan bagi Israel. Melalui perundingan terpisah ini Mesir diharapkan akan kehilangan selera untuk berkonfrontasi dengan Israel. Sebagai catatan, militer Mesir merupakan salah satu kekuatan militer lawan yang cukup berhasil dalam beberapa misi penyerangan terhadap wilayah Israel. Kedua, dengan kedudukan Mesir sebagai salah satu negara besar dan kuat di Liga Arab maka bila Mesir berdamai dengan Israel maka akan mengganggu persatuan Arab. Sedangkan yang akan dikorbankan Israel hanyalah mengembalikan Sinai yang dikuasainya pada penyerangan tahun 1953 kepada Mesir yang memang pemilik wilayah tersebut.

Pada tahun 1979, Israel berhasil melakukan perundingan terpisah dengan Mesir di Camp David dibawah AS sebagai mediator. Bila dilihat dari kepentingan nasional kedua pihak, hasil kesepakatan yang dicapai cukup memuaskan keduanya. Mesir mendapatkan kembali (dengan beberapa syarat) wilayah Sinai yang direbut Israel ditambah dengan bantuan ekonomi dan lain-lain dari AS. Sedangkan Israel menarik pasukannya dari wilayah tersebut dengan kompensasi mendapatkan pengakuan dari Mesir yang saat itu dipimpin Presiden Anwar Saddat dan ditambah dengan bantuan ekonomi dan militer dari AS.

Strategi tersebut sungguh berhasil. Akibatnya dunia Arab mengucilkan Mesir dan mengeluarkannya dari Liga Arab. Persatuan Arab semakin terpuruk. Selain dengan Mesir, Israel juga melakukan perjanjian-perjanjian terpisah dengan negara-negara Arab yang lain seperti Yordania dan Lebanon. Kekompakan dunia Arab semakin terpecah belah. Meskipun pada dasarnya tetap tidak menginginkan berdirinya Israel, namun *politic will* masing-masing negara tidak cukup kuat. Sekali lagi Israel mampu membuktikan diri sebagai negara yang mempunyai kemampuan diplomatis yang kuat melalui kebijakan yang tepat.

Keempat, tentang imigrasi. Kebijakan Israel di bidang imigrasi yang ambisius dan tak terbatas pada kelanjutannya justru membawa dampak negatif yang merugikan sendiri. Israel tidak membatasi bahkan memprovokasi imigrasi besar-besaran warga Yahudi dari luar negeri membawa beberapa permasalahan. Permasalahan yang ditimbulkan seperti masalah sosial, ekonomi, dan keamanan. Permasalahan itu secara lebih konkret adalah berbentuk penyediaan pemukiman beserta segala infra strukturnya dalam jumlah besar, tersedianya lapangan pekerjaan, dan bahaya keselamatan jiwa para imigran itu sendiri.

Masuknya gelombang imigran ini bertujuan untuk memenuhi tanah-tanah kosong yang telah mereka kuasai. Pemerintah Israel berupaya keras untuk memenuhi segala kebutuhan mendasar bagi imigran-imigran Yahudi yang nantinya menjadi warga negara Israel. Pembangunan pemukiman secara besar-besaran dan terus-menerus. Pertambahan jumlah penduduk juga harus diimbangi dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang memadai.

Seiring dengan semakin banyak penduduknya, maka tuntutan jaminan keamanan juga semakin tinggi. Karena dengan semakin banyak warganya tanpa didukung pengamanan yang cukup akan menjadi sasaran empuk bagi serangan-serangan yang ditujukan padanya (dari negara-negara anti-Israel). Tidak sedikit dari imigran-imigran tersebut yang menempati wilayah-wilayah yang berbatasan maupun cukup dekat dengan daerah perbatasan yang merupakan sasaran mudah bagi lawan. Para imigran ini tidak jarang pula dengan berbagai alasan berselisih dengan penduduk asli (Palestina ataupun Arab). Setidaknya, rasio militer dengan sipil harus dipertahankan untuk menjaga keamanan dan keselamatan warganya. Militer Israel juga mendirikan pos-pos penjagaan yang ketat dan tersebar di seluruh wilayah pemukiman terutama yang berada di daerah berbatasan dengan wilayah bangsa Palestina maupun negara-negara lainnya.

Hal tersebut berarti beban masalah keamanan semakin berat bagi Israel semenjak semakin banyaknya imigran. Kebijakan imigrasi yang sebelumnya merupakan salah satu cara untuk memenangkan klaim atas Palestina telah membawa permasalahan yang lain. Seperti disebutkan sebelumnya, pemukiman-pemukiman yang berada di wilayah pendudukan seperti Tepi Barat ini semakin membebani tugas IDF. Mereka tidak hanya harus mewaspadai serangan dari luar terhadap kelangsungan hidup negaranya secara keseluruhan, namun juga serangan-serangan kecil yang mengancam penduduk secara parsial.

Dapat dilihat bahwa kebijakan pemukiman yang pada awalnya merupakan salah satu upaya pemerintah Israel untuk memperkuat pertahanan di perbatasan dengan membangun kekuatan para militer. Pada kelanjutannya justru akan memperbesar ancaman keamanan. Terutama semenjak gerakan intifadah menggunakan cara-cara kekerasan.

3.3 Pasca Intifadah tahun 1988

Pada Desember 1988 meletuslah suatu gerakan perjuangan dari bangsa Israel terhadap pendudukan Yahudi. Gerakan ini lahir dari kesadaran dari orang-orang Palestina yang menemukan nasionalismenya dan tidak lagi bersandar pada kekuatan bangsa-bangsa Arab dalam menghadapi Israel. Kegagalan Arab dalam memperjuangkan pengusiran Yahudi dari Palestina yang berakibat pada semakin meluasnya wilayah yang dikuasai Yahudi dan pengusiran orang Palestina dari tanahnya telah menciptakan kesadaran akan perlunya perjuangan bangsa Palestina sendiri. Bahwa mereka sebagai korban langsung dari konflik ini harus memiliki sikap sendiri dan berjuang atas namanya sendiri. Gerakan ini disebut dengan intifadah.

Maka dari itu, seluruh bangsa Palestina yang berada di wilayah pendudukan dengan bersenjatakan kayu, ketapel, dan batu menyerang pasukan-pasukan Israel. Mereka juga melakukan demonstrasi besar-besaran menentang kebijakan pendudukan Israel. Suatu bentuk perlawanan baru telah lahir dan mendapat sambutan luar biasa dari bangsa Palestina baik yang berada di daerah pendudukan maupun yang telah mengungsi ke luar negeri.

Lahirnya gerakan ini hampir bersamaan dengan lahirnya kelompok Hamas sebagai salah satu kelompok perjuangan bergaris keras dan tidak mau berkompromi sedikitpun dengan Yahudi. Hamas dikemudian hari menjadi salah satu kelompok perlawanan yang merepotkan Israel karena sikapnya yang militan dan anti perdamaian.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Hamas menentang segala bentuk perjanjian dan konferensi perdamaian yang dilakukan dengan Israel dan hanya mempercayai perlawanan melalui kekerasan dan militansi sebagai satu-satunya jalan keluar untuk mengusir Yahudi.

Seperti biasa, Israel menggunakan kekuatan militer dalam merespon gerakan ini. Kayu dan batu dari pejuang Palestina dilawan dengan senapan dan bom. Demonstrasi dihadapi dengan pembubaran menggunakan tembakan-tembakan. Ini merupakan keadaan yang benar-benar tidak seimbang. Pemerintah Israel ketika dipimpin PM Yitzhak Shamir juga melarang orang Yahudi untuk berhubungan dengan orang Palestina yang menjadi anggota kelompok perlawanan seperti Hamas dan Islamic Jihad termasuk dengan anggota PLO.⁶⁰

Tanggapan keras Israel pada intifadah ini membawa kerugian pada dirinya sendiri. Bangsa Palestina sekalipun menghadapi keadaan yang tidak berimbang karena harus melawan militer Israel namun tidak pernah kehilangan semangatnya dan semakin mengancam keamanan wilayah Israel. Dunia internasional yang sedang berada dalam semangat penyelesaian secara damai mengecam tindakan Israel yang dianggap membabi buta dan tidak berperikemanusiaan. Kecaman dunia internasional ini telah menurunkan citra bangsa Israel yang sejak semula mengikrarkan diri sebagai bangsa yang demokratis dan cinta perdamaian. Ketidakberhasilan pemerintahan Shamir (partai Likud) menghadapi intifadah adalah salah satu faktor kekalahannya dalam Pemilu tahun 1992 dari oposisi partai Buruh.⁶¹

Pecahnya Perang Teluk pada 1991 antara Irak dengan kekuatan internasional dibawah pimpinan AS memiliki arti yang penting bagi Israel terutama masalah keamanan. Pengalaman Israel diserang oleh Irak melalui rudal Scud telah menimbulkan kekhawatiran luar biasa akan pertahanannya. Kekalahan Irak pada perang tersebut adalah suatu keuntungan bagi Israel. Perang tersebut telah merubah peta politik di Timur Tengah. Menurut Dr. Amien Rais terdapat delapan perubahan signifikan yang juga sangat mempengaruhi Israel.⁶² Meskipun tidak semuanya menguntungkan Israel, namun secara

⁶⁰ Dhurorudin Mashad, *Masa Depan Perdamaian Timur Tengah*, Jurnal Ilmu Politik 14, LIPI, Gramedia, Jakarta, 1993, hal. 118

⁶¹ Dhurorudin Mashad, *Masa Depan Perdamaian Timur Tengah*, Jurnal Ilmu Politik 14, LIPI, Gramedia, Jakarta, 1993, hal. 118

⁶² M. Amien Rais, *Arah Perkembangan Timur Tengah*, Jurnal Ilmu Politik 12, Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 19

umum, peristiwa tersebut telah memberikan keuntungan bagi Israel. Lebih lanjut, kedelapan perubahan tersebut adalah sebagai berikut.⁶³

Pertama, Irak yang mampu bangkit secara mengejutkan dan menjadi salah satu super power regional telah runtuh dan setidaknya dalam jangka waktu yang cukup lama tidak dapat mengganggu Israel. Embargo ekonomi dan pengucilan dunia internasional terhadap Irak akibat invasinya ke Kuwait membuatnya sulit berkembang. Kedua, lenyapnya ancaman militer Irak terhadap Israel karena hancurnya kekuatan militer Irak tanpa disertai korban dari pihak Israel. Diperolehnya sejumlah rudal anti-rudal dari AS dan senjata-senjata canggih yang lain. Didapatkannya persenjataan ini akan memperkuat militer Israel.

Ketiga, Suriah sebagai salah satu potensi ancaman terhadap Israel dan sangat kritis pada AS telah melemah. Ini dikarenakan Suriah dibawah *Hafiz Assad* juga mengirimkan pasukannya dalam koalisi anti-Irak. Setidaknya Suriah mulai memiliki kesamaan persepsi dengan AS. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, meskipun AS tidak secara terbuka mendukung Israel namun cenderung untuk memihak pada Israel. Maka diharapkan bahwa Suriah akan mengurangi ketegangannya terhadap Israel.

Keempat, negara-negara Arab pro-AS seperti Arab Saudi, Uni Emirat, Qatar, Bahrain, dan Kuwait semakin dalam jatuh pelukan AS. Ini berarti ancaman embargo minyak akan dapat dihindari. Seperti telah terjadi sebelumnya, Arab Saudi merupakan salah satu negara pelopor embargo minyak pada AS dan sekutunya termasuk Israel. Meskipun negara-negara Arab ini tidak bersahabat dengan Israel, namun setidaknya tidak juga memusuhinya. Kelima, Yordania yang selama ini tidak memberikan ancaman serius pada Israel dan berkawan dengan AS mendadak mengambil posisi berseberangan. Ini dikarenakan tidak mungkin bagi Raja Hussein untuk mengambil kebijakan yang bertentangan dengan mayoritas rakyatnya yang merupakan bangsa Palestina yang menganggap Saddam adalah salah satu tokoh Arab yang sangat memperhatikan kondisi Palestina dan menentang Israel. Namun seperti yang disebutkan, Yordania bukan merupakan ancaman yang berarti bagi Israel.

Keenam, seiring dengan kekalahan Irak maka PLO yang mendukung Irak juga mengalami kekalahan politis. Pamor PLO menurun drastis bersamaan dengan hancurnya Irak dan Saddam yang diharapkan mampu menekan Israel untuk menghentikan politik

⁶³ M. Amien Rais, *Arah Perkembangan Timur Tengah*, Jurnal Ilmu Politik 12, Gramedia, Jakarta, 1991, hal 19

penindasannya terhadap Palestina. Jatuhnya pamor PLO ini tentu saja disambut baik Israel yang sejak semula tidak mengakui PLO sebagai organisasi perjuangan.

Ketujuh, anggapan AS bahwa sebagian besar Timur Tengah telah berada di bawah pengaruhnya (*sphere of influence*). Ini berarti semakin lemahnya potensi ancaman pada Israel dari negara-negara tetangga sekitarnya. Israel tidak lagi terlalu merasa dikelilingi oleh musuh. Kedelapan, kehadiran militer AS di kawasan Teluk. Meskipun tidak dalam keadaan intensif, namun ini akan membuat Israel semakin merasa aman dan percaya diri, karena mendapati mitranya yang paling mesra telah berada di sekitarnya.

Namun upaya pengaturan keamanan di wilayah Timur Tengah tidaklah dapat dengan mudah dilakukan. Meskipun nasionalisme Arab tidak lagi sekuat masa sebelumnya, namun masih ada potensi ancaman yang dapat memporakporandakan perdamaian di kawasan tersebut, yaitu radikalisme atau juga disebut dengan fundamentalisme. Meskipun sebagian besar hanya diorganisasikan oleh kelompok-kelompok namun ancamannya sangat nyata. Mereka menganggap masuknya budaya Barat adalah bentuk lain kolonialisme dan tidak ingin melihat kolonialisme itu terlalu dalam masuk pada dunia Arab dan memandang bangsa Yahudi akan mengotori kawasan Timur Tengah tersebut dan menolak segala penyelesaian damai dengan Yahudi.⁶⁴ Demikian pula dengan bangsa Yahudi sayap kanan yang sangat nasionalis dan membenci segala upaya perdamaian dengan Arab dan Palestina.

Selain tindakan-tindakan yang tergolong terorisme, tercatat setidaknya ada empat tokoh yang berusaha menciptakan perdamaian melalui proses perundingan dan berakhir dengan kematian.⁶⁵ Perdana Menteri Irak *Nuri Said*, dibunuh oleh rakyatnya sendiri karena menerima Pakta Baghdad yang dibuat oleh AS dan Inggris pada 1955. Presiden Mesir *Anwar Sadat* yang ditembak mati oleh serdadunya karena dianggap terlalu mengalah pada Israel dengan menandatangani persetujuan Camp David pada 1979. Presiden Lebanon *Basyir Gemayel* yang juga dibunuh karena dianggap telah terlalu dekat dengan Barat. Pada 1996, PM Israel *Yitzhak Rabin* tewas terbunuh oleh salah seorang Yahudi ultra-nasionalis karena dianggap menurunkan citra Yahudi dengan melakukan perundingan damai dengan Palestina dan berniat menyerahkan sebagian wilayah Tepi Barat pada bangsa Palestina.

⁶⁴ M. Amien Rais, *Arah Perkembangan Timur Tengah*, Jurnal Ilmu Politik 12, Gramedia, Jakarta, 1991

⁶⁵ M. Amien Rais, *Arah Perkembangan Timur Tengah*, Jurnal Ilmu Politik 12, Gramedia, Jakarta, 1991

Peristiwa-peristiwa tersebut telah membuka mata dunia dan menunjukkan kenyataan bahwa kawasan Timur-Tengah bukanlah suatu kawasan yang dengan mudah menemukan perdamaian. Demikian kompleksnya permasalahan yang ada ditambah dengan faktor kepercayaan dan budaya yang berbeda dan saling mengeliminasi. Yahudi mempunyai reputasi sebagai bangsa yang bersikap chauvinistis dan merendahkan bangsa yang lain. Ia juga terkenal sebagai bangsa yang sering dimusuhi oleh bangsa-bangsa lain, diusir, dianiaya, dan dibantai. Perlakuan tersebut menjadi semacam trauma bagi Yahudi sehingga mereka cenderung ultra-nasionalis dan proteksionis dalam meraih keamanan.

Arab terutama Palestina merasa sebagai korban dari politik Yahudi melalui negara Israel. Palestina merasa hak hidup mereka, kebebasan, dan rasa keadilan yang seharusnya menjadi hak asasi mereka telah direbut oleh Israel dengan berdirinya negara itu. Bagi mereka, Israel adalah penjajah. Terlepas dari sejarah tentang siapakah penghuni awal tanah Palestina, kedua pihak mempunyai alasan dan fakta-faktanya sendiri yang digunakan untuk mengklaim daerah tersebut adalah milik mereka.

Atas prakarsa dari AS dan Uni Soviet (sebelum bubarnya Uni Soviet), pada 30 Oktober 1991 dan dilanjutkan di Washington pada Desember 1991 diadakan perundingan damai antara Israel di satu pihak dengan Lebanon, Suriah, Yordania, dan Palestina di pihak lain.⁶⁶ Negara-negara tersebut pada akhirnya bersedia untuk datang ke meja perundingan atas desakan dari AS. Konferensi tersebut dimulai tanpa syarat apapun. AS mendesak pihak-pihak diatas agar bersedia datang tanpa mengajukan prasyarat dan tanpa menentukan substansi-substansi yang akan dibahas.

Menurut M. Amien Rais, AS memang berhasil membujuk pihak-pihak tersebut untuk maju ke meja perundingan namun tetap saja terjadi ketidakadilan.⁶⁷ AS yang sejak semula lebih pro-Israel dan tidak pernah menjatuhkan sanksi padanya tetap memberikan jaminan bahwa hal tersebut tidak akan berubah. Menlu AS James Baker pernah mengungkapkan pada para pemimpin Arab bahwa AS hanya dapat memberikan tekanan politik pada Israel namun tidak dapat memberi sanksi.⁶⁸

Sebagai contoh nyata, kebijakan AS dalam menanggapi permintaan bantuan dari Israel yang digunakan untuk masalah pemukiman. AS selama ini memberikan bantuan-bantuan yang diminta oleh Israel, meskipun pada 1991 bantuan tersebut ditunda selama

⁶⁶ Dhurorudin Mashad, *Masa Depan Perdamaian Timur Tengah*, Jurnal Ilmu Politik 14, LIPI, Gramedia, Jakarta, 1993, hal. 118

⁶⁷ M. Amien Rais, *Arah Perkembangan Timur Tengah*, Jurnal Ilmu Politik 12, Gramedia, Jakarta, 1991

⁶⁸ M. Amien Rais, *Arah Perkembangan Timur Tengah*, Jurnal Ilmu Politik 12, Gramedia, Jakarta, 1991

120 hari oleh pemerintahan AS sebagai tekanan agar Israel bersedia mengikuti perundingan di Madrid.⁶⁹ Menlu AS James Baker di hadapan Kongres menyatakan akan memberikan jaminan bantuan sebesar sepuluh milyar dollar bila Israel bersedia membekukan pemukiman termasuk rumah-rumah yang sedang dibangun di wilayah pendudukan.⁷⁰ Tetapi AS tidak pernah memberi sanksi berat ataupun menghukum Israel seperti yang dilakukannya kepada Irak, meskipun kasus keduanya dapat dikategorikan sebagai aneksasi. AS tidak secara transparan mendukung pendudukan Israel atas Palestina, namun juga tidak akan “mengusir” Israel dari wilayah tersebut.

Terhadap pihak Palestina, AS tidak dapat menjanjikan apapun. Salah satu tuntutan yang selama ini disuarakan oleh Palestina yaitu penghentian pembangunan pemukiman Yahudi di atas tanah Palestina sebagai suatu syarat untuk memulai perundingan juga tidak mendapat tanggapan positif. AS berpendapat bahwa pembangunan pemukiman adalah urusan kemanusiaan yang dikarenakan masih banyaknya orang Yahudi yang belum memiliki tempat tinggal, dan masalah ini tidak perlu dimasukkan pada urusan politik.⁷¹ AS berusaha membujuk dan menakuti Palestina agar bersedia bergabung dalam perundingan tersebut melalui James Baker yang menyatakan bahwa dalam pandangannya, Palestina akan menjadi pihak yang paling rugi bila tidak ada proses perdamaian.⁷² Tidak ada jaminan akan substansi dan hasil yang kira-kira akan diperoleh dan berpihak pada Palestina.

Yang menarik dari perundingan ini adalah bahwa Palestina melalui PLO telah diundang untuk datang sebagai salah satu peserta dalam perundingan ini. Palestina memiliki kedudukan yang seimbang dengan Israel. Palestina tidak lagi diwakili oleh negara-negara lain tetapi telah diwakili oleh dirinya sendiri dan berbicara atas namanya sendiri. Hal ini jelas merupakan suatu langkah maju karena selama ini PLO hanya diundang mengikuti perundingan semacam itu dengan status sebagai peninjau dan bukan peserta. Hal ini menandakan bahwa baik AS, Uni Soviet, Israel, dan dunia internasional telah menyadari bahwa perundingan tentang perdamaian di Timur Tengah harus melibatkan Palestina. Konflik Israel-Palestina adalah pokok utama permasalahan yang

⁶⁹ M. Hamdan Basyar, *Politik Israel Terhadap Palestina*, Jurnal Ilmu Politik 12, Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 54

⁷⁰ M. Hamdan Basyar, *Politik Israel Terhadap Palestina*, Jurnal Ilmu Politik 12, Gramedia, Jakarta, 1991

⁷¹ M. Amien Rais, *Arah Perkembangan Timur Tengah*, Jurnal Ilmu Politik 12, Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 23

⁷² M. Amien Rais, *Arah Perkembangan Timur Tengah*, Jurnal Ilmu Politik 12, Gramedia, Jakarta, 1991

terjadi di wilayah tersebut. Konflik tersebut terjadi karena usaha-usaha Yahudi (yang berhasil) untuk mendirikan negara di tanah Palestina.

Hal lain yang menarik dalam konferensi ini adalah penampilan dari masing-masing delegasi terutama Israel dan Palestina. Delegasi Israel dipimpin oleh PM Yitzhak Shamir sedangkan Palestina oleh Yasser Arafat dengan juru bicara Dr. Hanan Ashrawi. Pihak Palestina pada perundingan ini menunjukkan sikap yang moderat. Avi Shlaim menulis bahwa pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan pihak Palestina dalam perundingan ini adalah yang paling moderat yang pernah dinyatakan Palestina.⁷³ Ia juga menulis beberapa pernyataan sikap Palestina yang dikatannya sangat moderat tersebut. Seperti salah satunya adalah pernyataan Dr. Abdul Shafi, salah seorang anggota delegasi Palestina, yang menyatakan bahwa alasan terkuat dari tuntutan penghentian pendudukan Israel atas bagian wilayah-wilayah Palestina yang dikuasai Israel adalah adanya hak penentuan nasib sendiri dari bangsa Palestina. Dr. Abdul Shafi juga menyatakan dapat menerima usulan Palestina yang otonom berkonfederasi dengan Yordania sebagai transisi menuju Palestina merdeka.⁷⁴ Konfederasi pada awalnya adalah permintaan dari Israel yang ditolak oleh Palestina. Delegasi Palestina juga tidak lagi menolak adanya negara Israel. Mereka mengakui hak hidup negara Israel dan gerakan Zionis sebagai gerakan nasionalisme. Dan mereka juga meminta Israel untuk melakukan hal yang sama.

Di lain pihak, delegasi Israel sepertinya kehilangan kemampuan diplomatisnya. Setelah Shamir membuat pernyataan yang dapat membuat perundingan tersebut tidak berguna dan hampir seluruhnya bertolak belakang dengan resolusi PBB no 242 dan 338 yang berisi tentang kedaulatan wilayah dan pelarangan pencaplokan pada wilayah bangsa lain serta usaha-usaha pembicaraan damai. PM Israel tersebut berbicara bahwa inti permasalahan adalah selama ini Israel adalah korban dari kekejaman Arab, menurutnya Arab selalu menginginkan kehancuran Israel. Ia tidak mengakui bahwa inti permasalahannya adalah masalah teritorial.⁷⁵ Shamir juga menolak tuntutan Arab untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang diduduki Israel pada 1967 sesuai dengan kedua resolusi PBB no. 242 dan 338 dengan alasan kedua resolusi tersebut telah dilaksanakan melalui perjanjian Camp David pada 1979 dengan mengembalikan Sinai yang juga dikuasainya setelah perang 1956 kepada Mesir. Tentu saja ini bertentangan dengan delegasi yang lain dan

⁷³ Avi Shlaim, dalam M. Amien Rais, *Arah Perkembangan Timur Tengah*, Jurnal Ilmu Politik 12, Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 24

⁷⁴ M. Amien Rais, *Arah Perkembangan Timur Tengah*, Jurnal Ilmu Politik 12, Gramedia, Jakarta, 1991

⁷⁵ M. Amien Rais, *Arah Perkembangan Timur Tengah*, Jurnal Ilmu Politik 12, Gramedia, Jakarta, 1991

semangat dunia internasional yang berharap masalah teritorial diantara pihak-pihak yang bertikai dapat segera diselesaikan.

Konferensi Madrid yang merupakan langkah maju menuju perdamaian ternyata juga tidak membawa banyak kemajuan yang berarti. Delegasi Israel yang sejak semula menolak syarat dari Palestina untuk menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi untuk memulai perundingan hanya menawarkan pembicaraan-pembicaraan yang bersifat teknis saja seperti masalah pembagian air, pelucutan senjata, dan kelestarian lingkungan hidup.⁷⁶ Israel tidak pernah menyentuh substansi yang diharapkan oleh Palestina yaitu masalah tanah Palestina yang diduduki oleh Israel. Israel yang dipimpin oleh PM Yitzhak Shamir tidak akan pernah mau membicarakan masalah tanah tersebut. Sikap ini merupakan sikap umum yang ada di Israel. Sikap politik berdasarkan ideologi dan biblikal untuk tidak mengembalikan Tepi Barat dan Jalur Gaza kepada Palestina telah menjadi sikap nasional Israel yang ditanamkan oleh mantan PM Menachim Begin pada 1970-an.⁷⁷

Pendirian Shamir ini sebenarnya mendapat tentangan dari partai Buruh. Haim Ramon, salah seorang anggota Knesset dan anggota senior partai Buruh dalam suatu konferensi tidak resmi yang membahas masalah perdamaian Israel-Palestina mengutip suatu usulan yang menjadi kebijakan partainya, yaitu:

Tujuan utama negosiasi adalah mengimplementasikan perdamaian yang menyeluruh, sempurna, dan abadi, berdasarkan beberapa hal. Pertama, resolusi-resolusi DK-PBB nomer 242 dan 338. Kedua, pengakuan negara-negara Arab dan rakyat Palestina atas hak keberadaan Israel secara damai dan aman. Ketiga, diakhirinya kekuasaan Israel atas 1,6 juta lebih rakyat Palestina di beberapa wilayah. Dan keempat, pengakuan Israel atas hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri.⁷⁸

Meskipun pada perundingan ini masalah pemukiman tersebut tidak menjadi prasyarat bagi Palestina untuk mengikuti perundingan damai. Namun tidak berarti Palestina tidak lagi mempermasalahkannya. Pihak Palestina menginginkan pembicaraan tentang masalah tanah menjadi pembicaraan utama dalam perundingan tersebut dan enggan untuk membicarakan permasalahan-permasalahan teknis seperti yang diajukan oleh Israel.⁷⁹ Sikap Palestina ini tercermin dari pernyataan juru bicara delegasi Palestina, Dr. Hanan Ashrawi, lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa "selama pemukiman terus berlangsung, selama bulldozer-buldozer meratakan tanah kami, jelas bahwa Israel

⁷⁶ M. Amien Rais, *Arah Perkembangan Timur Tengah*, Jurnal Ilmu Politik 12, Gramedia, Jakarta, 1991

⁷⁷ M. Amien Rais, *Arah Perkembangan Timur Tengah*, Jurnal Ilmu Politik 12, Gramedia, Jakarta, 1991

⁷⁸ Haim Ramon, *Op. Cit.*, hal. 20

⁷⁹ M. Hamdan Basyar, *Politik Israel Terhadap Palestina*, Jurnal Ilmu Politik 12, Gramedia, Jakarta, 1991

mencoba menggali kuburan bagi proses perdamaian.”⁸⁰ Pada akhirnya, Konferensi Madrid ini juga tidak menghasilkan sesuatu keputusan yang mengarah pada segera tercapainya perdamaian di tanah Palestina.

Zionisme semakin mendapat angin ketika pada tahun 1991, tidak lagi disebut sebagai gerakan rasialisme. Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1991 mencabut resolusi PBB no. 3379 tahun 1975 yang mengutuk Zionisme sebagai gerakan rasialisme.⁸¹ Dengan dicabutnya resolusi tersebut, maka zionisme tidak lagi mencerminkan gerakan yang deskriminatif, represif, dan penindas. Zionisme secara formal diakui sebagai gerakan nasionalisme bangsa Yahudi. Zionisme membawa misi mempertahankan hak hidup dan kelangsungan dari orang-orang Yahudi yang telah banyak menderita di masa-masa sebelumnya. Hal ini sudah barang tentu memberikan keuntungan luar biasa bagi Israel. Di mata dunia internasional, secara de jure, Zionisme telah mendapatkan pengesahan sebagai semata-mata gerakan nasionalis dan kemanusiaan belaka. Zionisme bukan lagi sebagai “gerakan terlarang” yang harus dimusuhi dan dikecam.

Pada sektor pemukiman, Israel melakukan perluasan pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jalur Gaza secara intensif. Perluasan tersebut sangat mengkhawatirkan karena akan berakibat semakin terdesaknya posisi Palestina di kedua tempat tersebut. Berdasarkan peta yang dibuat oleh PBB pada Juni 1991, pemukiman Yahudi berserak-serak memenuhi hampir seluruh wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Daerah-daerah sekitar Hebron, Yerusalem, Yericho, Ramallah, Nablus, dan Jenin telah dipenuhi digunakan untuk perluasan pemukiman Yahudi.⁸² Sedangkan menurut B'Tselam, suatu organisasi pembela hak asasi manusia di Israel, menyebutkan sekitar 70% dari wilayah Tepi Barat telah diambil alih oleh Israel untuk dijadikan pemukiman Yahudi.⁸³

Di Jalur Gaza, yang luas wilayahnya lebih kecil juga terjadi hal serupa. Menurut Komite Koordinasi NGO di Jerusalem, Israel telah “merampok” lebih dari 50% luas wilayah Jalur Gaza.⁸⁴ Sedangkan menurut Rachele Marshall, seorang tokoh Yahudi AS, Departemen Perumahan dan Pemukiman Israel merancang untuk membuat perumahan bagi sekitar 4.000.000 Yahudi baik di Tepi Barat maupun di Jalur Gaza.⁸⁵

⁸⁰ Kompas, 26 Februari 1992

⁸¹ Kompas, 26 Februari 1992

⁸² Kompas, 26 Februari 1992

⁸³ Kompas, 26 Februari 1992

⁸⁴ Kompas, 26 Februari 1992

⁸⁵ Kompas, 26 Februari 1992

Sampai tahun 1990-an diperkirakan terdapat sekitar 250.000 sampai dengan 280.000 pemukiman Yahudi yang telah ada di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem bagian timur. Jumlah pemukiman tersebut termasuk kompleks perumahan yang sekurangnya berjumlah 145 dengan sekitar 25.000 pemukiman yang telah dibangun secara permanen. Padahal di ketiga tempat tersebut, jumlah penduduk Palestina hanya 1.700.000. Ini berarti pemerintah Israel bermaksud untuk menggusur rakyat Palestina keluar dari tanahnya. M. Amien Rais menyebut semakin menyebar dan membanjirnya pemukiman Yahudi ini sebagai "*creeping annexation*" atau aneksasi secara sedikit demi sedikit dan bertahap namun pada akhirnya akan menghabiskan seluruh wilayah-wilayah tersebut.⁸⁶

Pada tahun-tahun selanjutnya, setelah terpilihnya Yithzak Rabin menjadi PM Israel menggantikan Shamir, upaya-upaya penyelesaian diplomatis melalui perundingan terutama antara Israel dengan Palestina dapat dilakukan beberapa kali. Meskipun hasilnya masih belum dapat menunjukkan ke arah perdamaian secara menyeluruh dan pelaksanaan dari hasil-hasil yang dicapai masih belum memenuhi ketentuan yang telah disetujui. Rabin merupakan salah satu pemimpin Palestina dari partai Buruh yang lebih memilih jalan damai. Ini terbukti selama beberapa tahun berkuasa sebelum tewas tertembak pada 1996, Rabin telah melakukan beberapa kali perundingan dengan Palestina. Setidaknya terdapat lima kali perundingan yang terjadi selama kurun waktu antara 1991 sampai dengan 2000.⁸⁷ Selain perjanjian Madrid yang telah disebutkan diatas, terdapat empat perundingan penting lain.

Pertama, Deklarasi Prinsip-Prinsip (Principal Declaration). Berlangsung pada Januari 1993 di Sarpburg, Norwegia. Israel yang sejak pasca perundingan Madrid dipimpin oleh P.M. Yithzak Rabin melakukan perundingan damai dengan Palestina yang dipimpin oleh ketua PLO Yasser Arafat. Deklarasi ini menghasilkan keputusan yang signifikan. Palestina mengakui adanya negara Israel seperti bagaimana yang telah dinyatakan pada proklamasi Palestina pada 1988, dan Israel setuju untuk membongkar pemukiman Yahudi yang berada di wilayah pendudukan.

Kedua, pada Mei 1994 terjadi kesepakatan antara kedua pihak tentang otonomi Palestina. Israel bersedia mengakui pemerintahan otonomi Palestina dalam bentuk Otoritas Palestina (Palestine Authority). Kesepakatan ini diikuti oleh penyerahan wilayah Jericho dan pangkalan militer di Jalur Gaza pada Palestina serta penempatan Tentara Pembebasan

⁸⁶ Kompas, 26 Februari 1992

⁸⁷ Surya, 3 Agustus 2003, hal.

Palestina di wilayah-wilayah otonomi. Selanjutnya, pada Januari 1996, Yasser Arafat ditetapkan sebagai Presiden Otoritas Palestina. Ketiga, pada September 1995, Israel dan Palestina mengadakan perjanjian Oslo II di Taba, Mesir. Kedua pihak setuju untuk membagi wilayah Tepi Barat menjadi tiga bagian. Yaitu masing-masing dikuasai oleh Israel, Palestina, dan wilayah bersama yang dikuasai bersama Israel-Palestina.

Keempat, setelah kembali terjadi aksi bersenjata yang mengarah pada pendudukan Israel yang lebih luas pada 1996, maka pada 1997, atas tekanan AS, Israel menyerahkan lebih kurang 80 persen wilayah Hebron pada Palestina. Dan pada bulan Oktober 1998, Israel (PM. Benjamin Netanyahu) menandatangani perjanjian Wye River yang berisi tentang penarikan mundur pasukan Israel dari sebagian wilayah Tepi Barat.

Namun demikian, dalam masa pemerintahannya, Rabin juga melakukan berbagai kebijakan yang berdasar pada kekerasan dan penggunaan militer. Seperti ketika pada Desember 1992, atas alasan keamanan Israel, Rabin memerintahkan pengusiran terhadap 400 warga Palestina di wilayah pendudukan yang dianggap membantu militan Hamas. Pada Juli 1993, ia memerintahkan penyerangan terhadap kelompok Hizbullah di wilayah Lebanon bagian selatan.⁸⁸

Rabin pada 1996 juga pernah mengeluarkan isu tentang pemisahan wilayah Israel dengan Tepi Barat dan Jalur Gaza. Pemisahan ini adalah serupa dengan pagar keamanan yang dibuat Ariel Sharon pada 2002.⁸⁹ Pemisah yang direncanakan oleh Rabin juga meliputi pagar pemisah yang disertai penjagaan yang militer seperti pagar keamanan yang dibuat pada masa Sharon. Rencana ini dikeluarkan setelah terjadi aksi bom bunuh diri yang dasyat di Israel oleh militan Palestina disaat pihak Rabin dan Arafat berusaha menyelesaikan masalah Israel-Palestina melalui perundingan. Namun rencana ini urung dilaksanakan setelah Rabin ditembak mati oleh orang Israel dari kelompok ultra-nasionalis.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, meskipun terdapat perbedaan antara partai Buruh dan Likud dalam menghadapi gerakan intifadah dan tuntutan kemerdekaan Palestina namun pada dasarnya keduanya memiliki platform yang sama yaitu menciptakan negara Israel yang aman dan stabil diatas tanah Palestina. Sehingga, perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh Rabin maupun oleh penerusnya, Simon Pheres, sampai dengan yang

⁸⁸ Dhurorudin Mashad, *Masa Depan Perdamaian Timur Tengah*, Jurnal Ilmu Politik 14, LIPI, Gramedia, Jakarta, 1993, hal. 118

⁸⁹ Bertus Hendriks, *Pagar: Pertahanan atau Pemisahan Israel-Palestina ?*, dalam Kompas, Senin, 17 Juni 2002.

dilakukan oleh Sharon pada 2002 sampai 2003 dilakukan dalam rangka keamanan tersebut. Disamping tetap melakukan tindakan-tindakan militer untuk mengatasi ancaman keamanan dari para militan Palestina.

Semenjak pecahnya intifadah, ancaman keamanan yang dialami oleh Israel berasal dari kelompok-kelompok militan yang disebutnya sebagai teroris. Ancaman yang berada pada tingkat negara telah berkurang meskipun tidak hilang sama sekali. Berkurangnya ancaman keamanan pada tingkat negara dan bergeser pada ancaman kelompok ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kekalahan-kekalahan yang dialami negara-negara Arab dalam pertempuran melawan Israel membuka pemikiran dunia Arab bahwa perjuangan mengusir Yahudi dari Palestina tidak dapat hanya dilakukan melalui peperangan saja. Ditambah dengan adanya perjanjian damai dan tidak saling menyerang antara Israel dengan beberapa negara Arab seperti Mesir.

Kedua, lahirnya kesadaran dari bangsa Palestina tentang kemandirian dan nasionalisme. Dengan kekalahan dan terpecahnya sikap negara-negara Arab, bangsa Palestina mulai sadar bahwa yang dapat memperjuangkan nasib mereka dan merintis lahirnya negara Palestina merdeka adalah mereka sendiri. Organisasi-organisasi perjuangan Palestina yang mulai bermunculan sejak tahun 1970-an menemukan suatu momentum penting dalam perjuangannya dengan pecahnya demonstrasi besar-besaran pada Desember 1988. Semenjak itu, terjadilah kekerasan-kekerasan yang tidak seimbang antara para demonstran yang menggunakan tongkat dan ketapel melawan tentara Israel bersenjata lengkap.

Periode ini merupakan periode kebangkitan bangsa Palestina yang berarti ancaman baru untuk Israel. Beberapa negara Arab telah memberi pengakuan pada Israel dan menyatakan tidak bermusuhan dengan Israel. Tapi ancaman tidak berarti hilang. Ancaman kini datang dari bangsa yang selama ini merupakan korban utama politik Israel dan peperangannya dengan Arab, yaitu Palestina. Orang-orang Palestina di daerah pendudukan, di tempat penampungan, dan di luar negeri berani menunjukkan penentangannya pada Israel.

Intifadah sesuai dengan maknanya bukanlah suatu gerakan perlawanan militer, namun merupakan suatu demonstrasi besar dan keras dari orang-orang Palestina terutama yang berada di wilayah pendudukan terhadap Israel. Demonstrasi yang terjadi secara terus-menerus ini direspons dengan kekuatan militer oleh Israel dan berakhir dengan kerusuhan dan kekerasan.

Pada perkembangannya, intifadah semakin sedikit memperlihatkan bentuk-bentuk demonstrasi namun berubah menjadi kekerasan antara sipil (Palestina) dengan militer (Israel). Intifadah bergeser menjadi pelemparan batu, kayu, dan bom Molotov oleh rakyat Palestina terhadap serdadu Israel. Yang dibalas dengan gas air mata, tembakan senapan, peluncuran artileri ringan, sampai dengan pengeboman oleh tank-tank tempur Israel. Memang belum terdapat serangan terhadap posisi Israel secara militer atau bom bunuh diri dari pihak Palestina, namun benih-benihnya telah muncul di kala pada tahun 1993 tercatat adanya serangan bom bunuh diri dari sebuah mobil yang berisi dua orang Palestina di wilayah Israel. Serangan bom semacam itu belum merupakan tren karena teknologi yang dipakai masih sederhana sehingga belum mencapai keefektifannya. Lebih jauh, selama kurun waktu bom tahun 1993 tersebut sampai sebelum pecahnya Intifadah II tahun 2000, tercatat terjadi peledakan bom bunuh diri sebanyak 61 kali.⁹⁰

Potensi ancaman yang lebih besar diperlihatkan oleh kelompok-kelompok perjuangan di Palestina yang ikut serta dalam intifadah tersebut. Kelompok-kelompok perjuangan seperti Hamas, Jihad Islam, sampai dengan Al-Fatah telah memberikan ancaman yang tidak kalah serius dengan yang ditunjukkan oleh negara-negara Arab. Bila dalam menghadapi negara-negara Arab, Israel dapat membuat dan menggunakan daerah perbatasan sebagai buffer zone untuk menahan serangan, maka serangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini dapat jauh lebih masuk ke dalam jantung negara Israel. Bila pergerakan ataupun serangan dari negara-negara Arab dapat dipantau dengan radar ataupun pos-pos pengintai di perbatasan. Sedangkan serangan dari kelompok perjuangan berasal dari dalam wilayah yang dikuasai oleh Israel sendiri.

Melihat perkembangan gerakan ini, sangat mungkin pada masa berikutnya akan terjadi perlawanan-perlawanan yang bersifat militer. Bukan hanya secara sporadis seperti yang dilakukan perorangan, namun bahkan secara kelompok yang terorganisasi dengan baik yang mampu menjangkau sasaran-sasaran vital Israel. Gerakan intifadah yang semula merupakan bentuk "protes keras" rakyat Palestina pada Israel, kini mulai telah dipenuhi dengan bentuk-bentuk kekerasan yang sangat menakutkan terutama bagi pihak sipil Israel. Intifadah telah menjadi gerakan perlawanan dengan kekerasan (terorganisir dan sistematis) dan bukan gerakan secara damai semata.

Upaya Israel untuk mempertahankan keutuhan wilayah yang didudukinya semakin berat pada pertengahan dasawarsa 1990-an. Setelah diakuinya pemerintahan

⁹⁰ *Journal of Palestine Studies* XXXII, no. 1, University of California Press, California, 2002, hal. 130

Palestina yang berbentuk Otoritas Palestina, pada 1996, Yasser Arafat yang juga Ketua PLO terpilih sebagai Presiden bangsa Palestina dengan perolehan suara mutlak sekitar 80 persen. Hasil ini diakui oleh dunia internasional termasuk oleh Rabin (PM Israel saat itu). Pengakuan Israel tersebut merupakan kebalikan dari sikap pemerintahan Shamir yang menganggap PLO sebagai organisasi teroris yang harus dihancurkan. Rabin juga melakukan perundingan-perundingan damai dengan Arafat. Yang membawa hasil dikembalikannya beberapa bagian wilayah yang dikuasai Israel kepada Otoritas Palestina dan disertai dengan penarikan mundur tentara-tentara Israel di daerah-daerah tersebut.

Perundingan maupun perjanjian yang dilakukan oleh pemerintahan dari partai Buruh (Rabin dan Pheres) tersebut membawa perubahan situasi di Timur Tengah. Perdamaian seperti sedang dirintis dan membawa harapan bagi keamanan hidup. Partai Buruh menyadari bahwa semakin banyaknya wilayah yang dianeksasi berarti semakin sempit wilayah yang masih dikuasai bangsa Palestina. Hal tersebut akan memancing amarah yang lebih besar dari bangsa Palestina yang berarti adalah ancaman terhadap keamanannya. Dengan kompensasi keamanan, Israel pada masa itu merasa perlu untuk memberikan ruang wilayah kepada Palestina untuk meredakan perlawanan mereka. Tawaran Israel untuk menyerahkan sebagian wilayah Tepi Barat kepada Palestina asalkan mereka mau bergabung dengan Yordania dalam bentuk konfederasi hampir saja berhasil. Namun dicabutnya klaim Raja Yordania atas Tepi Barat kembali mementalkan tawaran tersebut.

Upaya perdamaian tersebut tidak berjalan mulus, ketika pada 1996, terjadi serangan bom di Israel oleh pejuang Palestina. Situasi kembali memburuk. Rabin yang juga mantan panglima militer tersebut memerintahkan penyerangan terhadap beberapa lokasi yang dicurigai sebagai sarang kelompok teroris tersebut. Juga, karena serangan itu, Rabin mengeluarkan sikap baru untuk membatasi wilayah kekuasaan Israel dengan yang dihuni Palestina. Pemisah tersebut mirip dengan yang dilakukan Sharon pada 2002. Sebelum (pagar) pemisah tersebut direalisasikan, Rabin terlebih dahulu meninggal dunia karena ditembak oleh bangsanya sendiri.

Selain tahun 1996 tersebut, Israel juga melakukan serangan militer pada 1982 dan 1993 pada bagian selatan wilayah Lebanon yang diduga sebagai markas pejuang Palestina. Banyaknya aksi-aksi serangan yang dianggap terorisme oleh Israel membuat Israel mengeluarkan kebijakan untuk menghancurkan sarang teroris. Salah satunya adalah di bagian selatan Lebanon tersebut. Dalam kedua serangan tersebut, sebagian wilayah

Lebanon bagian selatan tersebut berhasil dikuasai. Israel juga membangun buffer zone di wilayah yang masuk jauh dari perbatasan internasional.

Ketika wilayah Lebanon yang dikuasai Israel tersebut akan dikembalikan, Israel mengalami kerugian yang besar secara materi karena harus membongkar pembatas yang mereka buat dan membangunnya kembali di atas garis perbatasan yang diakui dunia internasional. Ini merupakan suatu contoh harga mahal yang harus dibayar Israel dalam menjaga keamanannya. Ini juga menjadi pelajaran berharga bagi Israel untuk lebih cermat lagi dalam membuat buffer zone ataupun pembatas di daerah-daerah perbatasannya di masa mendatang.

Pada periode ini dapat dilihat perbedaan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintahan partai Likud dan Buruh. Likud diwakili oleh pemerintahan Yithzak Shamir, sedangkan Buruh oleh Rabin. Shamir yang memerintah pada saat munculnya intifadah melakukan berbagai kebijakan sebagai berikut:

1. Melawan Intifadah dengan jalan militer.
2. Melanjutkan kebijakan imigrasi secara besar-besaran
3. Mengikuti Konferensi Madrid yang tidak membawa perubahan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Sedangkan pemerintahan mendiang Yithzak Rabin yang berasal dari partai Buruh melakukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Melakukan perundingan damai dengan Palestina yang diwakili oleh PLO.
2. Sebagai tindak lanjut dari perundingan-perundingan tersebut, Israel menyerahkan beberapa bagian wilayah kepada Palestina dan menarik pasukannya dari tempat-tempat tersebut.
3. Tetapi tetap melakukan tindakan militer terhadap aksi-aksi perlawanan Palestina yang dirasa membahayakan keamanan Israel ataupun warganya.

Dari sini dapat dilihat perbedaan dan persamaan kedua partai. Likud lebih keras dalam menghadapi gerakan intifadah. Tidak menyukai jalur perundingan damai. Sedangkan Buruh lebih memilih jalur perundingan damai dengan PLO untuk meredakan aksi intifadah. Tetapi keduanya sama-sama tetap menggunakan jalan militer untuk mengatasi masalah keamanannya.

3.4 Periode Intifadah II tahun 2000

Periode setelah meletusnya intifadah Al Aqsa atau intifadah II pada tahun 2000 merupakan periode dimana serangan bom bunuh diri Palestina mencapai puncaknya. Dari tahun 2000 sampai dengan 2002 tercatat peningkatan yang mengerikan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada Bab terdahulu, para militan Palestina melihat serangan semacam ini merupakan tindakan yang efektif dalam perjuangannya. Para pemuda bahkan pemuda Palestina yang sukarela melakukan aksi ini semakin banyak. Serangan dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan memakan korban siapa saja di Israel dan bahkan orang-orang Israel yang berada di luar negeri.

Perubahan gerakan ini bukan merupakan suatu penyelewengan terhadap cita-cita awal intifadah. Namun merupakan salah satu bentuk “penyesuaian” yang berjalan secara gradual mengikuti perkembangan situasi. Protes tidak lagi cukup dengan demonstrasi saja namun juga dalam bentuk-bentuk yang lebih dapat memaksa pihak lain untuk mendengar mereka seperti penembakan, pengeboman, dan lain-lain yang merenggut korban jiwa. Dengan tetap terjadinya gerakan perlawanan seperti intifadah tersebut, mereka berusaha selalu mengingatkan dunia internasional bahwa masih terdapat penindasan di Palestina.

Namun yang terjadi kemudian tidak hanya perlombaan senjata tetapi juga perlombaan tingkat serangan yang diakibatkan karena semakin canggihnya persenjataan dan memanasnya situasi. Berkali-kali Israel baik melalui pernyataan maupun dengan aksi secara langsung menegaskan bahwa mereka akan membalas setiap serangan yang ditujukan baginya dengan kekuatan yang berkali-kali lipat hebatnya. Demikian pula dengan para pejuang Palestina yang juga selalu mengusung dendam dan ingin membalas setiap aksi militer Israel dengan tindakan-tindakan kekerasan yang lebih hebat dari aksi mereka sebelumnya. Situasi tidak akan membaik apabila pihak-pihak yang ada tetap berpegang pada prinsip pembalasan yang lebih hebat.

Intifadah II terjadi setelah pada bulan September 2000, Ariel Sharon yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan dibawah P.M. Ehud Barak dengan membawa pasukan Israel mendatangi Masjid Al Aqsa.⁹¹ Alasannya mencari militan Palestina yang diburu Israel karena sebelumnya melakukan serangan bersenjata di wilayah Israel. Penyerangan ini membawa korban di pihak Palestina. Selain itu, penyerangan tersebut semakin membakar semangat warga Palestina untuk melawan pendudukan Israel. Khotbah-khotbah para pemuka agama di Palestina kembali menyerukan intifadah dan

⁹¹ Tempo, 3 November 2002

jihad bagi warga Palestina. Aksi serupa kembali dilakukan Sharon pada Oktober 2001 dengan mengirimkan 3000 pasukan Israel, mendatangi Temple Mount dengan alasan yang sama.⁹² Namun pada kala tersebut Sharon telah menduduki kursi P.M. Israel yang didudukinya sejak Februari 2001.

Sharon yang memiliki reputasi buruk dimata Palestina tidak merubah perdirianya yang anti-Palestina setelah menjadi P.M. Israel. Berkali-kali militer Israel semasa pemerintahannya menyerang wilayah Palestina, menangkap ataupun membunuh warga Palestina baik yang dianggap sebagai militan maupun penduduk sipil, menghancurkan dan menggusur bangunan-bangunan Palestina dengan alasan tempat tersebut digunakan sebagai sarang militan atau alasan-alasan yang lain yang ditujukan untuk keamanan Israel.

Sharon juga memerintahkan militernya untuk menyerang wilayah Tepi Barat dan mengepung kantor pemimpin Otoritas Palestina Yasser Arafat di Ramallah pada Maret 2002.⁹³ Serangan semacam ini ditujukan untuk menekan gerakan militansi kelompok-kelompok perlawanan Palestina yang semakin intensif melakukan penyerangan bersenjata dan terutama aksi bom bunuh diri. Militer Israel mengancam akan menghancurkan kantor pemerintahan Palestina tersebut dan mengasingkan Arafat bila aksi teroris seperti aksi bom bunuh diri tidak segera dihentikan. Arafat dinilai tidak serius dalam proses perdamaian dan pro-militan. Bahkan sampai tulisan ini dibuat, aksi pendudukan dan pengepungan Tepi Barat termasuk Ramallah masih berlangsung. Ini berarti pengepungan dan pegisolasian Arafat telah berlangsung sekitar 20 bulan (Maret 2002 – Oktober 2003). Dan nampaknya masih akan terus berlanjut.

Serangan yang dilakukan Israel ini sepertinya cukup berhasil karena setelah serangan ini aksi bom bunuh diri Palestina menurun sangat drastis. Namun ini tidak berlangsung lama, karena setelah beberapa saat Israel kembali mengalami serangan dan aksi bom bunuh diri. Penyerangan dan pendudukan militer Israel di Tepi Barat ternyata tidak menciutkan nyali perjuangan perlawanan Palestina. Bahkan semakin melukai perasaan bangsa Palestina dan membakar semangat mereka.

Sharon juga tetap konsisten dengan kebijakan para pendahulunya terutama yang berasal dari partai Likud yaitu melanjutkan program pemukiman imigran Yahudi yang berasal dari luar negeri dengan membangun terus-menerus pemukiman Yahudi. Pada 9

⁹² Forum Keadilan, no. 30, 10 November 2002

⁹³ Forum Keadilan, no. 30, 10 November 2002

Januari 2002, Sharon mengalokasikan 34 juta dollar AS untuk menampung orang-orang Yahudi dari Perancis, Argentina, dan Afrika Selatan. Akibatnya, populasi Yahudi di Tepi Barat bertambah sebanyak 21 persen.⁹⁴

Kengototan Sharon dalam masalah pemukiman ini juga yang akhirnya membuat Sharon kehilangan dukungan dari partai Buruh yang telah mendukungnya sejak terpilih pada awal 2001. Perpecahan ini dipicu oleh anggaran belanja pemerintahan P.M. Sharon yang diajukan pada parlemen pada Oktober 2002. Sharon mengajukan anggaran sebesar 150 juta dollar AS untuk membangun pemukiman dan pos-pos militer di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza.⁹⁵ Sedangkan partai Buruh yang dipimpin Ben Elezier hanya menginginkan anggaran pemukiman sebesar 5 juta dollar AS saja sedangkan selebihnya digunakan untuk tunjangan pensiun, tunjangan kesehatan, dan bantuan bagi keluarga yatim.⁹⁶ Elezier mengungkapkan ketidaksetujuannya atas rencana Sharon dengan mengatakan bahwa kebijakan semacam itu (pembangunan pemukiman secara besar-besaran di Tepi Barat dan Jalur Gaza) yang selama ini memicu pertikaian antara Israel dengan warga Palestina.⁹⁷ Elezier dalam kesempatan yang lain menambahkan bahwa dana sebesar itu lebih baik digunakan untuk memberikan tunjangan kesehatan dan pensiun pegawai.⁹⁸

Sharon juga membuat sebuah peta tentang pembagian wilayah. Dalam peta tersebut, Israel akan semakin banyak menganeksasi wilayah Tepi Barat. Israel akan menguasai lebih banyak tanah Palestina di Tepi Barat untuk digunakan sebagai pemukiman, pembuatan Pagar Keamanan, dan kawasan militer yang berupa pos-pos penjagaan. Warga Palestina yang berada di tanah-tanah yang akan digunakan untuk rencana Ariel Sharon ini akan diusir ke koloni-koloni Palestina yang juga telah direncanakan oleh Israel.

Tujuan peta ini selain untuk mengatasi masalah keamanan juga ditujukan untuk mengatasi masalah demografi. Pertumbuhan penduduk Palestina di Tepi Barat mencapai hampir tiga kali lebih cepat dibanding pertumbuhan penduduk Israel.⁹⁹ Dengan pertumbuhan seperti itu, jumlah bangsa Palestina pada masa mendatang dapat berjumlah

⁹⁴ Forum Keadilan, no. 30, 10 November 2002

⁹⁵ Tempo, 17 November 2002

⁹⁶ Tempo, 17 November 2002

⁹⁷ Forum Keadilan, no. 30, 10 November 2002

⁹⁸ Forum Keadilan, no. 32, 24 November 2002, hal. 61

⁹⁹ Journal of Palestine Studies XXXII, no. 1, University of California Press, California, 2002, hal. 170

lebih banyak daripada bangsa Yahudi. Bila hal tersebut terjadi maka tujuan kebijakan imigrasi untuk menguasai demografi di Tepi Barat akan menjadi sia-sia.

Sementara kebijakan perluasan pemukiman terus terjadi, bom bunuh diri dari militan Palestina telah membawa opini baru dalam masyarakat Yahudi. Mereka tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintahan Sharon tetapi mulai berpikir bahwa mereka (negara Israel) memerlukan suatu batasan territorial yang jelas dan dijaga ketat. Pemikiran ini muncul karena mudahnya para operator bom bunuh diri untuk memasuki wilayah-wilayah Israel dengan membawa bom untuk diledakkan. Mereka para operator meskipun berasal dari wilayah-wilayah Palestina yang berada di Tepi Barat diluar teritorial Israel dengan mudah keluar masuk Israel.

Selain itu, kenyataan bahwa sebagian besar para operator bom berasal dari Tepi Barat bukan dari Jalur Gaza yang pada masa sebelumnya dikenal sebagai sarang militan. Memperlihatkan bahwa perbedaan bentuk perbatasan antara batas-batas Israel dengan Tepi Barat dan Jalur Gaza juga berakibat berbeda. Jalur Gaza pada tahun 2000 telah "ditutup" dengan pagar tinggi dan sensor elektronik sehingga mempersulit lalu lintas keluar masuk Jalur Gaza. Wilayah ini menjadi terisolasi sehingga menyulitkan gerak laju para militan. Ancaman militan dari wilayah inipun berkurang.

Sedangkan Tepi Barat adalah wilayah yang lebih menyatu dengan wilayah Israel. Dikarenakan banyak orang Palestina di Tepi Barat yang bekerja sebagai buruh di Israel. Sehingga arus keluar masuk Tepi Barat-Israel cukup tinggi dan sedikit longgar. Namun kelonggaran ini ternyata membawa petaka dengan semakin tingginya intensitas bom bunuh diri yang operatornya berasal dari wilayah ini. Situasi ini menumbuhkan pemikiran bahwa Tepi Barat-pun harus diisolasi seperti Jalur Gaza untuk mempersulit para operator melakukan aksinya di Israel. Namun rencana ini mungkin akan lebih sulit terlaksana dibandingkan ketika mengisolasi Jalur Gaza karena alasan-alasan diatas.

Selain berencana menutup perbatasan, Israel juga akan melaksanakan rencananya yang lain terhadap Tepi Barat. Daerah tersebut akan dibagi menjadi delapan koloni. Tiap koloni akan dibatasi check-points yang dijaga ketat oleh IDF. Dan pada kelanjutannya, beberapa bagian dari perbatasan koloni-koloni dan check-points yang berbatasan langsung dengan wilayah Israel tersebut akan digantikan dengan pagar keamanan. Beberapa bagian dari pagar tersebut yang masuk jauh ke dalam wilayah Palestina. Tetapi ada juga bagian-bagian dari pemukiman Yahudi di Tepi Barat yang tampak terasing karena berada di luar jangkauan pagar tersebut.

Pergantian pemerintahan yang terjadi di Israel tidak membawa perubahan yang signifikan dalam proses menuju perdamaian. Baik partai Likud yang keras terhadap masalah Palestina maupun Buruh yang lebih moderat dalam menghadapi Palestina selalu mengedepankan masalah keamanan. Dibawah pemerintahan siapapun, Israel selalu mempunyai masalah keamanan dan melakukan aksi militer. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan tiap pemerintahan baik yang berasal dari Likud maupun Buruh tidaklah berbeda. Yang berbeda hanyalah pendekatan yang digunakan. Kebijakan-kebijakan pemerintah Israel terutama setelah lahirnya intifadah tetap berkisar pada penghancuran militan Palestina-Arab, pembangunan pemukiman, dan penguasaan atas tanah Palestina.

Kedua pihak baik Israel maupun Palestina sama-sama bertekad untuk menghancurkan pihak yang lain. Pendekatan kekerasan dan militer telah mengakibatkan jatuhnya korban dari kedua pihak dalam jumlah yang cukup besar. Sepanjang setengah tahun pada 2002 saja terdapat 1.894 orang dari pihak Palestina, 575 orang dari Israel, dan 18 orang asing yang meninggal. Dalam laporannya pada 24 Juni 2002, IDF menyebutkan sebanyak 2,992 orang sipil Israel dan 1.216 orang militer yang terluka.¹⁰⁰

Berkuasanya partai Likud pada lima tahun terakhir bisa jadi merupakan langkah mundur proses perundingan. Terbukti mulai dari Netanyahu, Barak, sampai dengan Sharon tidak melakukan kebijakan maupun tindakan yang mengarah pada proses tersebut. Ketiganya bersikap lebih keras bila dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin dari Buruh pada dekade 1990-an yang merintis jalan perdamaian dengan Palestina. Seandainya saja dalam lima tahun tersebut pemerintahan yang berkuasa adalah Buruh, kebijakan yang dikeluarkan mungkin tidak sama. Namun demikian tetap saja mereka tidak akan mengkompromikan keamanannya

¹⁰⁰ Journal of Palestine Studies XXXII, no. 1, University of California Press, California, 2002, hal. 130

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perubahan cara-cara perjuangan bangsa Palestina (intifadah) telah merubah situasi keamanan di Israel. Keadaan semakin tidak aman yang terjadi akibat semakin gencarnya serangan-serangan bom bunuh diri. Semenjak intifadah II tahun 2000, aksi bom bunuh diri semakin intensif. Peningkatan ini cukup drastis bila dibandingkan dengan kondisi selama sepuluh tahun sebelumnya.

Tuntutan jaminan keamanan demikian kuatnya sehingga mampu menyampingkan cita-cita Israel Raya. Pemerintahan Sharon menyadari bahwa aksi-aksi bom bunuh diri tersebut dapat menjatuhkan kabinetnya. Sehingga perlu tindakan tegas untuk mencegah aksi-aksi tersebut.

Sebagai seorang pemimpin yang nasionalis dan pragmatis, Sharon harus mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan saat itu. Yaitu kebutuhan akan rasa aman dan keselamatan warganya. Karenanya PM. Israel Ariel Sharon bersama kabinetnya mengeluarkan keputusan untuk membangun Pagar Keamanan. Pagar ini bertujuan untuk mencegah penyusupan oleh militan Palestina yang akan melakukan tindakan terorisme dengan melakukan bom bunuh diri.

Meskipun mendapat banyak kecaman, Pagar Keamanan ini tetap dibangun. Dari luar negeri kecaman dikarenakan proyek ini akan menganeksasi tanah Palestina dan melanggar hak-hak Palestina. Protes dari dalam berkisar masalah letaknya. Apakah mengikuti Green Line yang mengorbankan keamanan pemukiman-pemukiman Yahudi yang banyak tersebar di seluruh Tepi Barat, atautkah mencakup seluruh pemukiman Yahudi yang berarti penguasaan hampir seluruh tanah Tepi Barat milik Palestina.

Sampai selesainya tahap pertama pembangunan Pagar Keamanan, tujuan yang diharapkan belum berhasil. Karena pembangunannya memang belum rampung. Berdasarkan pengalaman di Jalur Gaza, pagar semacam ini terbukti sukses menurunkan jumlah aksi bom bunuh diri Palestina yang berasal dari Jalur Gaza. Diharapkan dengan adanya pagar ini maka hal yang sama akan dapat terjadi di Tepi Barat.

Keefektifan pagar ini masih perlu diuji dan dibuktikan di kemudian hari. Selesainya

sekitar 140 kilometer pagar tahap pertama belum dapat menunjukkan kemampuan pagar dengan perangkat militer ini. Peristiwa semacam penembakan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai penyusup belum terjadi. Seperti yang terjadi di Jerman selama kukuhnya Tembok Berlin. Aksi penyerangan oleh Palestina juga belum reda. Karena masih ada sebagian kecil di sebelah utara dan sebagian besar di sebelah selatan pagar keamanan yang masih belum didirikan pagar. Sehingga secara geografis, masih banyak jalan masuk menuju wilayah Israel dari Tepi Barat.

Pagar Keamanan Israel ini sendiri diperkirakan tidak dapat menjamin keamanan dan keselamatan secara sempurna. Meskipun tujuan untuk mencegah aksi bom bunuh diri dapat tercapai. Tetapi itu bukan berarti ancaman dari kelompok-kelompok militan dan rakyat Palestina akan juga berhenti.

Seperti yang dalam pernyataan Kementerian Informasi Palestina. Meskipun pagar ini telah dirampungkan seluruhnya, pagar yang memisahkan Tepi Barat dengan wilayah Israel tersebut akan dapat ditembus. Buktinya dapat dilihat dari aksi peledakan WTC dan Pentagon di AS. Teroris mampu meyeberangi lautan yang luas untuk melakukan peledakan seperti yang terjadi pada peristiwa 11 September 2001 itu. Maka kelompok-kelompok perlawanan juga akan menemukan cara untuk menembus pagar keamanan dan kawasan militer yang dibangun Israel. Dan serangan pada kedudukan Israel akan kembali terjadi.

Tanda-tanda kelompok perlawanan Palestina akan menemukan cara lain untuk menyerang wilayah Israel telah ada. Terjadinya pemboman melalui cara-cara lain telah digunakan. Yaitu dengan menggunakan bom yang dikendalikan radio kontrol dan pemboman melalui peluncuran misil roket. Kedua macam serangan ini telah dilakukan pada tahun 2002, dan keduanya juga terbukti mengakibatkan tewasnya penduduk Israel. Bom menggunakan radio kontrol dan melalui roket tersebut dapat dipicu dari tempat yang jauh. Sehingga pelaku tidak perlu melewati Pagar Keamanan.

Dengan demikian, sepertinya harapan akan segera tercapainya perdamaian masih harus melalui jalan yang panjang. Kedua pihak masih saja berusaha saling menegasi. Pemikiran untuk dapat hidup berdampingan seperti yang diutarakan Ben Elizier sebenarnya telah menunjukkan bibitnya, namun masih dalam batas pemikiran belaka. Masih harus menunggu waktu yang panjang untuk membuktikannya.

5.2 Saran-saran

Dari tulisan yang telah disajikan oleh penulis, penulis ingin memberikan sedikit saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada PBB dan Dunia Internasional. Agar dapat lebih seimbang dan mendalam memahami konflik Israel-Palestina. Perlu ditelusuri akar permasalahan dari rasa frustrasi yang dialami orang-orang Palestina sehingga melahirkan serangan-serangan seperti aksi bom bunuh diri.
2. Kepada pihak-pihak yang berkonflik. Israel seharusnya menghindari kebijakan-kebijakan yang justru mempertajam kemarahan bangsa Palestina seperti kebijakan tentang pemukiman dan Pagar Keamanan. Karena kebijakan semacam ini terang-terangan merampas lebih banyak lagi tanah Palestina. Ini hanya akan memunculkan perlawanan dari warga Palestina terhadap Israel. Sedangkan untuk Palestina, perlu disadari bahwa serangan dengan alasan apapun terhadap penduduk sipil dapat dikategorikan sebagai terorisme. Sikap berani mati dalam perjuangan memang diperlukan. Tetapi hanya yang masih hidup saja yang dapat tetap berjuang.
3. Untuk Civitas Akademika. Agaknya perlu diperhatikan perkembangan permasalahan dan kelengkapan buku penunjang tentang konflik Israel-Palestina ini. Karena konflik ini merupakan konflik yang telah berumur panjang tetapi masih belum menunjukkan titik penyelesaian. Karena tidak hanya menyangkut politik dan militer, tetapi juga menyangkut masalah kepercayaan. Tanah Palestina merupakan tanah kelahiran tiga agama terbesar di dunia.
4. Untuk seluruh umat manusia. Hidup adalah hak asasi manusia apapun rasnya. Tetapi bertahan hidup dengan mengorbankan kehidupan orang yang lain sama sekali tidak dapat dibenarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James, Public Policy Making, Halt, Rinehart dan Winston, New York, 1979
- Columbis, Theodore A. dan Wolfe, James H., Introduction to International Relations: Power and Justice, England Cliffs, New Jersey
- Davis, M. Jane, ed, Politics and International Relation in the Middle East, Department of International Politics University of Wales, Edward Elgar, Aldershot, 1995
- Dye, Thomas, Understanding Public Policy, edisi III, Engle Wood Cliffs, New Jersey, 1978
- Hadi, Sutrisno, Metode Research, Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1980
- Heikal, Hassanein, Di Kaki Langit Gurun Sinai, penerj. H. Mahbub Djunaidi, PT. Al Maarif, Bandung, 1979
- Hoggerberg, Richard, The Study of Public Policy, Indianapolis, 1979
- Lacey, Robert, Kerajaan Petrodollar Saudi Arabia, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1986,
- Lenczowski, George, Timur Tengah di Tengah Kancanah Dunia, Sinar Baru Algasindo, Bandung, 1993
- Marzuki, Metodologi Research, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Gajah Mada, Yogyakarta, 1980
- Mohtar Mas' oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, LP3ES, Jakarta, 1990
- Mroz, John E., Beyond Security: Private Perception Among Arab and Israel, Pergamon Press, New York, 1980,
- Pareira, Andre H., ed, Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Prospek Perdamaian di Timur Tengah: Sebuah Tilikan Latar Belakang, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995
- Poerwodarminto, W. J. S., Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976
- Rosenau, James N., ed, International Politics and Foreign Policy, Free Press, New York, 1969,
- Sihbudi, M. Riza, dkk, Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah, Eresco, Bandung, 1993
- Sihbudi, Riza, dkk, Profil Negara-negara Timur Tengah, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995

Snyder, Richard C., Foreign Policy Making: An Approach to Study International Politics, New York, The Free Press, 1962.

The Liang Gie, Ilmu Politik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1979

Varma, S. P., Toeri Politik Modern, Rajawali Press, Jakarta, 1990

Winarni, Retna, Dra., Pengaruh Zionisme Politik dengan Hubungan Israel-Palestina, Universitas Jember, Jember, 1995

Jurnal

Journal of Palestine Studies XXXI, no. 4 (Summer 2002), University of California Press, California, 2002

Journal of Palestine Studies XXXII, no. 1 (Autumn 2002), University of California Press, California, 2002

Jurnal Ilmu Politik 9, LIPI, Gramedia, Jakarta, 1991

Jurnal Ilmu Politik 12, LIPI, Gramedia, Jakarta, 1991

Jurnal Ilmu Politik 14, LIPI, Gramedia, Jakarta, 1993

Media Massa

Forum Keadilan, no. 30, 10 November 2002

Forum Keadilan, no. 32, 24 November 2002

Kompas, 8 Mei 2002,

Kompas, Senin, 17 Juni 2002, Israel-Palestina Berlomba Pengaruhi AS, dan Pagar: Pertahanan atau Pemisahan Israel-Palestina

Kompas, 18 Juni 2002, Arafat Kecam Provek Pagar Keamanan

Kompas, Kamis, 20 Juni 2002, Israel kembali duduki Jenin dan Kalkilya.

Kompas, Minggu, 23 Juni 2002, Intifadah dan Aksi Bunuh Diri Palestina.

Kompas, 11 Agustus 2003, Amerika Serikat Akan Semakin Menekan Israel

Kompas, 24 Agustus 2003, Peta Perdamaian Semakin Jauh

Kompas, Kamis, 2 Oktober 2003, Kabinet Israel Setujui Bangun Pagar Tahap II

Tempo, 3 November 2002 Israel Kehilangan Akal

Tempo, 15 November 2002, "Jalur Cepat" Menuju Surga

Tempo, 17 November 2002, Tiga Bulan Mengadu Untung

Jakarta Post, 19 Juni 2002

Jawa Pos, 4 Februari 2001

Pikiran Rakyat, 20 September 2002, Bom Bunuh Diri Hamas Kembali Guncang Israel

Sijori Pos, Kamis, 20 Juni 2002, Militer Israel duduki Tepi Barat.

Suara Hidayatullah, no. 07/XV/November 2002, Jalan Hidup Syeikullah Hamas

Suara Hidayatullah, no. 09/XV/Januari 2003, Mereka Teroris Harus Berhati-hati

Suara Merdeka, Jumat, 1 Agustus 2003, Pagar Keamanan Pembawa Derita

Surya, 5 Oktober 2003, Restoran dibom, 18 orang tewas

Situs internet

www.state.gov/israel tertanggal 9 Desember 2002

www.crbonline.com

www.bbcindonesia.com

www.erasoslem.com

www.dwelle.de

www.bbc.co.uk

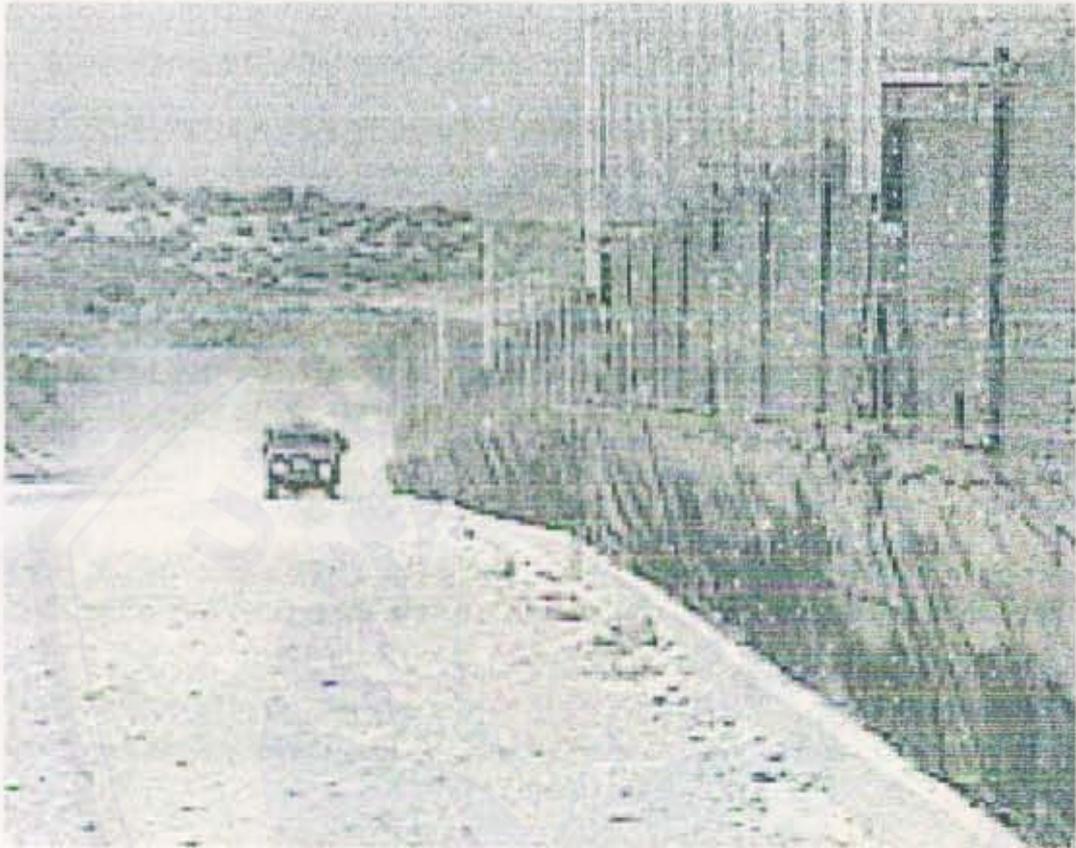
www.state.gov/palestine.il

LAMPIRAN



Gb.1. Beberapa jurnalis melalui salah satu bagian Pagar Keamanan Israel di dekat kota Kalkilya (25 Juni 2002/AFP Photo)*

* Journal of Palestine Studies XXXI, no. 4 (Summer 2002), University of California Press, California, 2002, hal. 151.



Gb.2. Salah satu bagian lain Pagar Keamanan di luar kota.*

* www.erasmoslem.com